



**INDONESIA**  
OFFICIAL 40TH MEMBER  
SINCE OCTOBER 2023

# Milestone

Laporan Semester | *Mid-year Report*  
**2024**

**MILESTONE**  
**INTRAC MID-YEAR REPORT 2024**

**Publisher:**  
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center

**Supervisory Official:** Supriadi (Head of INTRAC AML-CFT Empowerment Partnership Center)

**Coordinator:** Andi Emil Hidayat

**Editorial Team:** Putri Artika R, Sani Nuraida, Irwansyah, Bachtiar Amri, Adeck Herwin Indriani

**Layout Designer:** Mulyana, Imam Apriyogo

**Contributor:** Tri Andriyanto, Dyah Ferawati, Dinda Ulfa Sri Rejeki, Wendhiarto Arief Digdoyo, Kristina Widhi Prasetyanti, Tri Indah Purwanti, Otniel Yustitia Kristian, Arya Hendro Yudo, Retno Dwi Larasati, Muhammad Miftah Farid, Dwiki Krishna Saputra, Ratih Putri Pertiwi, Shanti Dewi Siawanta, Aulia Riskafina Kusuma

**Quality Assurance:** Ellya Sulistiyani

21x21 cm - xiv,152 pages

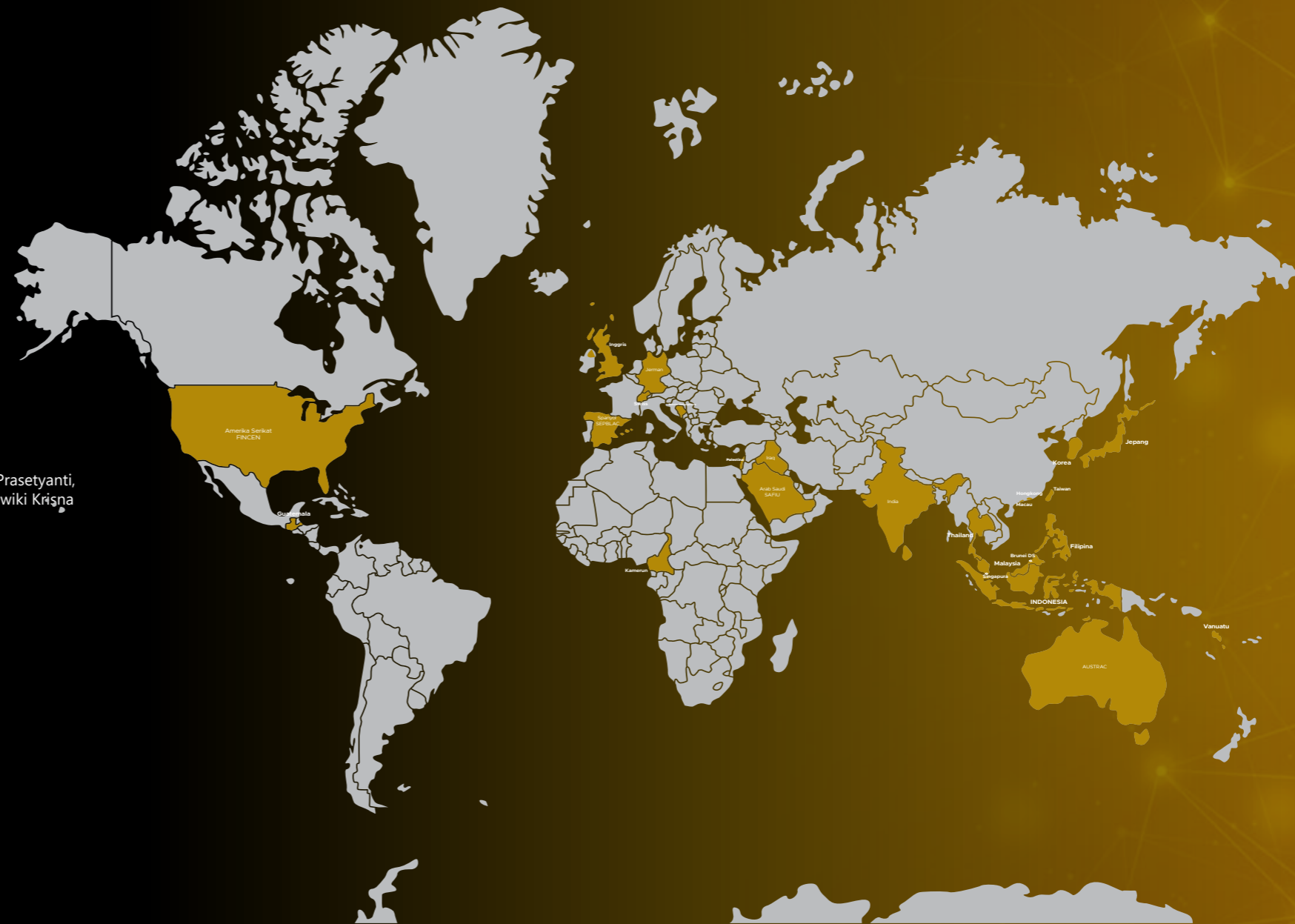
ISSN : 2623-2766

SK Nomor 0005.26232766/JI.3.1/SK.ISSN/2018.09

Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat

[www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id)



## Visi

Mewujudkan stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan Indonesia melalui **pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang** guna mewujudkan Indonesia maju yang **berdaulat**, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

## Misi

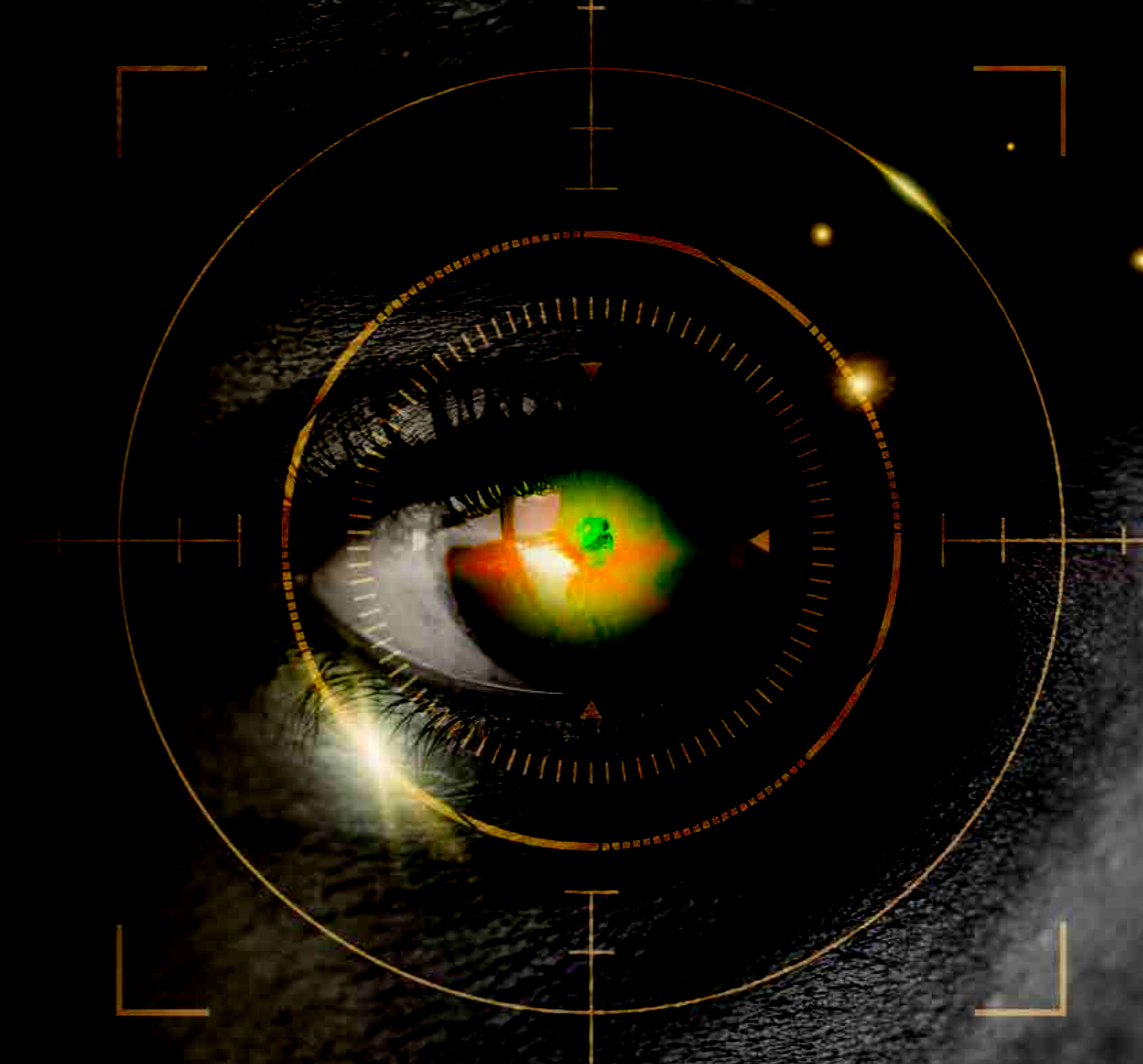
01. Meningkatkan **kemanfaatan hasil analisis, hasil pemeriksaan, hasil riset, dan rekomendasi kebijakan** dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme
02. **Meningkatkan peran serta dan sinergi pemangku kepentingan secara optimal** di lingkup nasional maupun internasional
03. Meningkatkan **keandalan sistem informasi**
04. Meningkatkan **kapabilitas sumber daya** anti pencucian uang serta tata kelola kelembagaan PPAK

## Vision

Achieving economic stability and maintaining the integrity of Indonesia's financial system through the **prevention and eradication of money laundering, in order to establish a prosperous, sovereign,** and independent Indonesia based on mutual cooperation.

## Mission

01. Increasing **the value of analysis reports, examination reports, research, and policy recommendations** related to money laundering and terrorism financing crimes
02. **Optimizing the participation and role of stakeholders** at both the national and international levels
03. Improving **the reliability of the information system**
04. Improving **the capabilities of human resources** and institutional governance



## Tugas

01. Mencegah dan Memberantas **Tindak Pidana Pencucian Uang**
02. Mencegah dan Memberantas **Tindak Pidana Pendanaan Terorisme**

## Fungsi

01. Pencegahan dan Pemberantasan **Tindak Pidana Pencucian Uang**
02. **Pengelolaan Data dan Informasi** yang diperoleh PPAK
03. Pengawasan terhadap **Kepatuhan Pihak Pelapor**
04. **Analisis atau Pemeriksaan** laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lainnya
05. Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan **tindak pidana pendanaan terorisme**.

## Roles

01. To prevent and eradicate **money laundering**
02. To prevent and eradicate **terrorism financing**

## Functions

01. Prevention and Eradication of **Money Laundering**
02. Management of **Data and Information**
03. Compliance Supervision of **Reporting Parties**
04. **Analysis or Examination** of Suspicious Transaction Reports Indicating Money Laundering and/or Other Criminal Offences
05. Organizing Duties and Functions Relating to the Prevention and Eradication of **Terrorism Financing**

# Core Value of Civil Servant

# BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Service Oriented, Accountable, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative

## Berorientasi Pelayanan

Service Oriented

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
- Melakukan perbaikan tiada henti.
- Understand and fulfill the needs of the community;
- Friendly, dexterous, solutive and reliable;
- Continuous improvement.

## Harmonis

Harmonious

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- Suka menolong orang lain;
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- Respects everyone regardless of their background;
- Love to help others;
- Building a conducive work environment.

## Adaptif

Adaptive

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
- Bertindak proaktif.
- Adaptive to change
- Innovative and Creative
- Proactive

## Akuntabel

Accountable

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- Performing duties honestly, responsibly, carefully, with discipline and integrity;
- Utilising state assets and properties responsibly, effectively and efficiently;
- Avoiding abuse of authority.

## Kompeten

Competent

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- Membantu orang lain belajar;
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- Improving personal competence to meet ever-changing challenges;
- Assisting others to learn;
- Performing tasks with the best quality.

## Loyal

Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
- Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
- Menjaga rahasia jabatan dan negara.
- Upholding the ideology of Pancasila, the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, to be loyal to the State of the Republic of Indonesia and the legitimate government;
- Preserving the reputation of civil servant, leaders, agencies, and the state;
- Guarding office and state secrets

## Kolaboratif

Collaborative

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.
- Provide opportunities for various parties to contribute;
- Open to working together to generate added value;
- Utilizing various resources for a common goal.





# STRUKTUR ORGANISASI

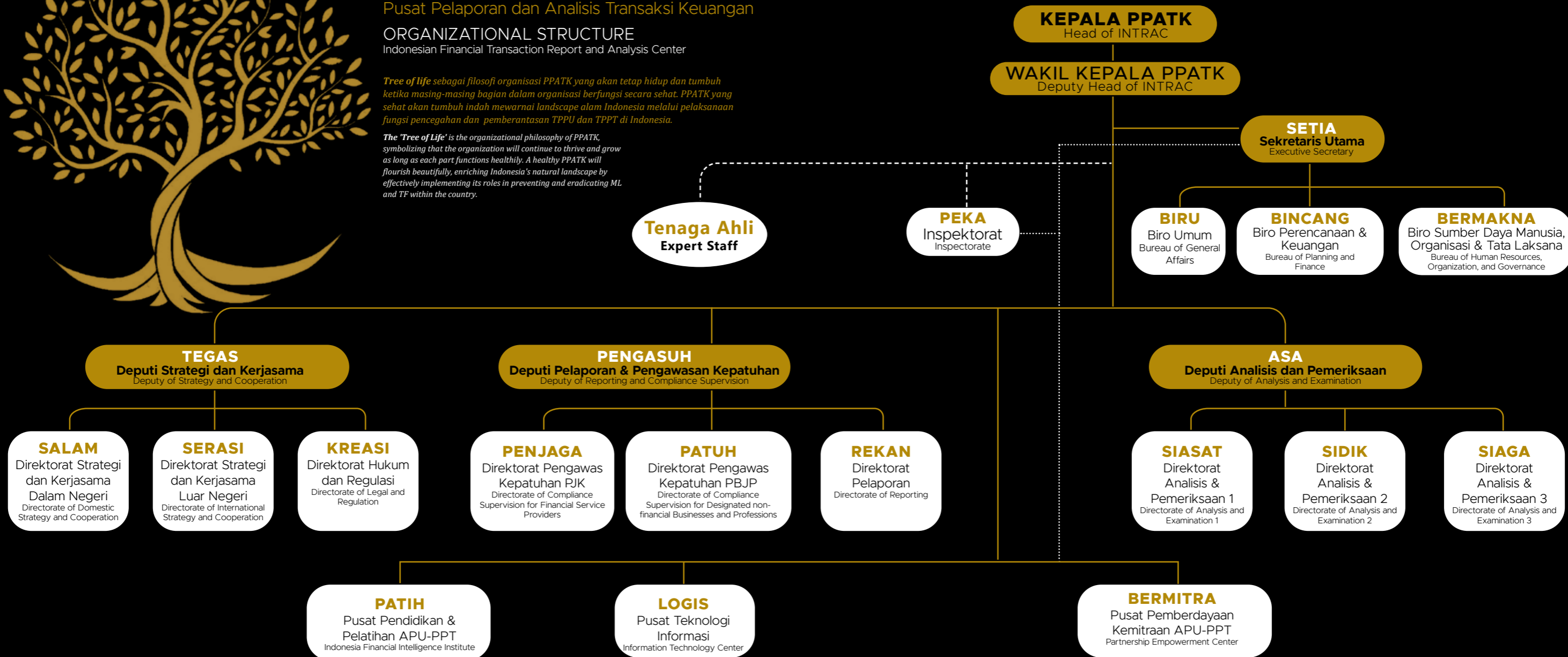
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

## ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Indonesian Financial Transaction Report and Analysis Center

*Tree of life sebagai filosofi organisasi PPAATK yang akan tetap hidup dan tumbuh ketika masing-masing bagian dalam organisasi berfungsi secara sehat. PPAATK yang sehat akan tumbuh indah mewarnai landscape alam Indonesia melalui pelaksanaan fungsi pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia.*

*The 'Tree of Life' is the organizational philosophy of PPAATK, symbolizing that the organization will continue to thrive and grow as long as each part functions healthily. A healthy PPAATK will flourish beautifully, enriching Indonesia's natural landscape by effectively implementing its roles in preventing and eradicating ML and TF within the country.*



## KATA PIMPINAN FOREWORD

**MENILIK** perjalanan PPATK selama 22 tahun, seperti membuka ingatan yang di dalamnya terekam sarat perjuangan. Tak mengenal kata lelah. Bahkan jika bosan menyerang, segera disingkirkan dengan penuh kesadaran.

Ya, memang memberantas praktik kejahatan pencucian uang perlu kekuatan daya juang. Salah satu alasan, karena kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) dan tergolong kejahatan transnasional yang melintasi batas-batas negara. Untuk melacak hasil kejahatan, tindak pidana dan pelakunya adalah dengan menggunakan pendekatan *follow the money* (ikuti aliran uang). Praktik kejahatan ini menggunakan uang yang banyak, bahkan diacak hingga lintas negara. Hal inilah yang menjadi sulit dalam pengungkapan indikasinya. Kemudian, dampak tindak pidana pencucian uang juga dapat merugikan keuangan negara dan berdampak buruk terhadap perekonomian nasional, termasuk aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat. Sehingga, praktik tindak pidana pencucian uang harus dicegah dan diberantas dengan cara yang luar biasa.

Sejak pertama kali berdiri, PPATK bekerja keras dengan penuh kesadaran mengemban tugas yang berat. Pun hingga hari ini, kami terus semangat melakukan upaya pemberantasan pencucian uang dengan melakukan berbagai terobosan. Di semester I Tahun 2024, kami telah melakukan berbagai analisis dan pemeriksaan, khususnya dalam isu Judi Online. Judi Online kian hari kian meresahkan.

**REFLECTING** on PPATK's 22-year journey is akin to unlocking a treasure trove of memories where tireless efforts are vividly recorded. The fight against money laundering has been relentless, and any momentary lapses in vigilance are swiftly addressed with full awareness.

Indeed, the eradication of money laundering practices demands an exceptional level of perseverance. Money laundering is classified as an Extraordinary Crime and a transnational issue, making it a formidable adversary. To track illicit gains, criminal activities, and their perpetrators, the "follow the money" approach is essential. This crime involves vast sums of money, often concealed across international borders, making detection and prosecution challenging. Furthermore, the repercussions of money laundering are severe, potentially harming national finances and destabilizing the economy, thereby affecting numerous aspects of society. Therefore, the prevention and eradication of money laundering require extraordinary measures.

From its inception, PPATK has undertaken its monumental task with unwavering commitment. Today, our resolve to combat money laundering remains strong, and we continue to innovate and advance our methods. In the first half of 2024, we focused extensively on the issue of online gambling, which has become increasingly problematic. The involvement of individuals from various demographics has prompted PPATK to investigate the alleged money laundering activities stemming from gambling crimes.

Banyak masyarakat yang terlibat, tidak memandang umur ataupun jabatan. Oleh karena itu, PPATK melakukan analisis terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perjudian. Total terdapat 10 Laporan Hasil Analisis dengan total akumulasi perputaran dana sebesar Rp13,2 triliun. Hasil identifikasi PPATK, terdapat rekening-rekening penampungan yang digunakan untuk deposit dan *withdrawal* perjudian online serta terdapat rekening yang diduga untuk *layering* pencucian uang perjudian online.

Selain judi online, PPATK juga menganalisis dan memeriksa dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba. Dari hasil analisis dan hasil pemeriksaan, terdapat 41 laporan. Demi menyatukan misi dalam menjaga kualitas pelaporan, PPATK bersinergi bersama lembaga pengawas dan pengatur, serta *stakeholder* lainnya dalam rezim APUPPT. Berbagai kegiatan dilakukan selama periode Januari s.d. Juni 2024, antara lain: Rapat Koordinasi Tahunan PPATK Tahun 2024, Koordinasi Pelaksanaan Pilkada 2024 dan Rembuk Nasional, Evaluasi Kualitas Data Pelaporan yang Disampaikan oleh Pihak Pelapor, Pembinaan Pihak Pelapor Dalam Rangka Tindak Lanjut Rekomendasi FIR on ML/TF Tahun 2023, dan Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Registrasi Pihak Pelapor pada Aplikasi GoAML

PPATK juga melakukan terobosan dalam penegakan indikasi TPPU dengan pemanfaatan teknologi informasi, yaitu pengintegrasian data dari berbagai sumber serta pemeliharaan sistem yang andal memungkinkan proses penegakan hukum lebih efisien dan akurat. Di awal tahun ini, PPATK berhasil meraih Sertifikasi SNI ISO/IEC 27001:2022. Sebuah pencapaian penting dalam tata kelola teknologi informasi (TI) dan pengelolaan risiko keamanan informasi.

Our efforts yielded 10 analysis reports, revealing a total accumulated fund turnover of IDR 13.2 trillion. We identified escrow accounts used for online gambling transactions and accounts suspected of layering money laundering activities.

Beyond online gambling, PPATK also analyzed and investigated money laundering allegations linked to narcotics crimes, resulting in 41 intelligence reports. To maintain the quality of our reporting, PPATK collaborates with supervisory and regulatory bodies, as well as other stakeholders within the APUPPT regime. Between January and June 2024, we organized various activities, including the PPATK Annual Coordination Meeting, coordination for the 2024 Election, a National Coordination Meeting, evaluations of reporting quality, coaching sessions for reporting parties in response to FIR recommendations on ML/TF, and the verification and reconciliation of reporting party data on the GoAML application.

In a significant technological advancement, PPATK has leveraged information technology to enforce ML/TF indications. By integrating data from diverse sources and maintaining a robust system, we have enhanced the efficiency and accuracy of our law enforcement processes. Earlier this year, PPATK achieved SNI ISO/IEC 27001:2022 Certification, marking a milestone in IT governance and



Pencapaian ini mencerminkan komitmen PPATK dalam menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mengadopsi penuh Standar International Organization for Standardization (ISO).

PPATK juga mendapatkan apresiasi dan prestasi dari berbagai *stakeholder*. PPATK sebagai lembaga terbaik kedua dalam Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024. PPATK meraih nilai 4,24 dengan predikat memuaskan untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Lembaga Non Struktural (LNS), dan instansi lainnya.

Lalu, PPATK mendapat penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai Instansi Pemerintah Terbaik II kepada PPATK untuk kategori Lembaga Tinggi Negara/Lembaga Nonstruktural (LNS)/Lembaga Penyiaran Publik (LPP) tahun 2023 dan 2024. PPATK mendapat penghargaan dari Badan Narkotik Nasional (BNN) sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi PPATK dalam mendukung Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

PPATK semakin aktif di kancah dunia setelah menjadi anggota penuh *Financial Action Task Force* (FATF). PPATK telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam lingkup bilateral, regional, hingga multilateral guna makin mengoptimalkan eksposur internasional PPATK. Seiring keaktifannya di dalam negeri, kerja sama di lingkup domestik tetap dibangun. Berbagai aktivitas kerjasama dalam negeri telah dilaksanakan untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam berbagai sektor. Fokus utama adalah pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) pada

information security risk management. This certification underscores our commitment to implementing an Information Security Management System in line with both Indonesian National Standards (SNI) and International Organization for Standardization (ISO) standards.

PPATK's efforts have garnered recognition and accolades from various stakeholders. We were honored as the second-best institution in the Electronic-Based Government System Index (SPBE) in 2024, with a score of 4.24. Additionally, PPATK received awards from the National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI) as the second-best government agency in the category of State Higher Institutions/Nonstructural Institutions/Public Broadcasting Institutions for both 2023 and 2024. Furthermore, we were commended by the National Narcotics Agency (BNN) for our contributions to the prevention and eradication of narcotics abuse and illicit trafficking.

On the international stage, PPATK has increased its presence since becoming a full member of the Financial Action Task Force (FATF). We have engaged in various bilateral, regional, and multilateral activities to enhance

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Teknologi Finansial.

Adapun terkait pencegahan dalam praktik TPPU, PPATK aktif menyebar pengetahuan anti-pencucian uang ke berbagai elemen masyarakat. Selain itu, PPATK menerima audiensi dan aduan dari masyarakat terkait praktik pencucian uang yang semakin masif. Tak lupa, semakin gencarnya perlawanan terhadap praktik pencucian uang, PPATK terus membenahi diri dengan penguatan manajemen internalnya. Sebab, operasional yang efektif dari PPATK sangat bergantung pada kekuatan fungsi manajemen internalnya, terutama dalam bidang sumber daya manusia, keuangan, umum, hubungan masyarakat, pusat pelatihan, inspektorat, dan kemitraan.

Akhir kata, mengutip peribahasa latin: *Nil volentibus arduum*. Artinya, tidak ada yang sulit bagi mereka yang mau. Kejahatan pencucian uang yang terasa sulit untuk ditangani, namun tekad kami besar dan bulat untuk memerangi. Sehingga, dirasa mudah jika dilakukan dengan kerendahan hati dan kemauan diri. Bersama, mari kita lawan pencucian uang dengan gagah berani!

Salam.

our international profile. Domestically, we continue to build cooperation to strengthen synergies across various sectors, focusing on law enforcement and crime prevention, particularly related to human trafficking and financial technology.

To prevent money laundering, PPATK actively disseminates anti-money laundering knowledge to various societal segments. We also receive public reports and complaints about the pervasive nature of money laundering practices. As our fight intensifies, PPATK remains dedicated to self-improvement, particularly in strengthening internal management functions, which are crucial for our effective operation. This includes human resources, finance, general administration, public relations, training centers, inspectorates, and partnerships.

Finally, to echo a Latin proverb: *\*Nil volentibus arduum.\** Nothing is difficult for those who want it. While combating money laundering may seem daunting, our collective determination is unwavering. With humility and resolve, we can make this task feel manageable. Together, let us valiantly combat money laundering!

Best regards.

Jakarta, 26 Juli 2024 | Jakarta, 26 July 2024

**Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan**  
Head of Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center



**IVAN YUSTIAVANDANA**



# DAFTAR ISI

## TABLE OF CONTENTS

<b>Visi, Misi, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Nilai Dasar PPATK</b>   Vision, Mission, Duties, Functions, Authorities and Basic Values of INTRAC.....	iv	<b>Analisis &amp; Diseminasi - Analysis &amp; Dissemination</b> .....	50	Konvensi Internasional .....	80	Refleksi Akhir Tahun PPATK Tahun 2023 .....	122
<b>Struktur Organisasi</b> .....	x	Tegakkan Indikasi, Dari Hasil Analisis.....	52	Berantas Lintas Negara.....	82	Jaga Sentimen Publik .....	124
<b>Kata Pimpinan</b> .....	xii	Kontribusi Terhadap Penerimaan Negara .....	55	Partisipasi Kegiatan Forum Internasional .....	84	Cegah Pencucian Uang melalui Literasi .....	126
<b>Daftar Isi</b> .....	xvi	Pemanfaatan Produk Intelijen Keuangan		Urgensi Pertukaran Data Antar FIU .....	88	Wajah Baru Perpustakaan .....	127
<b>Strategi Nasional</b> .....	2	PPATK .....	56	<b>Hukum &amp; Regulasi - Law &amp; Regulations</b> .....	90	Agar Pengetahuan Tak Lekang oleh Waktu .....	129
<b>Rencana Strategis</b> .....	3	Judi Online .....	57	Penguatan Regulasi TPPU .....	92	Wadah Peneliti Bahas <i>Money Laundering</i> .....	130
<b>Korelasi RPJMN dan RENSTRA PPATK</b> .....	4	Narkotika .....	58	Peran Saksi Ahli .....	94	Edukasi Anti Pencucian Uang .....	131
<b>Core Business Process</b> .....	6	Peran PPATK dalam Menjaga Pemilu Bersih 2024 .....	60	Untuk Regulasi Lebih Baik .....	96	Statistik Kegiatan Edukasi Publik .....	132
<b>Laporan Khusus - Special Report</b> .....	8	Penghentian Sementara Transaksi		<b>Teknologi Informasi - Infomation Technology</b> .....	100	Kolaborasi Pentahelix .....	133
Humble Beginnings: Dua Dekade Semakin Matang Berantas Pencucian Uang .....	8	Terkait Tindak Pidana .....	62	Mengidentifikasi Indikasi Melalui Teknologi.....	102	Statistik Jumlah Kolaborasi Kegiatan Edukasi Publik .....	134
Milestone PPATK .....	14	Statistik Produk Intelijen.....	63	Hasil SPBE .....	104	Statistik Layanan Bantuan.....	135
Pimpinan PPATK dari Masa ke Masa.....	18	<b>Strategi &amp; Kerjasama - Strategy &amp; Collaborations</b> .....	64	Hasil TKTI .....	105	Statistik Pengaduan Masyarakat .....	136
President Highlight.....	19	Agar Tali Kerjasama Semakin Kuat.....	66	<b>Manajemen Internal - Internal Management</b> .....	106	Sejarah Pusdiklat.....	137
<b>Pelaporan - Reporting</b> .....	20	Program Mentoring Berbasis Risiko (Promensisko).....	67	Menguatkan PPATK Dari Dalam: Peran Penting Manajemen Internal.....	108	Membangun Keahlian, Melawan Kejahatan.....	138
Perkuat Rezim APUPPT dengan Kolaborasi .....	22	Kegiatan Komite TPPU .....	68	Pengembangan Pegawai .....	109	Statistik Pelatihan Sejak 2019-2023.....	139
Bersinergi Satukan Misi.....	24	Penyusunan Penilaian Risiko Sektoral (SRA) .....	70	Komposisi Pegawai PPATK .....	110	<b>Penghargaan - Awards</b> .....	140
Statistik Laporan .....	34	Pelaksanaan Identifikasi NPO .....	70	Pertajam Program Reformasi Birokrasi .....	112	Tingkatkan Tata Kelola TI, PPATK Raih Sertifikasi SNI ISO/IEC 27001: 2022 STATISTICS.....	142
Statistik Penilaian Integritas Keuangan.....	35	Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri (MoU) .....	72	Nilai Reformasi Birokrasi PPATK 2019-2023 .....	113	PPATK Raih Penghargaan Sebagai Lembaga Terbaik Kedua Dalam Indeks SPBE 2024 .....	143
Statistik Registrasi Pihak Pelapor pada GoAML ...	36	Pemantauan Tindak Lanjut Produk Intelijen PPATK .....	74	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PPATK 2019-2023 .....	114	PPATK Terima Penghargaan di Hari Anti Narkotika Internasional 2024 .....	144
<b>Pengawasan Kepatuhan - Compliance Supervision</b> .....	38	Koordinasi dan Asistensi .....	75	Statistik Anggaran dan Penyerapan 2019-2023 ...	115	PPATK Raih Penghargaan Kearsipan, Bukti Komitmen Terhadap Transparansi Publik.....	146
Peran Pengawasan dalam Penegakan TPPU: Mendisiplinkan Kewajiban Pelaporan.....	40	Koordinasi dan Pelaksanaan Upaya Disrupsi Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.....	76	Anggaran dan Penyerapan.....	116	<b>Glosarium - Glossary</b> .....	148
Aktivitas Pengawasan Kepatuhan Pelaporan: Agar Pihak Pelapor Patuh .....	42	<i>Public Private Partnership</i> (PPP).....	78	Agar Kerja Selalu <i>On The Track</i> .....	117		
Statistik Aktivitas Pengawasan Kepatuhan 2019-2023 .....	49	Koordinasi Implementasi dan Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Indonesia atas Standar dan		Capaian Realisasi Pengawasan Internal 2019-2023 .....	118		
				Nilai Rata-Rata Audit Kearsipan Eksternal 2019-2023 .....	119		
				Bijak Kelola Barang Milik Negara.....	120		
				Penatausahaan Aset.....	121		



# STRATEGI NASIONAL

## PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TPPU-TPPT TAHUN 2020-2024

NATIONAL STRATEGY, PREVENTION AND ERADICATION OF ML-TF IN 2020-2024

### STRATEGI 01

Meningkatkan kemampuan sektor privat untuk mendeteksi indikasi atau potensi TPPU, TPPT, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan memperhatikan penilaian risiko

Enhance the private sector's capability to detect indications or potential instances of money laundering, terrorism financing, and proliferation financing of weapons of mass destruction based on robust risk assessment measures

### STRATEGI 02

Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko

Intensify endeavours aimed at preventing money laundering and terrorism financing based on robust risk assessment measures

### STRATEGI 03

Meningkatkan upaya pemberantasan terjadinya TPPU dan TPPT dengan memperhatikan penilaian risiko

Intensify endeavours aimed at eradicating money laundering and terrorism financing based on robust risk assessment measures

### STRATEGI 04

Mengoptimalkan *asset recovery* dengan memperhatikan penilaian risiko

Optimizing asset recovery based on robust risk assessment measures

### STRATEGI 05

Meningkatkan efektivitas *targeted financial sanction* dalam rangka mendisrupsi aktivitas terorisme, teroris, organisasi teroris, dan aktivitas pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal

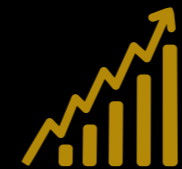
Increase the effectiveness of targeted financial sanctions in order to disrupt the activities of terrorism, terrorists, terrorist organizations, and funding for the proliferation of weapons of mass destruction

# RENCANA STRATEGIS

## STRATEGIC PLAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TAHUN 2020-2024

INDONESIAN FINANCIAL TRANSACTION REPORTS AND ANALYSIS CENTER YEAR 2020-2024



### TUJUAN PURPOSE

### SASARAN STRATEGIS STRATEGIC GOAL

### INDIKATOR KINERJA UTAMA KEY PERFORMANCE INDICATORS

### TARGET TARGET

Memperkuat rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia

Terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia

Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia

2020 : 5.46  
2021 : 5.73  
2022 : 6.89  
2023 : 7.23  
**2024 : 7.60**

Strengthening Indonesia's anti-money laundering and terrorism financing prevention regime

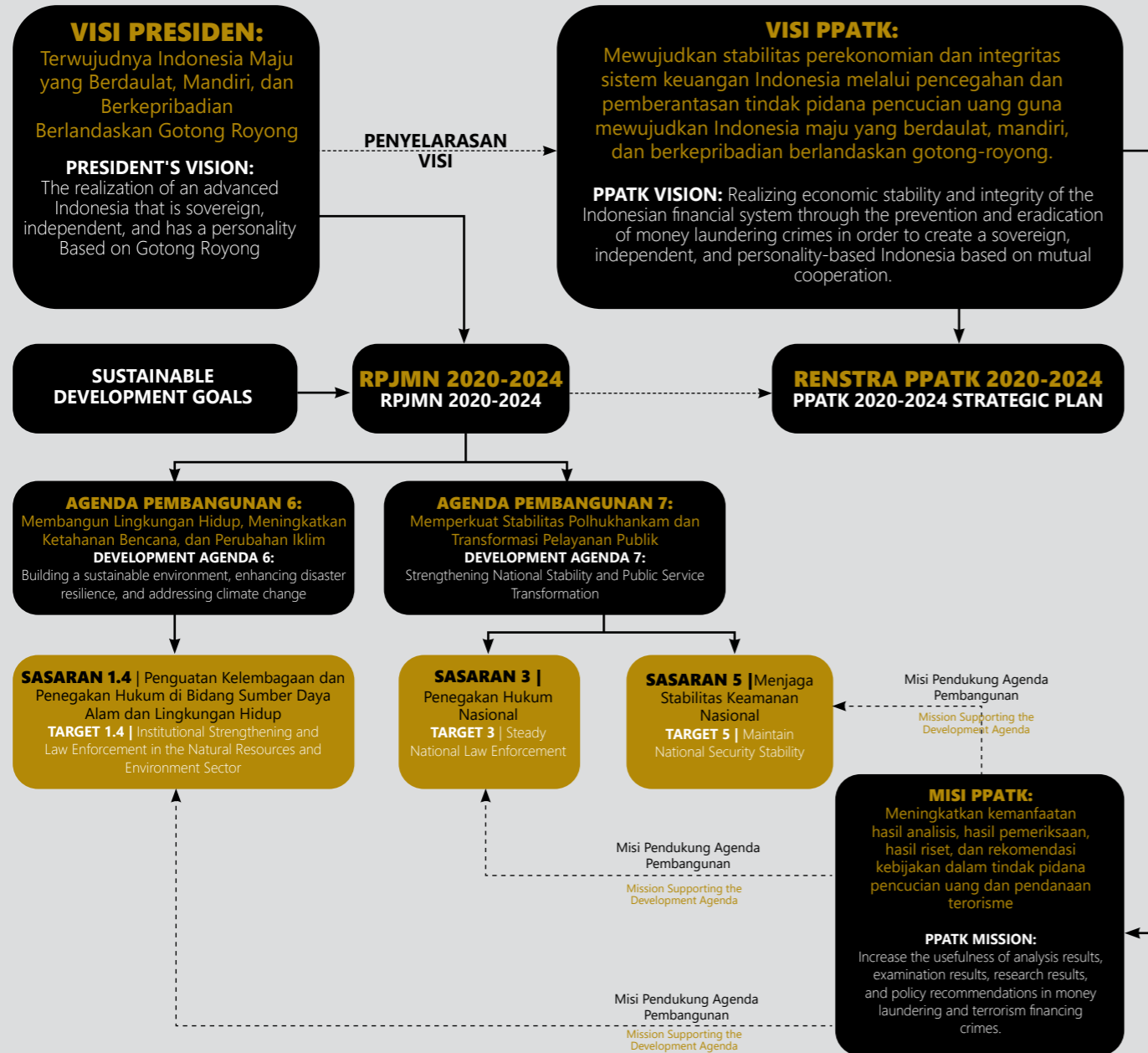
Effective prevention and eradication of money laundering and terrorism financing in Indonesia

Effectiveness index of prevention and eradication money laundering and terrorism financing



# KORELASI RPJMN DAN RENSTRA PPAK

CORRELATION BETWEEN NATIONAL PLAN AND PPAK'S STRATEGIC PLAN



## 7 National Priorities of The 2024 Government Work Plan

# 7 PRIORITAS NASIONAL RENCANA KERJA PEMERINTAH 2024

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 bertema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN):  
The 2024 Government Work Plan (RKP) themed "Accelerating Inclusive and Sustainable Economic Transformation" is elaborated in 7 National Priorities (PN).

PN 1	PN 2	PN 3	PN 4	PN 5	PN 6	PN 7
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan <i>Strengthening economic resilience for equitable quality growth.</i>	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan <i>Develop the region to reduce disparities and ensure equity.</i>	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing <i>Improving the quality and competitiveness of human resources.</i>	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan <i>Mental revolution and cultural development.</i>	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar <i>Strengthening infrastructure to support economic development and basic services.</i>	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim <i>Building a sustainable environment, enhancing disaster resilience, and addressing climate change.</i>	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik <i>Strengthening national stability and transforming public services.</i>

Kementerian PPN/Bappenas menyusun RKP 2024 untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan pencapaian target akhir RPJMN 2020-2024 sekaligus menciptakan landasan pokok untuk estafet perencanaan pembangunan.  
Bappenas developed RKP 2024 to accelerate inclusive and sustainable economic transformation, in line with the achievement of the final targets of RPJMN 2020-2024 while creating a basic foundation for the development planning relay.

Source: Bappenas RI



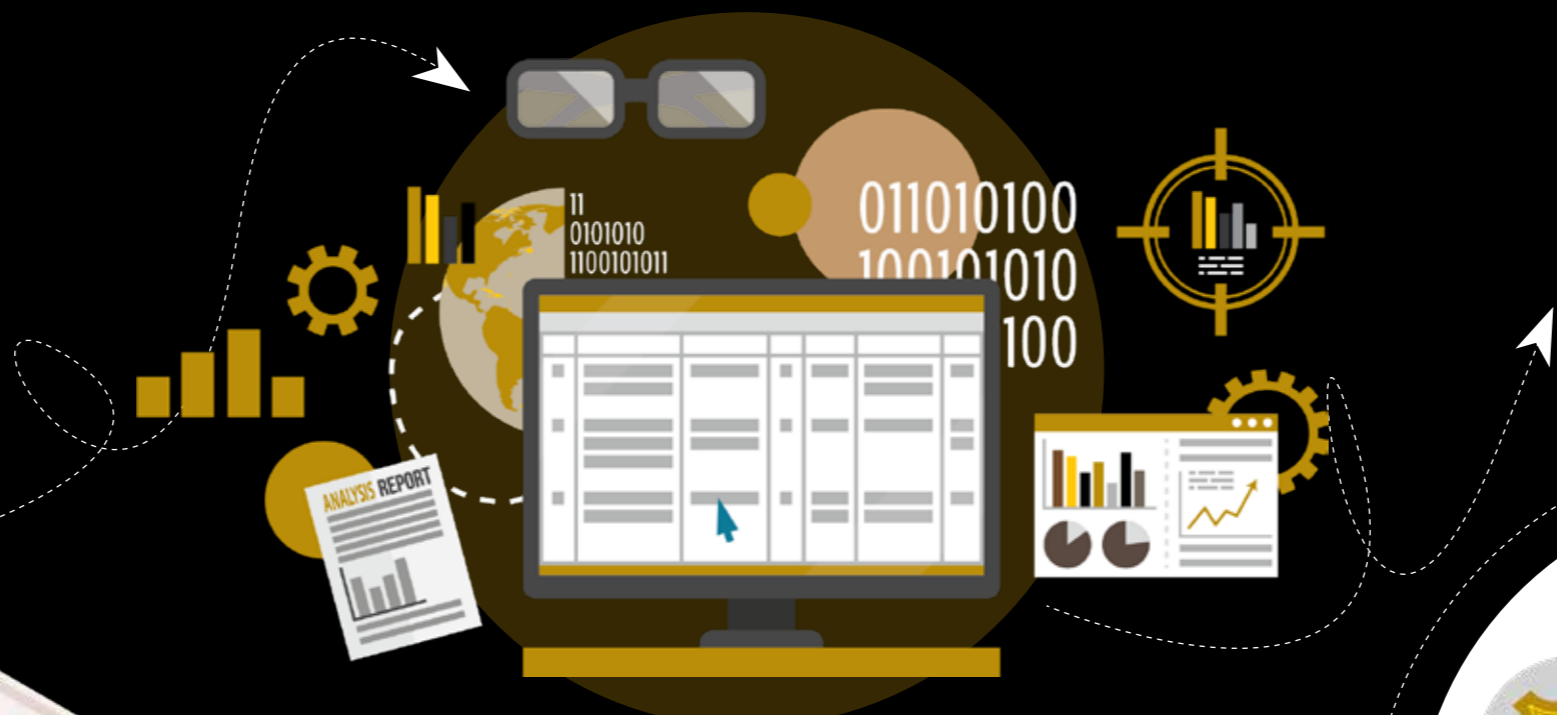
# CORE BUSINESS PROCESS

## PROSES BISNIS UTAMA

### 01 PELAPORAN Reporting

Proses pelaporan merupakan pengumpulan informasi keuangan dan laporan dari berbagai pihak pelapor seperti Penyedia Jasa Keuangan, Penyedia Barang dan Jasa dan entitas lainnya. Proses ini sangat penting bagi fungsi PPATK karena menyediakan data awal yang diperlukan untuk proses analisis.

The reporting process involves the collection of financial information and reports from various reporting entities such as Financial Service Providers, Designated non-financial Businesses and Professions. This process is crucial for the function of the Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK) as it provides the initial data required for the analysis process.



### 02 ANALISIS

Proses menganalisa informasi dan transaksi keuangan untuk mendeteksi pola indikasi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lainnya.

### Analysis

The process of analyzing financial information and transactions to detect patterns indicative of money laundering, terrorism financing, and other financial crimes.

### 03 DISEMINASI Dissemination

Proses mengkomunikasikan hasil analisis atau hasil pemeriksaan yang berisi aktivitas keuangan yang mencurigakan kepada pihak-pihak yang berwenang seperti aparat penegak hukum ataupun Kementerian/Lembaga terkait

The process of communicating analysis results or examination findings containing suspicious financial activities to relevant authorities such as law enforcement agencies or Government Institutions.



## HUMBLE BEGINNINGS

# DUA DEKADE: SEMAKIN MATANG, BERANTAS PENCUCIAN UANG

## TWO DECADES: ADVANCING MATURITY IN COMBATING MONEY LAUNDERING

IBARAT sebuah umur, dua puluh dua tahun adalah usia manusia menginjak remaja akhir atau dewasa awal. Usia yang penuh tantangan dan dihadapkan dengan banyak pertanyaan: apa saja yang sudah dicapai selama ini? Apakah sudah banyak menghasilkan manfaat atau justru sebaliknya?

Sebelum PPAK lahir, Indonesia bergabung dengan organisasi kelompok *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG). APG merupakan organisasi antar pemerintah yang terdiri dari 42 yurisdiksi anggota yang mengurus terkait pencucian uang. Tujuan APG untuk memastikan bahwa masing-masing anggota secara efektif menerapkan standar internasional melawan pencucian uang, pendanaan teroris, dan pendanaan proliferasi yang terkait dengan senjata pemusnah massal (APUPPT).

Namun, saat itu Indonesia masuk ke dalam daftar hitam oleh *Financial Action Task Force* (FATF). Daftar hitam tersebut merupakan daftar negara yang tidak kooperatif dalam penanganan kejahatan pencucian uang. Hal ini sangat merugikan posisi Indonesia di mata dunia. Berdampak pada kredibilitas perekonomian, hingga penegakan hukum terkait kejahatan pencucian uang yang praktiknya hingga lintas negara. Oleh karena itu, Indonesia berupaya keluar dari daftar hitam tersebut. Salah satunya, dengan mendirikan lembaga khusus seperti *Financial Intelligence Unit* (FIU) yang sudah ada di negara-negara lain.

Untuk mewujudkan itu, disahkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002. Dalam undang-undang tersebut,

At the age of twenty-two, a person enters late adolescence or early adulthood, a phase laden with challenges and profound questions: what milestones have been accomplished? Have they yielded significant gains or the contrary?

Prior to the establishment of PPAK, Indonesia became a member of the Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), an intergovernmental organization comprising 42 jurisdictions focused on combating money laundering. The APG's mission is to ensure robust implementation of international standards to combat money laundering, terrorist financing, and the financing of weapons of mass destruction proliferation.

However, during that period, Indonesia found itself on the blacklist of the Financial Action Task Force (FATF). This list identifies countries perceived as uncooperative in combating money laundering crimes, severely damaging Indonesia's global standing and credibility in economic and law enforcement arenas. Consequently, Indonesia embarked on efforts to be delisted, one pivotal approach being the establishment of a specialized institution known as the Financial Intelligence Unit (FIU).

To achieve this goal, Law No. 15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering was enacted on April 17, 2002. This legislation specifically mandated the creation of PPAK as the focal point for anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) initiatives in Indonesia.

At its inception, PPAK faced considerable challenges but was spurred into action with the singular objective

secara tegas mengamanatkan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *focal point* gerakan APUPPT Indonesia.

PPATK yang baru usia merangkak kala itu didorong untuk berlari. Semata-mata agar Indonesia keluar dari daftar hitam tersebut dengan persyaratan harus memenuhi 40 rekomendasi FATF. Rekomendasi tersebut dibagi menjadi tujuh bidang berbeda, yaitu; Kebijakan dan koordinasi APUPPT; Pencucian uang dan penyitaan; Pendanaan teroris dan pendanaan proliferasi; Tindakan pencegahan; Transparansi dan kepemilikan manfaat dari badan hukum dan pengaturannya; Wewenang dan tanggung jawab otoritas yang berwenang dan tindakan kelembagaan lainnya dan Kerjasama internasional.

Untuk menunjang efektifnya pelaksanaan rezim anti pencucian uang di Indonesia, Pemerintah lalu membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Tugas Komite ini mengkoordinasikan penanganan, pencegahan dan pemberantasan TPPU. Anggota Komite TPPU terdiri dari Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Komite ini bertugas antara lain merumuskan arah kebijakan penanganan tindak pidana pencucian uang dan mengkoordinasikan upaya penanganan pencegahan dan pemberantasannya.

Februari 2005, Indonesia berhasil keluar dari daftar hitam *Non Cooperative Countries and Territories* oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Indonesia menghadiri berbagai forum internasional dan Kepala PPAK Yunus Husein saat itu secara aklamasi menjabat sebagai *Co-Chair* APG periode 2006-2008 bersama-sama dengan Mr Mick Keelty, Kepala Kepolisian Federal Australia (*Australian Federal Police*/AFP). Terpilihnya Yunus Husein tersebut ditetapkan dalam rapat pleno, 9<sup>th</sup> *Annual Meeting of the Asia/Pacific Group* (APG) on Money

of securing Indonesia's removal from the blacklist, contingent upon meeting 40 FATF recommendations. These recommendations spanned seven key areas: AML/CFT policy and coordination; money laundering and confiscation; terrorist financing and proliferation financing; preventive measures; transparency and beneficial ownership of legal entities and their regulation; powers and responsibilities of competent authorities and other institutional measures; and international cooperation.

To bolster the effective implementation of Indonesia's anti-money laundering efforts, the government established the National Coordinating Committee for the Prevention and Eradication of Money Laundering. This committee's mandate includes coordinating the prevention and eradication of money laundering through policy formulation. Its members comprise key figures such as the Ministers of Foreign Affairs, Law and Human Rights, and Finance, alongside the Chief of Police, Attorney General, heads of intelligence and regulatory bodies like Bank Indonesia, the National Counterterrorism Agency, and the National Narcotics Agency (BNN).

In February 2005, Indonesia achieved a significant milestone by being removed from the Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)'s blacklist of Non-Cooperative Countries and Territories.

Furthermore, Indonesia actively engaged in international forums, culminating in the appointment of Yunus Husein, then head of PPAK, as Co-Chair of the Asia/Pacific Group (APG) for the 2006-2008 term. This appointment, alongside Mr. Mick Keelty of the Australian Federal Police, underscored Indonesia's leadership in regional anti-money laundering initiatives. Yunus Husein's election took place during the 9<sup>th</sup> Annual Meeting of the APG on Money Laundering held in Manila, Philippines, from July 3 to 7, 2006.



*Laundering* yang diselenggarakan di Manila, Philippina pada tanggal 3 sampai dengan 7 Juli 2006. Sidang APG tersebut dihadiri oleh lebih dari 250 orang peserta yang berasal dari 32 negara/yurisdiksi anggota APG.

Pada 25 Maret 2009, Komite TPPU menegaskan agar koordinasi yang dilakukan pada Komite mencakup pula perhatian dan kerjasama dalam menangani pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme. Komite menunjuk secara tegas PPATK sebagai *focal point* untuk menangani *counter-financing terrorism*. Keputusan ini senada dengan *best practices* internasional bahwa ruang lingkup kewenangan suatu *Financial Intelligence Unit* (FIU), dalam hal ini PPATK, termasuk *anti-money laundering* dan *counter-financing terrorism*.

Kemudian, FATF menetapkan rekomendasi kesembilan dalam rangka memerangi terorisme. Sembilan rekomendasi khusus FATF mencakup serangkaian tindakan, perlu dilakukan setiap yurisdiksi dalam mengimplementasikan secara efektif upaya melawan pendanaan teroris. Oleh karena itu, dilakukan penguatan di sektor legislasi dengan pengesahan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 22 Oktober 2010. Dengan disahkannya Undang-Undang ini, PPATK memiliki kewenangan, tugas dan fungsi yang lebih rinci untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang, pendanaan terorisme dan proliferasi senjata.

Ditambah lagi, pengesahan Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Upaya yang dilakukan ini selain demi kepentingan nasional juga merupakan bentuk kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dan keamanan dunia dengan memutus sumber pendanaan untuk kegiatan terorisme.

Alhasil, pada pertemuan pleno FATF bulan Februari 2015, Indonesia telah berhasil dikeluarkan dari *public statement/blacklist* (PS) FATF ke *grey list area*. Indonesia

On March 25, 2009, the TPPU Committee reinforced the importance of countering terrorism financing as a shared global concern. The committee explicitly designated PPATK as the focal point for handling terrorism financing in alignment with international best practices.

Subsequently, FATF established specific recommendations aimed at combating terrorism financing, outlining a series of actions each jurisdiction must undertake. To align with these measures, Indonesia strengthened its legislative framework by enacting Law No. 8/2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering on October 22, 2010. This law granted PPATK expanded authority, duties, and functions to effectively combat both money laundering and terrorism financing.

However, in 2012, Indonesia faced renewed challenges when FATF once again blacklisted the country as high-risk for terrorism financing, highlighting the absence of specific regulations addressing this issue.

In response, the government passed Law No. 9 of 2013 on the Prevention and Eradication of Criminal Acts of Terrorism Financing in 2013. This legislative step not only aimed to protect national interests but also underscored Indonesia's commitment to global peace and security by disrupting the funding sources for terrorist activities.

As a result of these efforts, Indonesia made significant strides. By the FATF plenary meeting in February 2015,

masuk dalam PS FATF sejak Februari 2012 karena dinilai memiliki kelemahan strategis dalam rezim pendanaan terorisme. Hal ini diikuti dengan Pertemuan International Cooperation Review Group (ICRG), 24-26 Juni di Brisbane Australia yang akhirnya memutuskan mengeluarkan Indonesia dari *grey list*.

Tak hanya berhenti di situ, setelah diterbitkan PP No. 4 Tahun 2015, Pihak Pelaporan bertambah dengan masuknya Pihak Pelapor Profesi. PPATK selaku *focal point* juga merumuskan *National Risk Assessment* (NRA) TPPU dan TPPT sebagai wujud komitmen Indonesia memenuhi rekomendasi FATF dalam menyusun strategi APUPPT melalui pendekatan risiko.

Saat tahun 2016, Indonesia yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan 2nd CTF Summit di Nusa Dua, Bali menghasilkan *Nusa Dua Statement*. Isinya menyangkut soal pengawasan aliran dana lintas negara yang terindikasi digunakan untuk mendanai terorisme. Satu dari poin kesepakatan itu adalah adanya pembatasan transaksi tunai untuk mencegah aliran dana untuk terorisme. PPATK kemudian membuat instrumen dalam bentuk peraturan pemerintah yang memberikan kewenangan kepada Bea Cukai untuk juga menggeledah uang yang dibawa oleh penumpang.

Di tahun yang sama, PPATK meluncurkan Indeks Persepsi Publik tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (IPP APUPPT). IPP APUPPT merupakan visualisasi dari apa yang telah PPATK lakukan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) dari sudut pandang masyarakat Indonesia. Kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan *self-evaluation* secara berkala terhadap capaian yang telah dihasilkan dalam penerapan rezim APUPPT, dan menjadi cambuk untuk bekerja semakin keras dalam melaksanakan tugas tersebut.

the country successfully transitioned from the FATF public statement/blacklist (PS) to the grey list. Subsequently, during the International Cooperation Review Group (ICRG) Meeting in Brisbane, Australia, held from June 24-26, 2015, Indonesia was removed from the grey list.

Furthermore, with the issuance of Government Regulation No. 4 of 2015, reporting obligations were expanded to include "Professional" as a new category. PPATK also developed the AML and CFT National Risk Assessment (NRA), demonstrating Indonesia's commitment to implementing risk-based strategies in accordance with FATF recommendations.

In 2016, Indonesia hosted the 2nd CTF Summit in Nusa Dua, Bali, and produced the Nusa Dua Statement. One significant agreement was the restriction of cash transactions to prevent the flow of funds for terrorism. Subsequently, PPATK developed a government regulation authorizing Customs to search for money carried by passenger.

In the same year, PPATK launched the Public Perception Index on Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention (IPP APUPPT). This index visualizes PPATK's efforts in preventing and eradicating money laundering (TPPU) and terrorism financing (TPPT) from the perspective of the Indonesian people. The initiative aims to conduct periodic self-evaluations of the achievements in implementing the APUPPT regime.



Masih di tahun yang sama, terdapat perluasan anggota Komite TPPU berdasarkan Perpres No. 117 Tahun 2016. Anggota komite baru yaitu OJK, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi dan UMKM juga turut dilibatkan. Hal ini berguna untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antarlembaga dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Tahun 2017, Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU) menetapkan Strategi Nasional Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme tahun 2017–2019 yang mencakup 7 strategi. Pertama, menurunkan tingkat tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana perpajakan melalui optimalisasi penegakan hukum TPPU. Kedua, mewujudkan mitigasi risiko yang efektif dalam mencegah terjadinya TPPU dan TPPT di Indonesia. Ketiga, optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan TPPT. Keempat, menguatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta. Kelima, meningkatkan pemanfaatan instrumen kerjasama internasional dalam rangka optimalisasi *asset recovery* yang berada di negara lain. Keenam, meningkatkan kedudukan dan posisi Indonesia di forum internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Ketujuh, penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan pembawaan uang tunai lintas batas negara sebagai media pendanaan terorisme.

Di tahun yang sama, proses keanggotaan Indonesia di FATF pun dimulai. Indonesia diberi status sebagai *observer* pada *Financial Action Task Force-Middle East and North Africa Financial Action Task Force* (FATF-MENAFATF) di Paris. Sejak itu, rangkaian tahapan penilaian teknis kepatuhan terhadap 40 rekomendasi dan 11 *Immediate Outcome* (IO) FATF dalam *Mutual Evaluation Review* (MER) dijalani hingga akhir tahun 2022. PPATK yang menjadi bagian dari delegasi Indonesia berupaya memenuhi penilaian MER tersebut.

Dua kali *plenary meeting* dilaksanakan di tahun 2023 namun status keanggotaan Indonesia pun masih ditolak.

Additionally, 2016 saw the expansion of the AML Committee members based on Presidential Regulation No. 117/2016, now including the Financial Services Authority (OJK), the Ministry of Trade, and the Ministry of Cooperatives and SMEs. This expansion enhances the effectiveness of inter-agency coordination in preventing and eradicating money laundering.

In 2017, the National Coordinating Committee for the Prevention and Eradication of Money Laundering (AML Committee) established the National Strategy for Anti-Money Laundering and Financing of Terrorism for 2017-2019, encompassing seven strategies:

1. Reducing narcotics crime, corruption, and tax crime by optimizing money laundering law enforcement.
2. Realizing effective risk mitigation in preventing money laundering and terrorism financing in Indonesia.
3. Optimizing efforts to prevent and eradicate terrorism financing.
4. Strengthening cooperation between government agencies and/or private institutions.
5. Increasing the use of international cooperation instruments to optimize asset recovery located in other countries.
6. Improving Indonesia's position in international forums on preventing and eradicating money laundering and terrorism financing.
7. Strengthening regulations and increasing the supervision of cross-border cash carrying to prevent terrorism financing.

Also in 2017, Indonesia began its membership process in FATF, attaining observer status at the Financial Action Task Force-Middle East and North Africa Financial Action Task Force (FATF-MENAFATF) in Paris. A series of technical assessments on compliance with FATF's 40 recommendations and 11 Immediate Outcomes (IO) in the Mutual Evaluation Review (MER) were conducted until the end of 2022.

Namun hal itu, tak buat surut semangat. PPATK terus mengupayakan pemenuhan rekomendasi FATF hingga ditawarkan jalur *fast-track* oleh Presiden FATF yang saat itu dijabat oleh T. Raja Kumar.

PPATK bersama perwakilan delegasi Indonesia lainnya juga aktif melakukan komunikasi dalam rangkaian kegiatan FATF *Working Group Meeting* antara lain *Policy Development Group* (PDG), *Risk, Trends and Methods Group* (RTMG), *International Cooperation Review Group* (ICRG), pertemuan bilateral dengan anggota kunci FATF serta *FATF Plenary* khusus terkait keanggotaan Indonesia.

Dalam *2<sup>nd</sup> Update of Indonesia's Action Plan Progress Report*, Indonesia telah menunjukkan capaian signifikan dalam bentuk penyelesaian 48 butir *Action Plan* yang meningkatkan capaian 77% di *1<sup>st</sup> Round* menjadi 100% di *2<sup>nd</sup> Round*. Hingga di bulan Oktober 2023, Indonesia akhirnya berhasil menjadi anggota penuh FATF. Ini merupakan hal yang patut disyukuri. Keanggotaan FATF merupakan pengakuan dunia internasional atas efektivitas regulasi, koordinasi dan implementasi rezim anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal (APUPPT PPSPM) di Indonesia. Dengan perolehan status ini, Indonesia akan mengikuti seluruh kegiatan resmi FATF sebagai negara anggota yang memiliki hak penuh dan dapat secara langsung menyuarakan gagasan dalam proses pengambilan kebijakan atau keputusan dalam forum FATF.

Capaian-capaian diatas yang terukir selama usia dua puluh dua tahun ini patut disyukuri. Namun bukan berarti untuk dinikmati. Seiring masifnya kejahatan pencucian uang berkejaran dengan perkembangan teknologi, semakin canggih pula modusnya. Tentu PPATK tak boleh lengah. PPATK berkomitmen terus memberantas praktik pencucian uang sampai ke akarnya, sejalan dengan upaya pencegahannya. Dengan demikian, bertambahnya usia lembaga ini, selaras dengan kematangan kewenangan, tugas dan fungsinya semata-mata untuk Indonesia bebas pencucian uang.

Two plenary meetings with FATF were held in 2023, but Indonesia's membership status was still rejected. However, PPATK continued to strive to meet FATF recommendations, eventually receiving a fast-track offer from the President of FATF, T. Raja Kumar.

PPATK and other representatives of the Indonesian delegation actively communicated in various FATF Working Group Meetings, including the Policy Development Group (PDG), Risk, Trends and Methods Group (RTMG), International Cooperation Review Group (ICRG), and bilateral meetings with key FATF members.

In the 2nd Update of Indonesia's Action Plan Progress Report, Indonesia demonstrated significant achievements, completing 48 Action Plan items. This progress increased from 77% in the 1st Round to 100% in the 2nd Round. By October 2023, Indonesia successfully became a full member of FATF, an achievement to be celebrated. FATF membership signifies international recognition of the effectiveness of Indonesia's anti-money laundering regime, prevention of terrorism financing, and the proliferation of weapons of mass destruction. This membership entitles Indonesia to participate in all official FATF activities and contribute ideas in the decision-making process at the FATF forum.

The achievements over the past twenty-two years are commendable, but they should not lead to complacency. As technology advances, so do the methods of laundering crimes. PPATK remains vigilant, committed to eradicating money laundering practices to their roots while continuing prevention efforts. The institution's increasing age is expected to reflect the maturity of its authority, duties, and functions, aiming for an Indonesia free from money laundering.



## MILESTONE PPATK

### PENCAPAIAN PPATK

#### 2000

- Indonesia bergabung dengan organisasi *Asia /Pacific Group on Money Laundering* (APG)
- Indonesia masuk dalam "*blacklist*" FATF karena dianggap tidak mendukung agenda anti-pencucian uang
- Indonesia joined the *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG)
- Indonesia Listed on FATF "*Blacklist*" for Insufficient Anti-Money Laundering Support

#### 2002

- UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 17 April 2002 secara tegas mengamanatkan pendirian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *focal point* gerakan APUPPT Indonesia
- PPATK was established on April 17, 2002, coinciding with the enactment of Law No. 15 of 2002 on Money Laundering

#### 2003

- PPATK diresmikan oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 20 Oktober 2003
- UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- PPATK was inaugurated by the Coordinating Minister of Political and Security Affairs Mr. Soesilo Bambang Yudhoyono on October 20, 2003
- Enactment of Law No. 25 of 2003 Amending Law No. 15 of 2002 on the Crime of Money Laundering

#### 2004

- Melalui Keputusan Presiden No. 1 Tahun 2004, Pemerintah RI membentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
- Through Presidential Decree No. 1 of 2004, the Government of Indonesia established the National Coordinating Committee for the Prevention and Eradication of Money Laundering

#### 2005

- Indonesia berhasil keluar dari *blacklist Non-Cooperative Countries and Territories* oleh FATF
- Indonesia Successfully Exits FATF Blacklist of Non-Cooperative Countries and Territories

#### 2007

- Peresmian Gedung PPATK tanggal 27 November 2007
- Inauguration of PPATK office on November 27, 2007

#### 2009

- Komite menunjuk secara tegas PPATK sebagai *focal point* untuk menangani *counter-financing terrorism*
- The National Coordinating Committee expressly designated PPATK as the focal point for countering terrorism financing

#### 2010

- **UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2010**
- Law No. 8 Year 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering was passed by the President of the Republic of Indonesia on October 22, 2010

#### 2012

- FATF kembali menempatkan Indonesia dalam *Blacklist* karena dianggap sebagai negara yang berisiko tinggi terhadap pendanaan terorisme
- FATF has once again placed Indonesia on its blacklist as a high-risk country for terrorism financing

#### 2013

- UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme diterbitkan
- Law No. 9 of 2013 on the Prevention and Eradication of the Crime of Financing Terrorism was passed

#### 2015

- Indonesia keluar dari *blacklist FATF ke greylis* pada Februari 2015
- Pertemuan *International Cooperation Review Group* (ICRG), 24-26 Juni di Brisbane Australia akhirnya memutuskan mengeluarkan Indonesia dari *grey list*
- PP No. 4 Tahun 2015 disahkan, Pihak Pelaporan bertambah dengan masuknya Pihak Pelapor Profesi
- *National Risk Assessment* (NRA) TPPU dan TPPT disusun sebagai wujud komitmen Indonesia memenuhi rekomendasi FATF dalam menyusun strategi APUPPT melalui pendekatan risiko
- In February 2015, Indonesia was successfully removed from the FATF blacklist but remains on the grey list
- The International Cooperation Review Group (ICRG) meeting held on June 24-26 in Brisbane, Australia, decided to remove Indonesia from the grey list
- The number of reporting parties increased with the inclusion of the "Professionals" category as stipulated in PP No.4 of 2015
- Indonesia released the National Risk Assessment (NRA) of Money Laundering and Terrorism Financing to fulfill FATF recommendations, focusing on developing an AML-CFT strategy through a risk-based approach

#### 2016

- Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan *2<sup>nd</sup> CTF Summit* di Nusa Dua, Bali dan menghasilkan Nusa Dua Statement
- Indeks Persepsi Publik tentang Anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme diluncurkan untuk pertama kali
- Perluasan Komite TPPU, Perpres No. 117 Tahun 2016 disahkan yang memuat perluasan anggota Komite TPPU (OJK, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Koperasi dan UMKM)
- Indonesia hosted the 2nd CTF Summit in Nusa Dua, Bali, resulting in the Nusa Dua Statement
- The Public Perception Index on Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism was launched for the first time
- Based on Presidential Regulation No. 117 of 2016, the Anti-Money Laundering Committee was expanded to include the Financial Services Authority (OJK), the Ministry of Trade, and the Ministry of Cooperatives and SMEs

#### 2017

- Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU) menetapkan Strategi Nasional Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme tahun 2017 – 2019 yang mencakup 7 strategi
- Proses FATF, Proses keanggotaan Indonesia di FATF dimulai
- The National Coordinating Committee for the Prevention and Eradication of Money Laundering (TPPU Committee) established the National Strategy for Anti-Money Laundering and Financing of Terrorism for 2017-2019, encompassing seven strategies
- Indonesia's process of becoming a member of the FATF begins



## 2018

- Menteri Polhukam meresmikan Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT
- Indonesia Resmi Menjadi Negara Observer *Financial Action Task Force*
- The Minister of Political, Legal, and Security Affairs inaugurates the Indonesia Financial Intelligence Institute Building
- Indonesia Officially Becomes an Observer Country of the Financial Action Task Force

## 2019

- Indonesia memulai proses *Mutual Evaluation Review* FATF
- Indonesia started the FATF Mutual Evaluation Review process

## 2021

- Indonesia menghadapi *Mutual Evaluation Review* oleh assessor FATF
- Peluncuran GoAML Indonesia
- Pembaruan Penilaian Risiko Nasional TPPU dan TPPT
- Indonesia underwent Mutual Evaluation Review by FATF assessors
- GoAML Indonesia application launch
- National Risk Assessment (NRA) on Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism updated



## 2022

- Silaturahmi Nasional 2 Dekade Gerakan APU PPT dengan menggaungkan *Green Financial Crime*
- National Meeting on Two Decades of AML/CFT Movement with Focus on Green Financial Crime

## 2023

- **Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh *financial action task force* (FATF) pada akhir sidang pleno FATF di Paris, Prancis, tanggal 27 Oktober 2023**
- Indonesia officially became a full member of the Financial Action Task Force (FATF) at the conclusion of the FATF plenary session in Paris, France, on October 27, 2023.



INDONESIA  
OFFICIAL 40TH MEMBER  
SINCE OCTOBER 2023



# PIMPINAN PPATK DARI MASA KE MASA

PPATK LEADERSHIP THROUGH THE YEARS

## YUNUS HUSEIN

"Kalau saya umpamakan permainan bola, PPATK itu seperti gelandang, sebagai *play maker* yang memberi umpan ke *striker* kepada penyidik. PPATK sebagai gelandang, enggak boleh cetak gol, yang buat gol itu penyidik polisi, KPK, Kejaksaan," kata Yunus Husein.



In an analogy akin to a soccer game, PPATK's role resembles that of a midfielder or playmaker who passes the ball to investigators acting as strikers. PPATK's function is not to score goals; rather, that responsibility lies with investigators, police, the Corruption Eradication Commission (KPK), and the Attorney General's Office.

## MUHAMMAD YUSUF

"PPATK lembaga yang tidak punya pasukan. Tidak punya senjata tapi kami tetap eksis karena kami melakukan pendekatan *follow the money*. Ini salah satu cara kami agar penegak hukum lebih giat. Kami juga mengajak para penegak hukum melakukan *follow the money* sehingga bisa ditemukan aset dimana saja, siapa yang menikmati"



PPATK is an institution that operates without troops or weaponry, yet it plays a crucial role through its follow-the-money approach. This strategy serves to amplify law enforcement efforts by prompting investigators to trace financial trails, thereby uncovering assets and identifying their beneficiaries.

2011-2016

**KEPALA PPATK : MUHAMMAD YUSUF**

Wakil Kepala : Agus Santoso

2002-2006

**KEPALA PPATK : YUNUS HUSEIN**

Wakil Analisis dan Kerja Sama antar Lembaga : I Gede Made Sadguna

Wakil Bidang Teknologi Informasi 2004-2005 : Bambang Setiawan

Wakil Bidang Administrasi 2004-2008 : Priyanto

Wakil Bidang Analisis dan Kerja Sama Antar Lembaga 2002-2006 : Gunadi

Wakil Bidang Hukum dan Kepatuhan Periode 2004-2008 : Susno Duadji

2006-2010

**KEPALA PPATK (s.d. OKT 2011) : YUNUS HUSEIN**

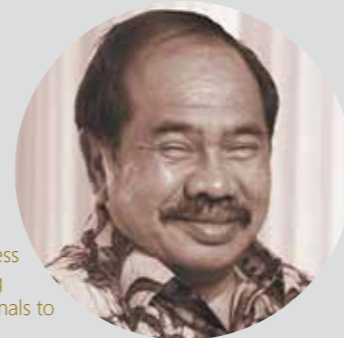
Wakil Bidang Hukum dan Kepatuhan (2008-2011) : Bambang Permantoro

Wakil Bidang Administrasi (2008-2011) : Wahyu Hidayat

Wakil Bidang Teknologi Informasi (2009-2011) : Erman Suherman

## KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

"Penegakan hukum akan optimal bila pelaku kejahatan dijauhkan dari insentif hasil kejahatannya"



Law enforcement's effectiveness can be optimized by reducing the incentives that drive criminals to commit offenses.

2016-2020

**KEPALA PPATK : KIAGUS AHMAD BADARUDDIN**

Wakil Kepala : Dian Ediana Rae

## DIAN EDIANA RAE

"Pendekatan kompherensif perlu dilakukan dengan melibatkan penyedia jasa keuangan, aparat penegak hukum dan kerja sama internasional untuk mengoptimalkan pendeteksian pendanaan terorisme lintas negara."



A comprehensive approach involving financial service providers, law enforcement officials, and international cooperation is essential to enhance the detection of cross-border terrorism financing.

2020-2021

**KEPALA PPATK : DIAN EDIANA RAE**

## IVAN YUSTIAVANDANA

"PPATK tidak memiliki motif apapun. Semata-mata melaporkan akuntabilitas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya kepada publik"



PPATK operates without any ulterior motive. Our sole purpose is to transparently report on the implementation of our duties, functions, and authorities to the public.

2021-2026

**KEPALA PPATK : IVAN YUSTIAVANDANA**

# PRESIDENT HIGHLIGHT

QUOTES PRESIDEN

"Ucapan terima kasih atas kerja keras PPATK, kementerian, dan lembaga sehingga Indonesia telah menjadi anggota penuh dari *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering and Terrorism Financing* mulai Oktober 2023. Saya berharap keanggotaan penuh ini menjadi momentum yang baik untuk terus menguatkan komitmen pencegahan dan pemberantasan TPPU sehingga kredibilitas ekonomi kita menjadi meningkat."

"Thank you for the hard work of PPATK, ministries, and institutions that led Indonesia to become a full member of the Financial Action Task Force (FATF) as of October 2023. I hope that this full membership will serve as a positive momentum to further strengthen our commitment to preventing and eradicating money laundering, thereby enhancing our economic credibility."





# PELAPORAN

REPORTING

## JAGA KUALITAS LAPORAN PIHAK PELAPOR

"Ensuring Report Integrity and Quality Assurance"

Laporan dari pihak pelapor merupakan pintu utama untuk membantu tugas PPATK dalam memberantas dan mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT). Laporan transaksi keuangan mencurigakan yang berasal dari pihak pelapor dapat dijadikan *trigger* dalam rangkaian proses analisis transaksi mencurigakan. Oleh karena itu, PPATK selalu menjaga kualitas pelaporan dari pihak pelapor dengan melaksanakan serangkaian kegiatan.

Reports from reporting parties play a crucial role in aiding the PPATK in its efforts to combat and prevent money laundering and the financing of terrorism. These suspicious transaction reports serve as a catalyst in the process of analyzing potentially illicit activities. To ensure the effectiveness of these reports, PPATK consistently upholds the quality of submissions through a series of dedicated activities.



# PERKUAT REZIM APUPPT DENGAN KOLABORASI

## STRENGTHENING THE AMLCFT REGIME WITH COLLABORATION

**PELAPORAN** yang ideal tak bisa terwujud tanpa melibatkan peran serta pihak pelapor. Pelaporan menjadi instrumen penting dalam upaya memerangi kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Fungsi pelaporan memiliki peran penting dalam pengelolaan data, informasi, dan statistik terkait penyampaian laporan transaksi keuangan dalam mendeteksi adanya aliran dana pencucian uang dari sumber-sumber yang tidak sah. Laporan ini sebagai masukan (*input*) penyusunan laporan intelijen PPATK.

Pada rezim APUPPT, kewajiban pelaporan transaksi keuangan kepada PPATK dilaksanakan para pihak pelapor yang mencakup sektor penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan/atau jasa, serta profesi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

**IDEAL** Reporting cannot be realized without involving the participation of the reporting party. Reporting is an important instrument in the fight against money laundering and terrorism financing. The reporting function has an important role in managing data, information, and statistics related to the submission of financial transaction reports in detecting the flow of money laundering funds from unauthorized sources. This report serves as an input for the preparation of PPATK intelligence reports.

In the AMLCFT regime, the obligation to report financial transactions to PPATK is carried out by reporting parties covering the Financial Service Providers, Designated non-financial Businesses and Professions as stipulated in Law Number 8 Year 2010 and other statutory provisions.



Kolaborasi dengan beragam stakeholder untuk memperkuat rezim APUPPT Indonesia  
Collaboration with diverse stakeholders to strengthen Indonesia's AML/CFT regime

### CLARITY, COMPLETENESS, TIMELINESS, PRECISION

Penyusunan laporan intelijen PPATK dapat optimal sampai dengan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Data laporan yang disampaikan pihak pelapor memenuhi unsur-unsur kriteria berkualitas yaitu jelas (*clarity*), lengkap (*completeness*), terkini (*timeliness*), tepat (*precision*) sesuai dengan ketentuan dan relevan dengan kepentingan analisis.

The preparation of PPATK intelligence reports can be optimized until it is followed up by law enforcement officials. The report data submitted by the reporting party meets the elements of quality criteria, namely Clarity, Completeness, Timeliness, Precision (domain integrity) in accordance with the provisions and relevant to the interests of the analysis.

#### DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAPORAN, BERBAGAI UPAYA DILAKUKAN ANTARA LAIN;

- penetapan kebijakan pelaporan dan evaluasi implementasinya;
- peningkatan registrasi dan pengkinian data pihak pelapor;
- pengkinian data pengguna jasa terpadu;
- pengkinian daftar pantau (*watchlist*) yang terkait;
- pelaksanaan uji petik kualitas dan *feedback* pelaporan
- pengembangan sistem informasi pelaporan dan sistem pendukungnya
- penilaian dan pembinaan integritas pihak pelapor.

#### IN IMPROVING THE QUALITY OF REPORTING, VARIOUS EFFORTS WERE MADE, AMONG OTHERS;

- Establishment of reporting policies and evaluation of their implementation;
- Improving registration and updating reporting party data;
- integrated service user data update;
- updating the related watchlist;
- conducting quality check and feedback reporting
- development of reporting information system and its supporting system
- assessment and guidance on the integrity of reporting parties.

Upaya peningkatan kualitas pelaporan ini tidak lepas dari kolaborasi PPATK dengan pihak pelapor, lembaga pengawas dan pengatur, serta *stakeholder* lainnya dalam rezim APUPPT. Semua itu demi terwujudnya pelaporan berkualitas oleh seluruh sektor pihak pelapor untuk mendukung tercapainya integritas keuangan Indonesia dalam perekonomian global yang bersih dan bebas dari TPPU.

Efforts to improve the quality of this reporting cannot be separated from PPATK's collaboration with reporting parties, supervisory and regulatory institutions, and other stakeholders in the AMLCFT regime. All of this is for the realization of quality reporting by all reporting party sectors to support the achievement of Indonesia's financial integrity in a clean and MLF-free global economy.



## BERSINERGI SATUKAN MISI

### SYNERGIZE TO UNITE THE MISSION

AGAR satu misi dalam menjaga kualitas pelaporan, PPATK bersinergi bersama lembaga pengawas dan pengatur, serta *stakeholder* lainnya dalam rezim APUPPT. Berbagai kegiatan dilakukan selama periode Januari s.d. Juni 2024, antara lain: Rapat Koordinasi Tahunan PPATK Tahun 2024, Koordinasi Pelaksanaan Pilkada 2024 dan Rembuk Nasional, Evaluasi Kualitas Data Pelaporan yang Disampaikan oleh Pihak Pelapor, Pembinaan Pihak Pelapor Dalam Rangka Tindak Lanjut Rekomendasi FIR on ML/TF Tahun 2023, dan Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Registrasi Pihak Pelapor pada Aplikasi GoAML.

In order to align the mission in maintaining the quality of reporting, PPATK synergizes with supervisory and regulatory institutions, as well as other stakeholders in the APUPPT regime. Various activities were carried out during the period January to June 2024, including: PPATK Annual Coordination Meeting in 2024, Coordination of the Implementation of the 2024 Regional Election and National Gathering, Evaluation of the Quality of Reporting Data Submitted by Reporting Parties, Coaching of Reporting Parties in the Context of Follow-up to the Recommendations of the FIR on ML/TF in 2023, and Verification and Reconciliation of Reporting Party Registration Data on the GoAML Application.

### RAPAT KOORDINASI TAHUNAN PPATK TAHUN 2024

Rapat koordinasi tahunan PPATK dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2024. Pertemuan yang rutin digelar setiap tahun ini dihadiri oleh sekurangnya 500 orang yang merupakan perwakilan *stakeholders* pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM.

Agenda Rapat Koordinasi Tahunan PPATK Tahun 2024 ini meliputi penyampaian apresiasi kepada seluruh *stakeholders*, penyampaian laporan pencapaian bersama para pemangku kepentingan sepanjang tahun 2023, penyampaian rencana strategis dan program kerja yang akan dilakukan guna mewujudkan Indonesia yang bersih dari TPPU, TPPT dan PPSPM.

### PPATK ANNUAL COORDINATION MEETING 2024

The PPATK Annual Coordination Meeting was held on January 30, 2024, at the InterContinental Hotel Jakarta. This annual event was attended by over 500 representatives from various stakeholders involved in the prevention and eradication of money laundering, terrorism financing, and weapons of mass destruction financing.

The agenda for the 2024 meeting included conveying appreciation to all stakeholders, submitting reports on joint achievements with stakeholders throughout 2023, and presenting PPATK's strategic plans and work programs.



Rapat koordinasi tahunan PPATK pada tanggal 30 Januari 2024 di Hotel InterContinental Jakarta  
PPATK annual coordination meeting on January 30, 2024 at the InterContinental Hotel Jakarta



**PERTEMUAN KOORDINASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024, PPATK menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Tim Kerja Analisis Kolaboratif PPATK pada tanggal 7 Mei 2024. Pertemuan

**COORDINATION MEETING FOR THE IMPLEMENTATION OF SIMULTANEOUS REGIONAL ELECTIONS IN 2024**

To prepare for the simultaneous Regional Head Elections (Pilkada) in 2024, PPATK organized a Collaborative Analysis Team Meeting on May 7, 2024, at the Shangri-La Hotel,

koordinasi ini bertujuan mengoptimalkan pemahaman mengenai pentingnya kolaborasi aktif antara PPATK, pihak pelapor, Kementerian/Lembaga, dan *stakeholders* dalam rezim APUPPT untuk mewujudkan Pilkada serentak tahun 2024 yang transparan dan akuntabel.

Jakarta. This coordination meeting aimed to enhance the understanding of the importance of active collaboration between PPATK, Reporting Parties, Ministries/Institutions, and stakeholders in the AML-CFT regime to ensure transparent and accountable simultaneous regional elections in 2024.



Pertemuan Koordinasi Tim Kerja Analisis Kolaboratif terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 pada tanggal 7 Mei 2024 di Hotel Shangri-La Jakarta

*Coordination Meeting of the Collaborative Analysis Working Team related to the Implementation of Simultaneous Regional Elections in 2024 on May 7, 2024*



### REMBUK NASIONAL TAHUN 2024

Bank umum merupakan institusi yang sangat rentan terhadap risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan senjata pemusnah massal. Upaya pencegahan dan deteksi pencucian uang tidak optimal apabila kualitas pelaporan yang disampaikan oleh bank umum tidak bersifat akurat, lengkap dan relevan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dilaksanakan forum diskusi antara PPATK, Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP), dan perwakilan seluruh bank umum dalam acara "Rembuk Nasional" yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2024.

### NATIONAL GATHERING 2024

Commercial banks are highly vulnerable to the risks of money laundering, terrorism financing, and weapons of mass destruction financing. To address this, PPATK, the Banking Compliance Director Communication Forum (FKDKP), and representatives of all commercial banks held a discussion forum titled "National Gathering" on June 6, 2024, at the PPATK Building.

The 2024 National Gathering was based on the principles of openness and commitment to finding and implementing solutions to challenges in optimizing efforts

Rembuk Nasional Tahun 2024 dilandaskan pada asas keterbukaan, kesamaan niat, serta komitmen untuk mencari dan menerapkan solusi atas hal-hal yang masih menjadi kendala dalam optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, PPSPM di Indonesia.

Dalam pertemuan tersebut, dihasilkan kesepakatan antara PPATK dan FKDKP untuk mengatasi risiko yang dihadapi oleh bank umum dengan pendekatan *tone from the top*, pembangunan dan pengembangan teknologi informasi yang digunakan, dan peningkatan kapasitas SDM secara berkesinambungan.

to prevent and eradicate money laundering, terrorism financing, and weapons of mass destruction financing in Indonesia. During the meeting, PPATK and FKDKP reached an agreement to address the risks faced by commercial banks through a *tone-from-the-top* approach, the development and enhancement of information technology, and continuous improvement of human resource capacity.

Rembuk Nasional Tahun 2024 pada tanggal 6 Juni 2024  
National Gathering 2024 on June 6, 2024



**EVALUASI KUALITAS DATA PELAPORAN**

PPATK berkomitmen untuk melakukan evaluasi kualitas laporan yang disampaikan pihak pelapor sekaligus menggali kendala-kendala yang dialami oleh Pihak Pelapor. Sampai dengan Semester 1 2024, kegiatan evaluasi kualitas data pelaporan yang telah dilakukan meliputi:

1. *Focus Group Discussion (FGD)* yang dilaksanakan pada 28 Februari 2024 dan diikuti 17 Pedagang Kendaraan Bermotor.
2. Rapat Koordinasi telah dilaksanakan pada bulan Mei dan diikuti 8 Perusahaan Properti dan Pedagang Kendaraan Bermotor.
3. Penyampaian surat evaluasi kualitas data pelaporan Pihak Pelapor terhadap 35 Penyedia Jasa Keuangan dan 5 Penyedia Barang dan/atau Jasa.

**EVALUATION OF REPORTING DATA QUALITY**

PPATK is committed to evaluating the quality of reports submitted by reporting parties and identifying the challenges they face. By the end of the first semester of 2024, the following evaluation activities had been conducted:

1. Focus Group Discussion (FGD) attended by 17 Motor Vehicle Traders.
2. Coordination Meeting attended by 8 Property Companies and Motor Vehicle Traders.
3. Submission of evaluation letters regarding the quality of reporting data to 35 Financial Services Providers and 5 Designated non-financial Businesses and Professions.



FGD Evaluasi Kualitas Laporan dengan Pihak Pelapor pada 28 Februari 2024  
 FGD on Report Quality Evaluation with Reporting Parties on February 28, 2024

**PEMBINAAN PIHAK PELAPOR**

Sebagai tindak lanjut hasil penilaian FIR on ML/TF Tahun 2023, PPATK melaksanakan pembinaan pihak pelapor di 3 kota (Batam, Solo, dan Semarang) dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pihak pelapor dalam menjalankan kewajiban pelaporan APUPPT.

Kegiatan pembinaan yang dilakukan meliputi pembahasan atas nilai FIR yang diperoleh pihak pelapor, pembahasan kendala yang dihadapi oleh pihak pelapor dalam implementasi regulasi terkait APUPPT, pembahasan rencana perbaikan, serta pemberian saran atas pelaksanaan FIR dan kewajiban pelaporan.

**REPORTING PARTY ASSISTANCE**

Following the 2023 Financial Intelligence Report (FIR) on ML/TF assessment, PPATK conducted coaching sessions for reporting parties in three cities (Batam, Solo, and Semarang) to enhance their effectiveness in fulfilling AML-CFT reporting obligations.

These coaching activities included:

1. Discussion of the FIR values obtained by the reporting parties.
2. Identification and discussion of obstacles faced by the reporting parties in implementing AML-CFT regulations.
3. Development of improvement plans.
4. Providing advice on the implementation of FIR and reporting obligations.

**HASIL AGREGAT FIR PER KATEGORI**

KELOMPOK	FIR	DIMENSI 1	DIMENSI 2	DIMENSI 3
KBMI 1	8,25	9,45	9,39	7,46
KBMI 2	8,27	9,34	9,55	7,50
KBMI 3	8,77	9,53	9,61	8,25
KBMI 4	9,22	9,64	9,84	8,88
BPR	5,70	4,71	5,73	7,19
PVA	5,11	5,12	4,67	6,87
PTD	5,72	5,85	5,28	7,23
KSP	2,70	1,49	3,09	3,17
Kendaraan	4,39	2,82	4,19	8,81
Properti	3,66	1,94	3,50	8,28
Emas	5,77	4,06	5,83	9,30

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memiliki kelemahan terhadap SOP (tidak memiliki SOP), lemahnya pengawasan aktif direksi dan komisaris. Tidak melaksanakan pemantauan terhadap transaksi nasabah dan rendahnya kualitas LTKM. Dari seluruh KSP yang menjadi responden, hanya KSP Mitra Sahabat Sejati milik Sampoerna yang paling bagus secara tata Kelola, SOP dan pelaporan.



**VERIFIKASI DATA REGISTRASI PADA GOAML**

PPATK secara rutin melakukan verifikasi atas setiap permohonan registrasi pihak pelapor pada aplikasi GoAML. Jumlah Pihak Pelapor yang terdaftar pada aplikasi GoAML dan berstatus aktif secara kumulatif per 30 Juni 2024 adalah sebanyak 41.221 pihak pelapor (meningkat sebesar 1,64% dibandingkan dengan Semester II tahun 2023).

PPATK juga secara reguler menyampaikan data pihak pelapor kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dan Asosiasi Pihak Pelapor seperti dengan Bank Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI), dan Financial Planning Standards Board (FPSB).

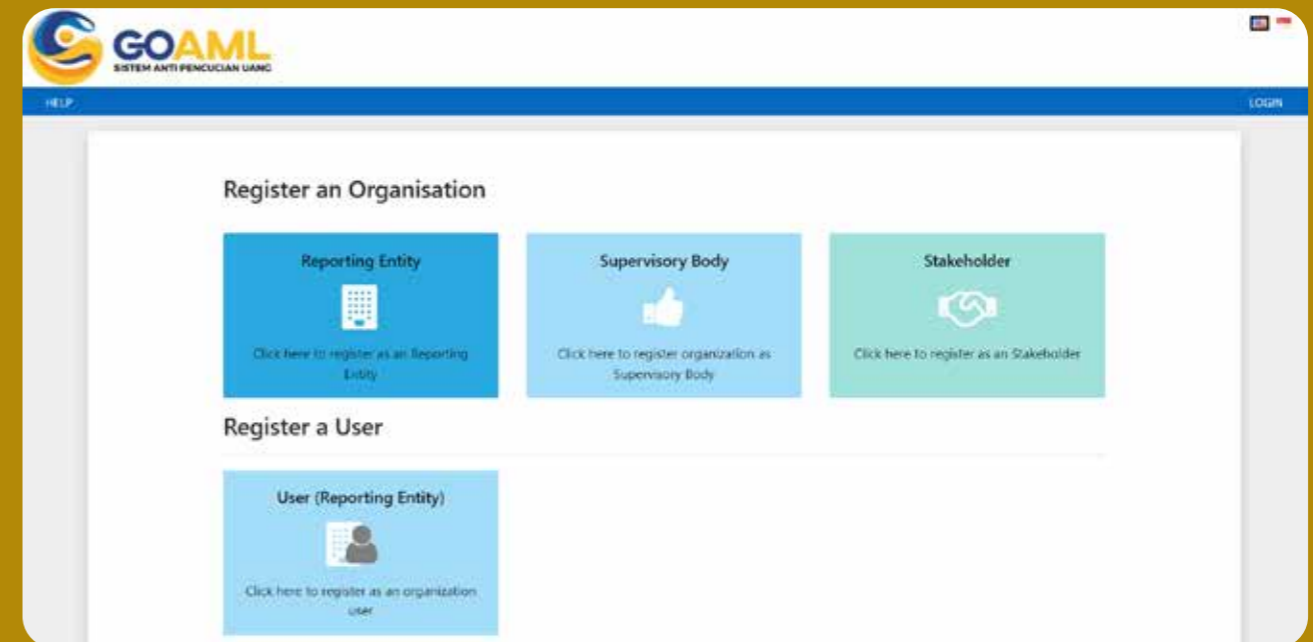
**VERIFICATION OF GOAML REGISTRATION DATA**

PPATK routinely verifies each reporting party registration application on the GoAML application. As of June 30, 2024, a total of 41,221 reporting parties were registered and cumulatively active on the GoAML application.

PPATK also regularly submits reporting party data to Supervisory and Regulatory Institutions (LPP) and Reporting Party Associations, such as Bank Indonesia, the Ministry of Law and Human Rights, the Indonesian Advocates Association (PERADI), the Indonesian Real Estate Company Association (REI), the Indonesian Real Estate Brokers Association (AREBI), and the Financial Planning Standards Board (FPSB).

**GAMBAR 6.** Perbandingan Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor yang Terdaftar pada aplikasi GoAML Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor pada Semester II tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024

TOTAL PIHAK PELAPOR / Reporting Parties Total	
SEM I 2024 :	<b>41.221</b>
SEM II 2023 :	<b>40.556</b>
Profesi / Professions	
SEM I 2024 :	<b>33.379</b>
SEM II 2023 :	<b>32.871</b>
Penyedia Barang Jasa / Designated non-financial Businesses and Professions	
SEM I 2024 :	<b>2.120</b>
SEM II 2023 :	<b>2.084</b>
Penyedia Jasa Keuangan / Financial Service Providers	
SEM I 2024 :	<b>5.722</b>
SEM II 2023 :	<b>5.601</b>

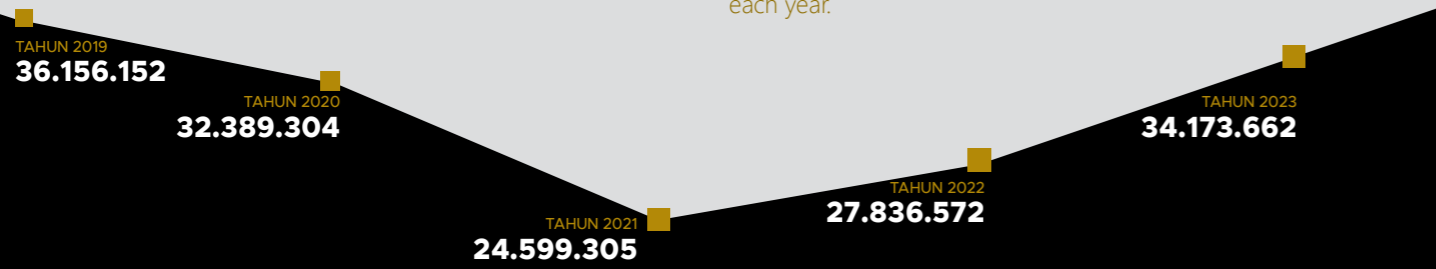


## STATISTIK LAPORAN

### REPORTING STATISTICS

PPATK menerima beberapa jenis pelaporan dari pihak pelapor yang kemudian menjadi *database* PPATK dalam menganalisis dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM), tren menunjukkan bahwa laporan yang masuk ke PPATK terus bertambah dari tahun ke tahun.

PPATK receives various types of reports from Reporting Parties, which form its database for analyzing allegations of Money Laundering (ML), Terrorism Financing (TF), and Proliferation of Weapons of Mass Destruction (WMD). The trend indicates that the number of reports submitted to PPATK has been consistently increasing each year.



STATISTIK PELAPORAN - Reporting Statistics

## 2019-2023

TAHUN	LTKM	LTKT	LTKL	LTPBJ	LPUT	LPT	TOTAL
2019	78.587	3.131.144	32.905.951	39.118	1.273	79	36.156.152
2020	68.057	2.738.598	29.549.817	32.239	530	63	32.389.304
2021	79.543	2.766.324	21.705.637	47.587	18	196	24.599.305
2022	90.742	3.431.107	24.211.176	98.312	3.931	1.304	27.836.572
2023	130.472	3.435.651	30.485.306	113.442	8.086	705	34.173.662
TOTAL	447.401	15.502.824	138.857.887	330.698	13.838	2.347	155.154.995

## STATISTIK PENILAIAN INTEGRITAS KEUANGAN

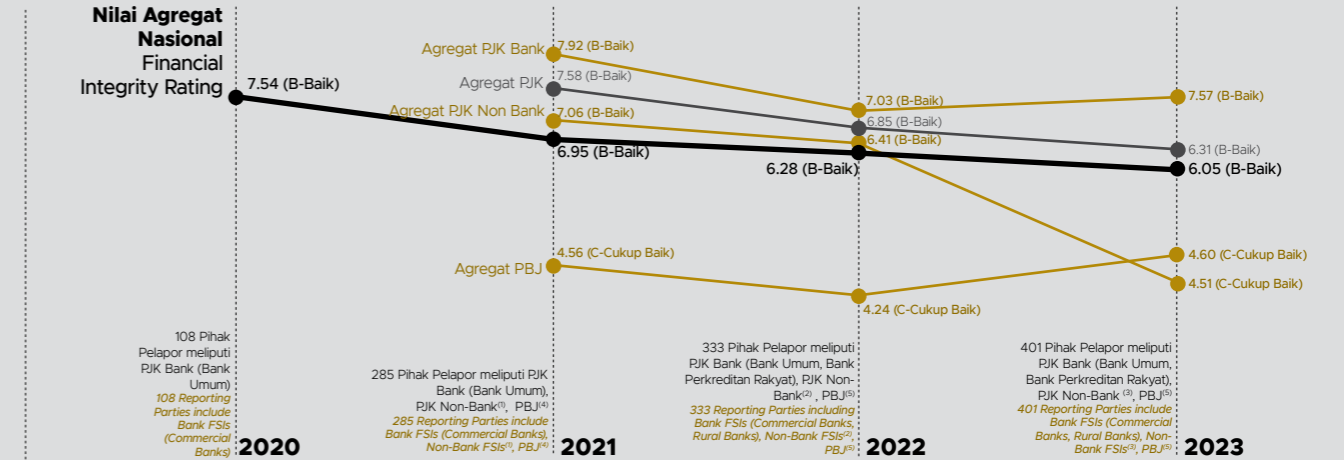
### FINANCIAL INTEGRITY RATING STATISTICS

Financial Integrity Rating (FIR) merupakan penilaian integritas Pihak Pelapor dalam mendukung efektivitas program APU PPT dengan pendekatan kinerja pelaporan. Kegiatan ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2020 kepada 108 Penyedia Jasa Keuangan (PJK) Bank Umum dengan nilai index sebesar 7.54 (Baik).

The Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing (FIR) assesses the integrity of Reporting Parties in supporting the effectiveness of the AML/CFT program using a reporting performance approach. This assessment was first conducted in 2020 for 108 Financial Service Providers (FSPs), specifically Commercial Banks, achieving an index value of 7.54 (Good).

Jika dibandingkan, nilai index FIR on ML/TF dari tahun pertama hingga tahun 2023 mengalami penurunan setiap tahunnya yang dikarenakan bertambahnya jumlah responden dan jenis kategori Pihak Pelapor yang dijadikan populasi untuk penilaian FIR. Nilai terakhir pelaksanaan FIR pada tahun 2023 adalah 6.05 (Baik).

However, statistical trends indicate that the FIR index value has decreased annually from 2020 to 2023. This decline is attributed to the increasing number of respondents and the broader range of Reporting Party categories included in the FIR assessment. The final FIR implementation value in 2023 stands at 6.05 (Good).



**Catatan kaki:**

- (1) PJK Non-Bank pada tahun 2021 meliputi Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Manajer Investasi, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Efek, Fintech, Perusahaan Pembiayaan)
- (2) PJK Non-Bank pada tahun 2022 mencakup PJK Non-Bank pada tahun 2021 dengan penambahan Pedagang Valuta Asing, Perusahaan Transfer Dana, Pedagang Aset Kripto
- (3) PJK Non-Bank pada tahun 2023 hanya mencakup Pedagang Valuta Asing, Perusahaan Transfer Dana, Koperasi Simpan Pinjam
- (4) PBJ pada tahun 2021 meliputi Perusahaan Properti dan Pedagang Kendaraan Bermotor
- (5) PBJ pada tahun 2022 dan 2023 mencakup PBJ pada tahun 2021 dengan penambahan Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia

**Footnotes:**

- (1) Non-Bank FSIs in 2021 include Financial Institution Pension Funds, Investment Managers, Insurance Companies, Securities Companies, Fintech, Financing Companies)
- (2) Non-Bank Financial Services in 2022 includes Non-Bank Financial Services in 2021 with the addition of Foreign Exchange Traders, Fund Transfer Companies, Crypto Asset Traders
- (3) Non-Bank FSIs in 2023 include only Foreign Exchange Traders, Fund Transfer Companies, Savings and Loan Cooperatives
- (4) DMJ in 2021 includes Property Companies and Motor Vehicle Traders
- (5) FSIs in 2022 and 2023 include FSIs in 2021 with the addition of Gems and Jewelry/Precious Metals Dealers.



# STATISTIK REGISTRASI GOAML PIHAK PELAPOR

## REPORTING PARTY GOAML REGISTRATION STATISTICS

Jenis Pihak Pelapor (PP) Type of Reporting Party	Organisasi Aktif per Sem II '23 Active Organization by 2023	Jumlah PP Registrasi Baru pada Sem I '24 New Registration by June 2024	Organisasi Aktif per Sem I '24 Active Organization by Jun 2024
<b>PENYEDIA JASA KEUANGAN - Financial Service Providers</b>			
Bank - Bank	112	0	110
Bank Perkreditan Rakyat - Rural Bank	1.840	11	1.700
Perusahaan Pembiayaan - Financing Company	180	0	168
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi - Insurance Companies and Insurance Brokerage Companies	284	2	281
Dana Pensiun Lembaga Keuangan - Dana Pensiun Lembaga Keuangan	28	0	26
Perusahaan Efek - Securities Company	135	2	132
Manajer Investasi - Investment Manager	98	2	94
Kustodian - Custodian	23	0	23
Wali Amanat - Trustee	11	0	11
Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro - Postage as Giro Service Provider	2	0	2
Pedagang Valuta Asing - Pedagang Valuta Asing	1.000	30	1.009
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu - Card Payment Device Operator	1	0	1
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet - E-Money and/or E-Wallet Providers	49	2	51
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam - Cooperatives that conduct savings and loan activities	1.269	268	1.536
Pegadaian - Pawnshop	38	0	38
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi - Companies engaged in commodity futures trading	102	3	103
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang - Organizer of money transfer business activities	219	6	225
Perusahaan Modal Ventura - Venture Capital Company	57	0	51
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur - Infrastructure Finance Company	3	0	3
Lembaga Keuangan Mikro - Microfinance Institutions	47	0	46
Lembaga Pembiayaan Ekspor - Export Financing Agency	1	0	1
Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi - Information Technology-based Money Lending and Borrowing Service Provider	89	4	94
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi - Organizer of crowdfunding services through technology-based share offerings	8	2	10
Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi - Information technology-based financial transaction service provider	5	2	7
<b>Total Penyedia Jasa Keuangan - Total Financial Service Providers</b>	<b>5.601</b>	<b>334</b>	<b>5.722</b>
<b>PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAIN - Designated non-financial Businesses and Professions</b>			
Pejabat Lelang Kelas II - Class II Auction Officer	163	0	163
Perusahaan Properti / Agen Properti - Property Company / Property Agent	1.246	28	1.273
Pedagang Kendaraan Bermotor - Motor Vehicle Traders	456	8	462

Jenis Pihak Pelapor (PP) Type of Reporting Party	Organisasi Aktif per Sem II '23 Active Organization by 2023	Jumlah PP Registrasi Baru pada Sem I '24 New Registration by June 2024	Organisasi Aktif per Sem I '24 Active Organization by Jun 2024
Pedagang Permata dan Perhiasan / Logam Mulia - Gems and Jewelry / Precious Metal Traders	29	1	30
Pedagang Barang Seni dan Antik - Art and Antique Goods Merchants	2	0	2
Balai Lelang - Auction Center	114	3	116
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang - State Wealth and Auction Service Office	74	0	74
<b>Total Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain - Total Designated non-financial Businesses and Professions</b>	<b>2.084</b>	<b>40</b>	<b>2.120</b>
<b>PROFESI - Profession</b>			
Notaris - Notary	20.961	285	21.246
Akuntan - Accountant	401	13	414
Akuntan Publik - Public Accountant	488	22	509
Pejabat Pembuat Akta Tanah - Land Deed Official	10.742	50	10.792
Advokat - Advocate	233	139	372
Perencana Keuangan - Financial Planner	46	0	46
<b>Total Profesi - Total Profession</b>	<b>32.871</b>	<b>509</b>	<b>33.379</b>
<b>TOTAL PIHAK PELAPOR - Total Reporting Parties</b>	<b>40.556</b>	<b>883</b>	<b>41.221</b>

# 41.221

### ORGANISASI AKTIF PER SEMESTER I TAHUN 2024

Active Organizations per Semester 1 of 2024

5.722 PJK, 2.120 PBJ, 33.379 Profesi

**Organisasi Aktif** adalah pihak pelapor yang terdaftar pada GoAML dan berstatus aktif pada GoAML. Active Organization refers to a Reporting Party that is both registered and actively engaged on GoAML.

# 883

### REGISTRASI BARU SEMESTER I TAHUN 2024

New registration per semester 1 2024

334 PJK, 40 PBJ, 509 Profesi

# 219

### PIHAK PELAPOR DINONAKTIFKAN PADA SEMESTER I TAHUN 2024

Reporting Party deactivated in Semester 1 of 2024

213 PJK, 4 PBJ, 2 Profesi

**Pihak Pelapor Non-Aktif** adalah Pihak Pelapor yang akun organisasi GoAML-nya dinonaktifkan karena pencabutan izin usaha, penggabungan usaha, akuisisi, perubahan nama organisasi, dan/atau duplikasi data pada GoAML.

A Non-Active Reporting Party is a Reporting Party whose GoAML organization account has been deactivated due to the revocation of a business license, business merger, acquisition, change of organization name, and/or duplication of data in GoAML.

# 1

### PIHAK PELAPOR YANG DIAKTIFKAN KEMBALI

Reactivated Reporting Party

Pihak Pelapor yang diaktifkan kembali adalah pihak pelapor yang semula berstatus non-aktif pada periode sebelumnya dan pada periode Semester I 2024 diaktifkan kembali karena berdasarkan hasil konfirmasi status operasional pihak pelapor dengan pihak pelapor sendiri dan crosscheck data pihak pelapor dengan LPP, pihak pelapor telah aktif beroperasi kembali.

The reactivated Reporting Party is the Reporting Party that originally had a Non-Active status in the previous period and in the 2024 Semester I period was reactivated because based on the results of confirmation of the Reporting Party's operational status with the Reporting Party itself and crosschecking the Reporting Party's data with LPP, the Reporting Party has been actively operating again.





# PENGAWASAN KEPATUHAN

COMPLIANCE SUPERVISION

## AWASI KEPATUHAN PIHAK PELAPOR

"Overseeing Compliance of Reporting Parties"

Mengingat pentingnya laporan sebagai *trigger* awal, PPATK melakukan pengawasan kepatuhan terhadap pihak pelapor. Pengawasan kepatuhan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur serta PPATK untuk memastikan kepatuhan pihak pelapor atas kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini dengan mengeluarkan ketentuan atau pedoman pelaporan, melakukan audit kepatuhan, memantau kewajiban pelaporan, dan mengenakan sanksi

**Recognizing the critical role of reports as initial triggers, PPATK conducts compliance supervision of reporting parties. Compliance monitoring involves a series of activities aimed at ensuring that reporting parties adhere to their reporting obligations under the law. These activities encompass issuing reporting provisions or guidelines, conducting compliance audits, monitoring reporting obligations, and imposing sanctions as necessary.**



# MENDISIPLINKAN KEWAJIBAN PELAPORAN

## DISCIPLINING REPORTING OBLIGATIONS

**LAPORAN** dari pihak pelapor memiliki peran penting mengungkap indikasi tindak pidana pencucian uang. Dari laporan tersebut, PPATK melakukan analisis dan pemeriksaan sehingga dapat menjadi pemicu awal dalam suatu penanganan kasus. Mengingat pentingnya hal tersebut, PPATK melakukan perumusan kebijakan dibidang pengawasan kewajiban pelaporan dan memastikan sistem manajemen risiko pencucian uang yang diterapkan oleh pihak pelapor. Adapun pihak pelapor yang terlibat, yaitu Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Penyedia Barang dan Jasa Lain dan Profesi (PBJP). Atas kewenangan pengawasan ini, PPATK berharap dapat mencegah dan mendeteksi adanya aktivitas pencucian uang.

Entitas PJK terdiri dari Perbankan, Asuransi, Pasar Modal, Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank, Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitensi, Koperasi Simpan Pinjam, Calon Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pegadaian. Adapun Entitas dari PBJP mencakup Perusahaan Properti/Agen Properti, Pedagang Kendaraan Bermotor, Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia, Pedagang Barang Seni dan Antik, Advokat, Perencana Keuangan, Notaris, Akuntan, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Balai Lelang.

REPORTS from reporting parties have an important role in uncovering indications of money laundering crimes. From the report, PPATK conducts analysis and examination so that it can be the initial trigger in a case handling. Given the importance of this, PPATK formulates policies in the field of supervising reporting obligations and ensuring the money laundering risk management system implemented by the Reporting Party. The reporting parties involved, namely the Financial Services Provider (PJK) and the Designated non-financial Businesses and Professions. With this supervisory authority, PPATK hopes to prevent and detect money laundering activities.

The FSI entities consist of Banking, Insurance, Capital Markets, Non-Bank Foreign Exchange Business Activities, Remittance Service Payment Service Providers, Savings and Loan Cooperatives, Prospective Crypto Asset Physical Traders and Pawnshops. The entities of the PBJP include Real Estate/Property Companies or Agent, Motor Vehicle Traders, Diamond and jewelry/gold trader, Art and Antique Goods Traders, Advocates, Financial Planners, Notaries, Accountants, Land Deed Officials, and Auction Houses.

### PROGRAM APU PPT PPSPM

#### 5 Pilar Efektivitas Pelaksanaan 5 Pillars of Implementation Effectiveness

Pengawasan aktif direksi dan komisaris  
Active supervision of directors and commissioners

Kebijakan dan Prosedur  
Policies and Procedures

Sistem Informasi Manajemen  
Management Information System

Pengendalian intern, sumber daya manusia dan pelatihan  
Internal controls, human resources and training

Pengujian transaksi terkait kewajiban pelaporan  
Transaction testing related to reporting obligations

Pengawasan kepatuhan memastikan efektifitas pelaksanaan Program APU PPT PPSPM melalui 5 (lima) pilar, yaitu pengawasan aktif direksi dan komisaris; kebijakan dan prosedur; sistem informasi manajemen; pengendalian *intern*, sumber daya manusia dan pelatihan; serta pengujian transaksi terkait kewajiban pelaporan.

Selain itu, fungsi kepatuhan juga mencakup kegiatan berupa bimbingan teknis Pihak Pelapor, pelaksanaan audit kepatuhan, kegiatan koordinasi dengan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), serta penerapan sanksi atas pelanggaran kewajiban pelaporan maupun pemenuhan komitmen audit.

LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau penerapan sanksi terhadap pihak pelapor. Dalam hal ini PPATK menjadi LPP pada beberapa sektor yaitu Perusahaan Properti/Agen Properti; Pedagang Kendaraan Bermotor; Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia; Pedagang Barang Seni dan Antik; Advokat; dan Perencana Keuangan.

Compliance Monitoring ensures the effective implementation of the AML/CFT/PF Program through five pillars: active supervision of directors and commissioners, policies and procedures, management information systems, internal control, human resources and training, and transaction testing related to reporting obligations.

The Compliance Function also includes activities such as technical guidance for Reporting Parties, implementation of compliance audits, coordination activities with Supervisory and Regulatory Institutions (LPP), and the imposition of sanctions for violations of reporting obligations and failure to fulfill audit commitments.

LPP is an institution authorized to supervise, regulate, and impose sanctions on Reporting Parties. PPATK serves as an LPP in several sectors, including Real Estate/Property Companies or Agent, Vehicle Dealers, Diamond and jewelry/gold Merchants, Art and Antique Goods Traders, Advocates, and Financial Planners.



## AGAR PIHAK PELAPOR PATUH

### ENSURING REPORTING PARTIES' COMPLIANCE

PPATK senantiasa berupaya untuk membimbing pihak pelapor untuk patuh akan amanat yang tercantum pada UU TPPU. Beberapa upaya telah dilakukan PPATK pada Semester 1 Tahun 2024 untuk meningkatkan kepatuhan Pihak Pelapor.

1. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan PPATK No.1/2024 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Kewajiban Pelaporan kepada Pihak Pelapor yang mana PPATK merupakan LPP
2. Pelaksanaan Audit untuk menguji kepatuhan Pihak Pelapor terhadap UU TPPU. Audit dilakukan baik secara mandiri maupun melalui mekanisme *Joint Audit* dengan Lembaga Pengawas Pengatur (LPP). Adapun fokus audit tematik pada semester 1 tahun 2024 antara lain:
  - Know Your Customer (KYC) dan pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada PPATK.
  - Risk Based Approach (RBA) tools APU-PPT dari LPP
  - Judi Online
  - Green Financial Crime
  - Pemilu

PPATK always strives to guide reporting parties to comply with the mandates contained in the Anti-Money Laundering Law. Several efforts have been made by PPATK in the first semester of 2024 to increase the compliance of the Reporting Party.

1. Dissemination of PPATK Regulation No.1/2024 concerning Procedures for Imposing Administrative Sanctions for Violations of Reporting Obligations to Reporting Parties whose Regulatory Supervisory Institution is PPATK.
2. Audit to test the compliance of the Reporting Party with the Anti-Money Laundering Law. Audits are conducted either independently or through a Joint Audit mechanism with the Regulatory Supervisory Institution (LPP). The focus of thematic audits in the first semester of 2024 includes:
  - Know Your Customer (KYC) and implementation of reporting obligations to PPATK.
  - Risk Based Approach (RBA) AML/CFT tools from LPP.
  - Online Gambling
  - Green Financial Crime
  - Election

3. Pelaksanaan Survei penilaian risiko dilakukan PPATK pada sektor Penyedia Barang dan/ Jasa dan Profesi (PBJP) untuk mengukur sektor yang rentan dijadikan lahan pencucian uang.

3. Implementation of risk assessment surveys conducted by PPATK in the Designated non-financial Businesses and Professions sector to measure sectors that are vulnerable to money laundering.



4. Pelaksanaan Bimbingan Teknis untuk meningkatkan kemampuan pihak pelapor dalam melaksanakan *due diligence* dan pemantauan transaksi keuangan mencurigakan. PPATK telah melaksanakan 6 (enam) kegiatan bimbingan teknis dengan rincian 3 (tiga) kegiatan kepada PJK dan 3 (tiga) kegiatan kepada PBJP. Materi yang disampaikan meliputi tata cara registrasi organisasi, petugas administrator, dan petugas pelapor; tata cara pengkinian data Pihak Pelapor; dan tata cara pelaporan pada situs goAML.

4. Implementation of Technical Guidance to improve the ability of reporting parties in conducting due diligence and monitoring suspicious financial transactions. PPATK has conducted six technical guidance activities, with three for PJK and three for PBJP. The materials presented included procedures for the registration of organizations, administrator officers, and reporting officers; procedures for updating reporting party data; and procedures for reporting on the goAML website.

### STATISTIK BIMBINGAN TEKNIS Technical Guidance Statistics

Jenis Pihak Pelapor Type of Reporting Parties	Jumlah Bimbingan Teknis No of Technical Guidance	Jumlah Peserta No of Participant
PJK - Financial Service Provider	3	222
PBJP - the Designated non-financial Businesses and Professions	3	577

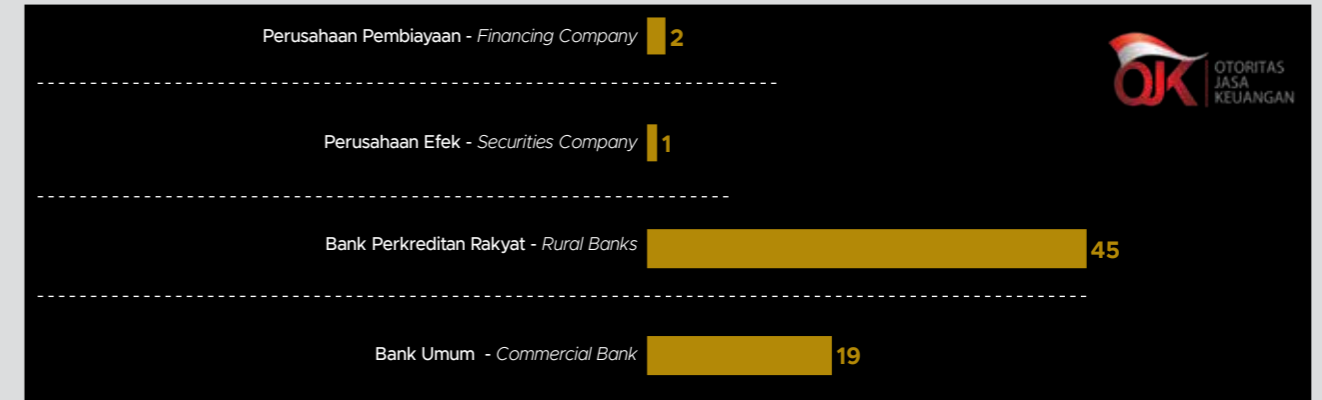
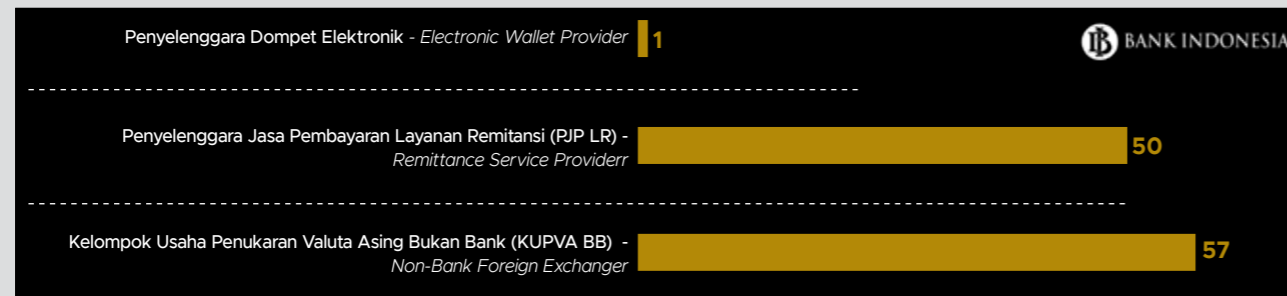




**PENGAWASAN KEPATUHAN - COMPLIANCE SURVEILLANCE**

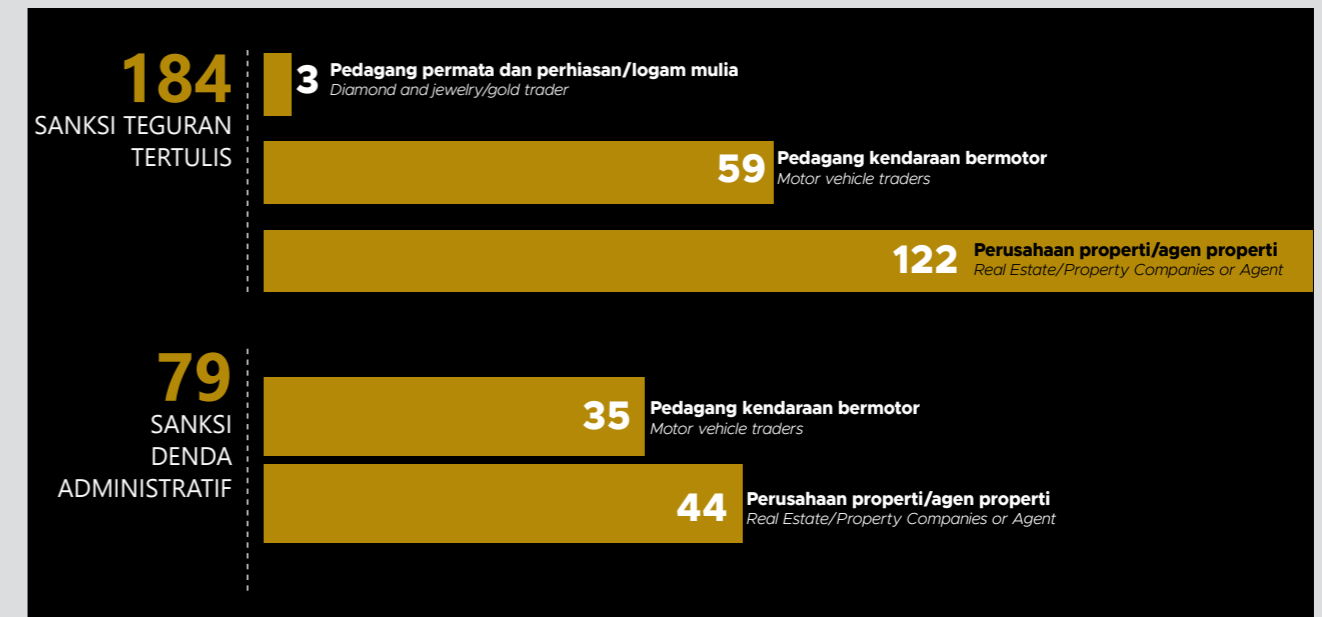
- Pelaksanaan Koordinasi dengan LPP untuk meningkatkan kepatuhan Pihak Pelapor. Pada semester 1 tahun 2024 PPATK telah melakukan koordinasi dengan P2PK Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM.
- Pada semester 1 tahun 2024 PPATK telah menyampaikan 2 (dua) dokumen rekomendasi pengenaan sanksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan 2 (dua) dokumen rekomendasi sanksi kepada Bank Indonesia dengan rincian sebagai berikut:
- Coordination with LPP to improve the compliance of the Reporting Parties. In the first semester of 2024, PPATK coordinated with the Center for Financial Professional Development of the Ministry of Finance and the Ministry of Law and Human Rights.
- In the first semester of 2024, PPATK submitted two documents recommending the imposition of sanctions to the Financial Services Authority and two documents recommending sanctions to Bank Indonesia.

No	Kelompok Industri Industry Group	Jumlah Pihak Pelapor Number of Reporting Parties	Jumlah Laporan Terlambat Number of Late Reports	Lembaga Pengawas dan Pengatur Supervisory and Regulatory Institutions
1	Bank Umum - Commercial Bank	19	4.578	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority
2	Bank Perkreditan Rakyat - Community Banks	45	64	
3	Perusahaan Efek - Securities Company	1	1	
4	Perusahaan Pembiayaan - Financing Company	2	9	
5	Kelompok Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) - Non-Bank Foreign Exchange	57	3.250	Bank Indonesia Bank of Indonesia
6	Penyelenggara Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR) - Remittance Service Provider	50	4.504	
7	Pengelola Dompot Elektronik - Electronic Wallet Provider	1	33	



Selain itu, atas keterlambatan penyampaian laporan oleh Pihak Pelapor, PPATK juga telah memberikan sanksi teguran tertulis kepada 184 (seratus tiga) Pihak Pelapor dan sanksi denda administratif kepada 79 (tujuh puluh sembilan) Pihak Pelapor.

Additionally, for the delay in submitting reports by the Reporting Parties, PPATK issued written warning sanctions to 184 Reporting Parties and administrative fines to 79 Reporting Parties.





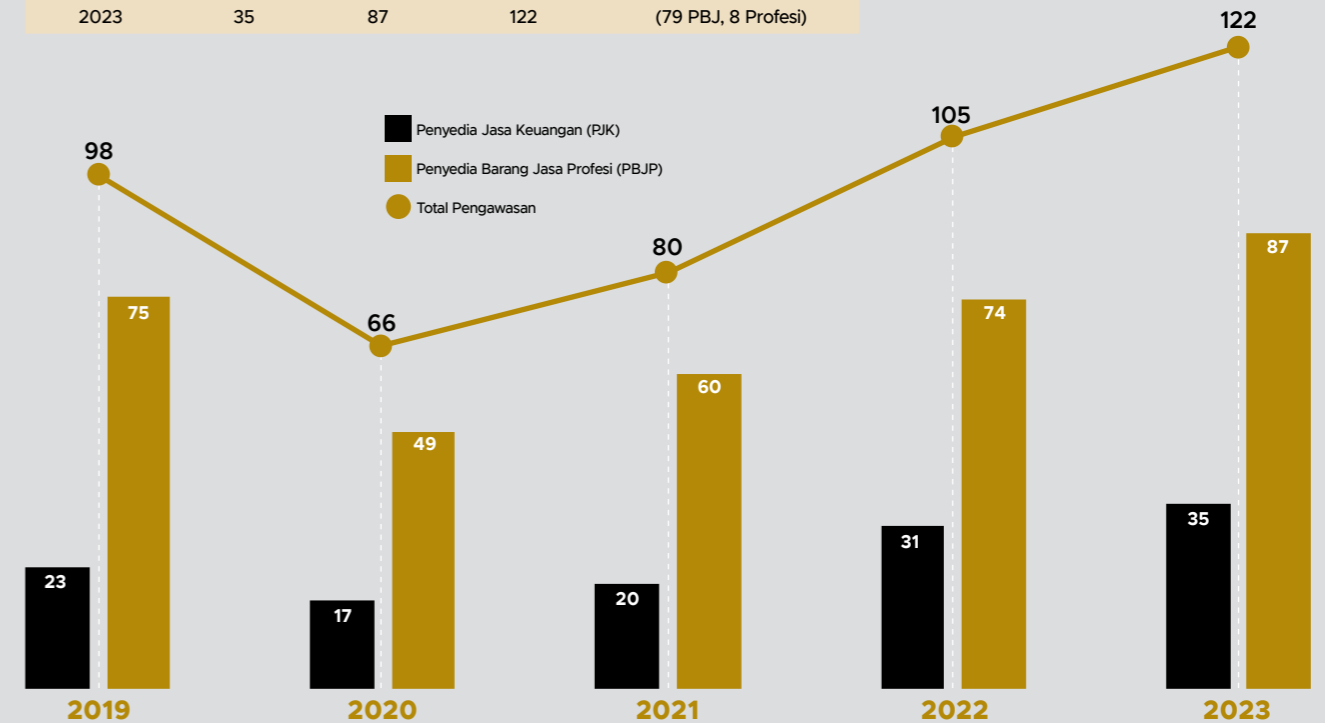
## STATISTIK AKTIVITAS PENGAWASAN KEPATUHAN 2019 - 2023

### STATISTICS ON COMPLIANCE MONITORING ACTIVITIES 2019 - 2023

Salah satu cara PPATK dalam mengawasi Kepatuhan Pihak Pelapor adalah dengan melakukan audit kepatuhan. Audit dapat dilakukan secara mandiri maupun secara *join audit* dengan Lembaga Pengawas Pengatur (LPP) pada setiap jenis kategori pihak pelapor.

One of the method PPATK use to oversee the compliance of reporting parties is by conducting compliance audits. These audits can be performed independently or as part of a joint audit with the Regulatory Supervisory Institution relevant to each category of reporting party.

Tahun	PJK	PBJP	Total	Keterangan
2019	23	75	98	(75 PBJ)
2020	17	49	66	(48 PBJ, 1 Profesi)
2021	20	60	80	(54 PBJ, 6 Profesi)
2022	31	74	105	(71 PBJ, 3 Profesi)
2023	35	87	122	(79 PBJ, 8 Profesi)





## ANALISIS & DISEMINASI

ANALYSIS & DISSEMINATION

### TEGAKKAN INDIKASI, DARI HASIL ANALISIS

"Establish Money Laundering Case from Analysis Results"

Undang-Undang mengamanatkan PPATK berhak melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain. Hasil dari analisis tersebut dikirimkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk memprosesnya dalam penyelidikan maupun penyidikan. Oleh karena itu, menjadi penting hasil analisis PPATK sebagai produk intelijen ditindaklanjuti oleh penegak hukum untuk penegakan indikasi TPPU maupun TPPT.

The law mandates that PPATK has the authority to analyze financial transactions that indicate money laundering and/or other criminal activities. The outcomes of these analyses are then disseminated to law enforcement agencies for further investigation and action. Consequently, the intelligence products resulting from PPATK's analyses play a crucial role in guiding law enforcement efforts aimed at eradicating money laundering and terrorism financing.



## TEGAKKAN INDIKASI, DARI HASIL ANALISIS

ESTABLISH MONEY LAUNDERING INDICATIONS FROM ANALYSIS RESULTS

**MENGUNGKAP** praktik pencucian uang dewasa ini, ibarat mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Sangat sukar ditemukan, hampir sia-sia dilakukan. Lantaran, pelaku semakin pintar mengelabui aparat, dengan memodifikasi modusnya. Namun, adanya produk intelijen yang dihasilkan PPATK, para penegak hukum sangat terbantu. Seperti menemukan benang merah yang ditarik dari dalam jerami. Membuat benderang motif, untuk menegakkan indikasi.

Ada tiga produk intelijen yang dihasilkan oleh PPATK. Yaitu, Hasil Analisis (HA), Hasil Pemeriksaan (HP) dan Informasi. Ketiga produk itu berdasarkan amanat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). PPATK memberikan produk-produk intelijen tersebut kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.

UNCOVERING money laundering practices today is akin to searching for a needle in a haystack. It is exceedingly challenging because perpetrators continually devise sophisticated methods to evade detection. However, the intelligence products produced by the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) significantly aid law enforcers, akin to finding a red thread amidst the haystack, thereby clarifying the indications for enforcement.

PPATK produces three primary intelligence products: Analysis Results (HA), Examination Results (HP), and Information. These products are mandated by Article 2, paragraph (1) of Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crime (TPPU). PPATK provides these intelligence products to law enforcement officials for further action, making the enforcement process more efficient and targeted.

**587** Laporan Intelijen Keuangan (Proaktif dan Reaktif)  
**Januari s.d Juni 2024**  
*Financial Intelligence Report (Proactive and Reactive) January to June 2024*

Rp **619,57** triliun

Nilai Total Transaksi  
**577 Hasil Analisis dan Informasi**

*Total transaction Value  
 577 Analysis Result and Information*

Rp **446,98** miliar

Nilai Total Transaksi  
**4 Hasil Pemeriksaan**

*Total Transaction Value  
 4 Examination Result*

**4.975** Permintaan Data ke pihak pelapor  
*Data request to the reporting party*

**3.817**

Penyedia Jasa Keuangan  
**Bank**  
*Bank Financial Services  
 Providers*

**1.152**

Penyedia Jasa Keuangan  
**Non-Bank**  
*Non-Bank Financial Services  
 Providers*

**6**

**Regulator** dan/atau  
 Instansi Lainnya  
*Regulators / other  
 Agencies*

**KETERANGAN:**

Pertukaran Informasi dengan *Financial Intelligence Unit* (FIU) di luar negeri dengan menyampaikan dan/atau menerima informasi berupa *Spontaneous Outgoing, Spontaneous Incoming, Outgoing Request, dan Incoming Request*.

*Notes:*  
 Information exchange with *Financial Intelligence Units* (FIUs) abroad is conducted by submitting and/or receiving information through spontaneous outgoing information, spontaneous incoming information, outgoing requests, and incoming requests.



Hasil Analisis, Informasi, dan Hasil Pemeriksaan

PRODUK INTELIJEN KEUANGAN	PROAKTIF	REAKTIF	TOTAL
Hasil Analisis	151	170	321
Hasil Pemeriksaan	3	1	4
Informasi	64	198	262
Total	218	369	587

KETERANGAN:

- **Hasil Analisis (HA):** Hasil Analisis yang disampaikan ke Apgakum.
- **Hasil Pemeriksaan (HP):** Hasil Pemeriksaan yang disampaikan kepada Apgakum.
- **Informasi:** Informasi yang disampaikan kepada Non APH termasuk dengan informasi seleksi jabatan strategis
- **Proaktif:** HA, HP dan Informasi proaktif yang disusun berdasarkan laporan yang diterima oleh PPATK
- **Reaktif:** HA, HP dan informasi reaktif yang disusun berdasarkan permintaan dari stakeholder

Permintaan Data dan/atau informasi kepada Pihak Pelapor, Regulator dan Instansi Terkait.

JENIS PERMINTAAN INFOMASI	JUMLAH
Permintaan Informasi	
a. Bank	3.817
b. Non Bank	1.152
c. Regulator/Instansi Lainnya	6
Total	4.975

Laporan Pertukaran Informasi antar FIU Luar Negeri

JENIS PERTUKARAN INFORMASI LN	JUMLAH
Spontaneous Outgoing	7
Spontaneous Incoming	7
Outgoing Request	11
Incoming Request	30
Total	55

- **Spontaneous Outgoing:** PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara proaktif.
- **Spontaneous Incoming:** PPATK menerima informasi proaktif dari FIU lain.
- **Outgoing Request:** PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU lain, dan PPATK menerima informasi yang diminta.
- **Incoming Request:** PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain, dan PPATK memberikan informasi yang diminta.

Analysis Result , Information, dan Examination Result

INTELLIGENCE PRODUCT	PROACTIVE	REACTIVE	TOTAL
Analysis Result	151	170	321
Examination Result	3	1	4
Information	64	198	262
Total	218	369	587

NOTES:

- **Analysis Result:** Analysis Report submitted to LEAs.
- **Examination Result:** Examination Report submitted to LEAs.
- **Information:** Information submitted to Non-LEAs including information related to job selection.
- **Proactive:** Intelligence Product based on report received by PPATK from reporting parties.
- **Reactive:** Intelligence Product based on request LEAs or stakeholder.

Data Requests to Reporting Parties, Regulators, and Related Agencies

INSTITUTION	No of Data Request
Information Request	
a. Bank	3.817
b. Non Bank	1.152
c. Regulator & Other Institution	6
Total	4.975

Information Exchange with Overseas FIUs

INFORMATION TYPE	No of Report
Spontaneous Outgoing	7
Spontaneous Incoming	7
Outgoing Request	11
Incoming Request	30
Total	55

- **Spontaneous Outgoing:** PPATK proactively sends intelligence reports to other FIUs.
- **Spontaneous Incoming:** PPATK receives proactive intelligence reports from other FIUs.
- **Outgoing Request:** PPATK sends a request for information to another FIU.
- **Incoming Request:** PPATK receives a request for information from another FIU.

KONTRIBUSI TERHADAP PENERIMAAN NEGARA

CONTRIBUTION TO STATE REVENUE

PPATK turut membantu penerimaan negara melalui dua Hasil Pemeriksaan atas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan atas dua Hasil Pemeriksaan tersebut telah berkontribusi pada penerimaan negara melalui denda sebesar **Rp1,35 miliar** dan uang pengganti **Rp12,5 miliar**. Selain itu uang tunai sejumlah **Rp67 juta** juga disita. (periode Januari s.d Juni 2024).

Selama periode Januari 2020 hingga Maret 2024, diketahui bahwa realisasi penerimaan negara dari produk intelijen keuangan PPATK yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak adalah sebesar **Rp10,05 triliun**. Selama periode tahun 2024, terdapat kenaikan realisasi penerimaan negara sebesar **Rp33,0 miliar** atas produk intelijen keuangan PPATK yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

PPATK also helps state revenue through two examination results on cases with issued court rulings. The verdicts on the two Examination Results have contributed to state revenue through fines of Rp1.35 billion and compensation of Rp12.5 billion. In addition, cash amounting to Rp 67 million was also confiscated. (period Jan to Jun 2024).

During the period January 2020 to March 2024, it is known that the realization of state revenue from PPATK's financial intelligence products submitted to the Directorate General of Taxes is IDR 10.05 trillion. During the period of 2024, there was an increase in the realization of state revenue of IDR 33.0 billion for PPATK financial intelligence products that have been submitted to the Directorate General of Taxes.

PUTUSAN ATAS DUA HASIL PEMERIKSAAN

(periode Jan s.d Jun 2024)

*Decision on two Inspection Results (period Jan to Jun 2024)*

**Rp1,35 Miliar** Denda

*Rp 1,35 billion of fine*

**Rp12,5 Miliar** Uang Pengganti

*Rp 12,5 billion of restitution*

**Rp67 Juta** Uang Tunai Sita

*Rp 67 million of confiscation*

REALISASI PENERIMAAN NEGARA

dari produk intelijen keuangan PPATK yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak

*Realization of state revenue from PPATK's financial intelligence products submitted to the Directorate General of Taxes*

**Rp10,05** triliun

Periode Januari 2020 hingga Maret 2024

*Rp 10.05 trillion in the period of January 2020 to March 2024*

**Rp33** miliar

Periode di Tahun 2024

*Rp33 billion for the Period in 2024*



# PEMANFAATAN PRODUK INTELIJEN KEUANGAN PPATK

## UTILIZATION OF PPATK FINANCIAL INTELLIGENCE PRODUCTS

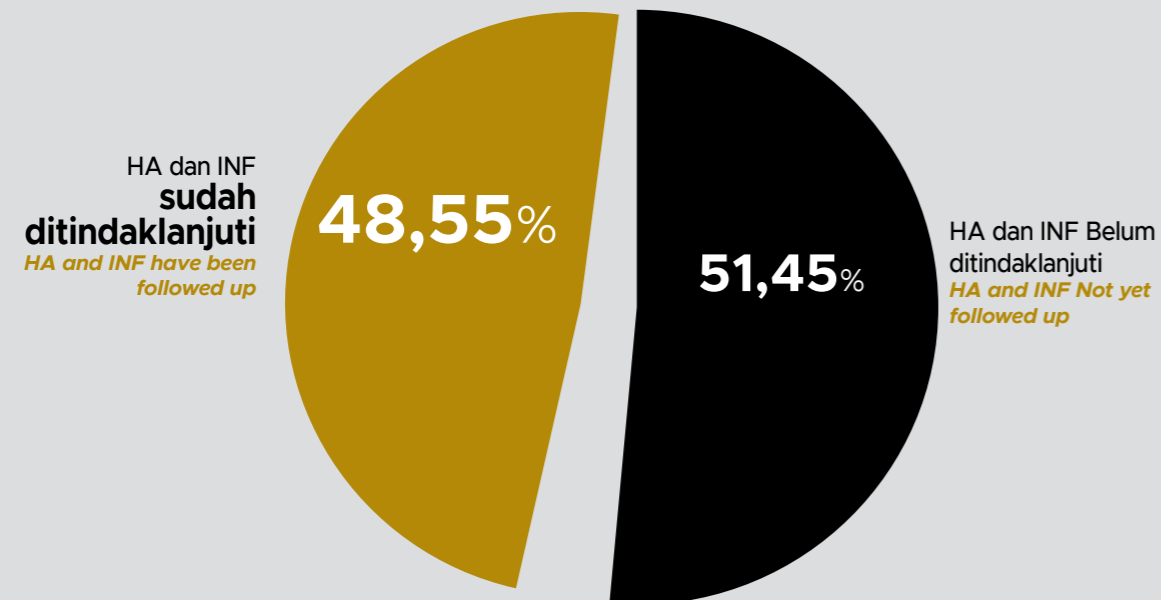
PPATK secara rutin melakukan pemantauan pemanfaatan atas Produk Intelijen Keuangan yang telah disampaikan ke Apgakum dan instansi terkait.

Selama periode Januari 2020 s.d Juni 2024, PPATK telah menerima 2.984 *feedback* tindak lanjut atas 5.343 Produk Intelijen Keuangan yang telah disampaikan.

Sebesar 2.594 (48,55%) Produk Intelijen Keuangan PPATK telah ditindaklanjuti oleh Apgakum dan Instansi terkait. Bentuk tindak lanjut yang dimaksud adalah dengan dimulainya proses penyelidikan atau proses yang setara berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh Produk Intelijen Keuangan PPATK.

PPATK consistently monitors the utilization of its Financial Intelligence Products, which are provided to law enforcement officials and other relevant agencies. From January 2020 to June 2024, PPATK disseminated 5,343 Financial Intelligence Products and received 2,984 feedback reports on their follow-up.

The monitoring results indicate that 2,594 (48.55%) of these Financial Intelligence Products have been actively followed up. The follow-up actions typically involve the initiation of investigation processes or equivalent procedures, leveraging the added value derived from the intelligence provided by PPATK. This underscores the significant role that PPATK's Financial Intelligence Products play in supporting law enforcement and enhancing the effectiveness of financial crime investigations.



## PENGUNGKAPAN PERKARA TPPU / DISCLOSURE OF MONEY LAUNDERING CASE

# JUDI ONLINE

## ONLINE GAMBLING

JUDI Online kian meresahkan. Banyak masyarakat yang semakin terjerat. Tidak pandang umur, ataupun jabatan. Setiap orang berpeluang terbuai judi *online*. PPATK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menganalisis transaksi mencurigakan, terus menelisik. Di bawah payung hukum, PPATK mengoptimalkan pemberantasan judi *online* melalui hasil analisisnya.

Selama periode Januari s.d. Juni 2024, PPATK melakukan analisis terkait dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perjudian. Total terdapat 10 Laporan Hasil Analisis dengan total akumulasi perputaran dana sebesar **Rp13,2 triliun**.

Hasil identifikasi PPATK, terdapat rekening-rekening penampungan yang digunakan untuk deposit dan *withdrawal* perjudian *online* serta terdapat rekening yang diduga untuk layering pencucian uang perjudian *online*.

PPATK kemudian melakukan henti transaksi atas dana yang diduga berasal dari hasil perjudian pada 4.566 total rekening dengan total saldo sebesar **Rp10,3 miliar**.

Dalam analisis PPATK, terdapat sebanyak 3.695 nama individu yang diduga terkait perjudian *online*. Dari jumlah tersebut, diketahui profil individu didominasi oleh profil wiraswasta (pedagang dan karyawan swasta), ibu rumah tangga, dan pelajar/mahasiswa. Adapun para pihak yang teridentifikasi melakukan deposit kepada rekening-rekening penampungan di atas memiliki berbagai macam profil, antara lain masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan masyarakat dengan profil lainnya seperti PNS, anggota legislatif, wiraswasta, dan lain-lain.

ONLINE gambling is increasingly troubling. Many people are increasingly entangled. Regardless of age, or position. Everyone has the opportunity to be lulled into online gambling. PPATK, as an institution that has the authority to analyze suspicious transactions, continues to investigate. Under the legal umbrella, PPATK optimizes the eradication of online gambling through the results of its analysis.

During the period January to June 2024, PPATK conducted an analysis related to alleged money laundering crimes originating from gambling crimes. There were a total of 10 Analysis Reports with a total accumulated turnover of Rp13.2 trillion.

The results of PPATK identification, there are escrow accounts used for online gambling deposits and withdrawals and there are accounts suspected of layering online gambling money laundering.

PPATK then stopped transactions on funds suspected of originating from gambling proceeds in 4,566 total accounts with a total balance of IDR 10.3 billion.

In PPATK's analysis, there are 3,695 individual names suspected of being related to online gambling. Of these, it is known that individual profiles are dominated by self-employed profiles (traders and private employees), housewives, and students. The parties identified as making deposits to the above escrow accounts have a variety of profiles, including lower middle income people and people with other profiles such as civil servants, legislative members, entrepreneurs, and others.



# NARKOTIKA

## NARCOTICS

**DUGAAN** tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba terus terendus oleh PPATK. Dari hasil analisis dan hasil pemeriksaan, terdapat 41 laporan yang terindikasi pencucian uang dari tindak pidana narkoba. Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan ini merupakan pengembangan dari jaringan narkoba "FP" dan jaringan narkoba yang beroperasi di Kalimantan dengan total pihak terlapor sebanyak 109 entitas.

Pada 41 laporan tersebut, diketahui bahwa total perputaran dana adalah sebesar Rp16,08 triliun. Dari total perputaran dana tersebut, diketahui sebanyak Rp3.06 triliun merupakan total perputaran dana dari dugaan tindak pidana jaringan narkoba yang beroperasi di Kalimantan.

Jaringan tersebut terindikasi melakukan transaksi terkait narkoba dan pencucian uang menggunakan

**ALLEGATIONS** of money laundering derived from narcotics crimes continue to be detected by PPATK. From the results of the analysis and examination results, there are 41 reports that indicate money laundering from narcotics crimes. The results of this analysis and examination are the development of the "FP" narcotics network and narcotics networks operating in Kalimantan with a total of 109 reported parties.

It is found that the total turnover of funds in the 41 reports is IDR 16.08 trillion. Of the total turnover of funds, it is known that as much as IDR 3.06 trillion is the total turnover of funds from alleged criminal acts of narcotics networks operating in Kalimantan.

The network is indicated to have carried out narcotics-related transactions and money laundering using personal

rekening pribadi untuk menampung dan mentransfer dana hasil tindak pidana narkoba sejak periode 2020-2023.

Selain itu, terdapat dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh narapidana Lembaga Perasyarakatan (Lapas) di daerah X yang diduga menggunakan rekening beberapa pihak untuk menempatkan/menyembunyikan/menyamarkan uang hasil tindak pidana narkoba. Dari hasil penelusuran, PPATK juga menemukan indikasi transaksi pembelian aset yang dananya diduga berasal dari hasil tindak pidana narkoba jaringan Lapas di daerah X yang terinformasi terdapat pembelian Properti, Kendaraan Bermotor, Perhiasan, Peralatan Elektronik dan dan lain-lain.

Dalam dugaan tindak pidana narkoba di atas, terdapat sebanyak 39 nama terlapor perorangan yang terkait dengan jaringan narkoba yang beroperasi di Kalimantan. Dari jumlah tersebut, diketahui profil perorangan didominasi oleh profil wiraswasta (pedagang, pemilik usaha, dan karyawan swasta).

accounts to accommodate and transfer funds from narcotics crimes since the period 2020-2023.

In addition, there are allegations of money laundering crimes originating from narcotics crimes committed by prisoners of the Correctional Institution (Lapas) in area X who allegedly used the accounts of several parties to place / hide / disguise the proceeds of narcotics crimes. From the results of the search, PPATK also found indications of asset purchase transactions whose funds were allegedly derived from the proceeds of narcotics crimes of the prison network in area X which were informed that there were purchases of property, motor vehicles, jewelry, electronic equipment and others.

In the alleged narcotics crime above, there are 39 names of reported individuals associated with narcotics networks operating in Kalimantan. Of these, it is known that the individual profile is dominated by self-employed profiles (traders, business owners, and private employees).



## PERAN PPAK DALAM MENJAGA PEMILU BERSIH 2024

PPAK'S ROLE IN GUARDING CLEAN ELECTIONS 2024

PPAK turut berkontribusi dalam mengawal pemilu bersih tahun 2024. Selama periode Januari sd Mei 2024, PPAK telah menyampaikan Informasi terkait Pemilu diantaranya: 37 Informasi disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), 1 Informasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan 1 Informasi kepada Badan Intelijen Strategis TNI.

PPAK contributes to guarding clean elections in 2024. During the period January to May 2024, PPAK has submitted election-related information including: 37 Information submitted to the General Election Supervisory Agency (Bawaslu), 1 Information to the General Election Commission (KPU), and 1 Information to the TNI Strategic Intelligence Agency.



## PENGHENTIAN SEMENTARA TRANSAKSI TERKAIT TINDAK PIDANA

### TEMPORARY SUSPENSION OF TRANSACTIONS RELATED TO CRIMINAL OFFENSES

PPATK melakukan Penghentian Sementara Transaksi pada periode Januari s.d Juni 2024 terhadap 4.891 rekening dengan total dana yang dihentikan sejumlah Rp552 miliar, dengan detail sebagai berikut:

PPATK conducted Temporary Suspension of Transactions in the period January to June 2024 on 4,891 accounts with a total of Rp 552 billion in suspended funds, with the following details:

### Tindak Pidana Korupsi

230 Rekening

IDR 301.947.056.684

Euro 213

SGD 28.010

USD 4.096.852

Type of Crime	Account Suspended	Total Value	Currency
Corruption	230	301.947.056.684	IDR
		213	Euro
		28.010	SGD
		4.096.852	USD
Narcotics	65	240.022.131.406	IDR
Gambling	4.566	10.395.696.608	IDR
Scam	14	35.000.813	IDR
Others	16	122.916.144	IDR

### Tindak Pidana Narkotika | 65 Rek

IDR 240.022.131.406

### Tindak Pidana Perjudian | 4.566 Rek

IDR 10.395.696.608

### Tindak Pidana Penipuan | 14 Rek

IDR 35.000.813

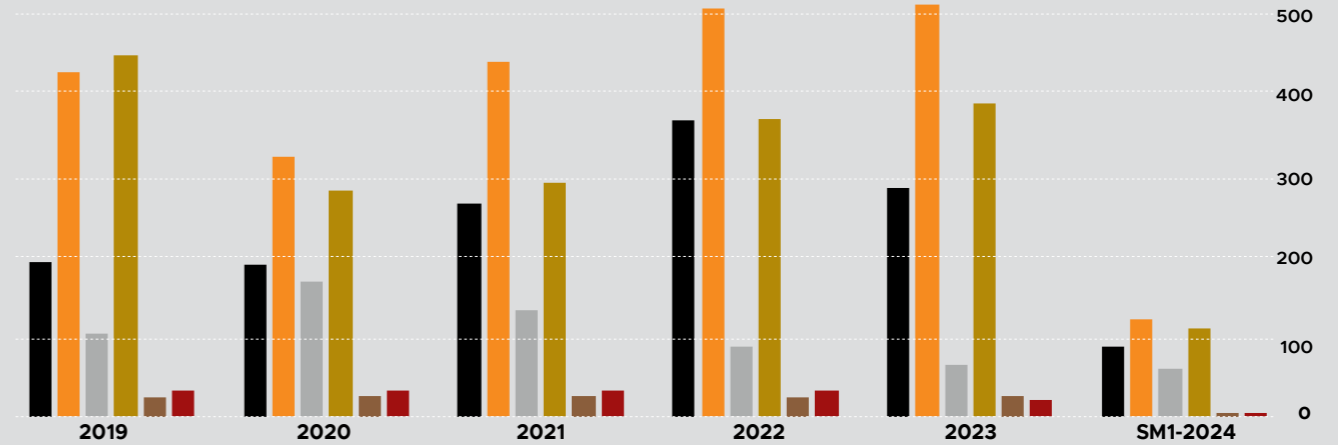
### TP Lainnya | 16 Rek

IDR 122.916.144



## STATISTIK PRODUK INTELIJEN PERIODE 2019-2023

### INTELLIGENCE PRODUCT STATISTICS 2019-2023 PERIOD



Tahun	HA Proaktif	HA Reaktif	INF Proaktif	INF Reaktif	HP	Spontaneous Outgoing Information
2019	195	437	105	458	24	71
2020	193	330	171	286	25	56
2021	270	450	135	296	25	101
2022	376	518	88	378	24	43
2023	290	522	66	397	25	21
2024	88	123	60	111	4	4

- HA Proaktif
- HA Reaktif
- INF Proaktif
- INF Reaktif
- HP
- Spontaneous Outgoing Information

Produk Intelijen PPATK seperti Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan merupakan laporan yang berisi transaksi keuangan yang diduga terkait dengan TPPU ataupun tindak pidana lainnya. Hal ini sangat krusial bagi aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi aliran dana yang berasal dari hasil tindak pidana

PPATK Intelligence Products such as Analysis Results and Examination Results are reports containing financial transactions suspected of being related to ML or other criminal offenses. This is very crucial for law enforcement officials to identify the flow of funds originating from the proceeds of criminal acts.



# STRATEGI & KERJASAMA

STRATEGY & COLLABORATIONS

## BERSINERGI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN "COLLABORATE WITH STAKEHOLDERS "

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPATK melibatkan para pemangku kepentingan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pelibatan menyeluruh tersebut semata untuk efektivitas penanganan praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme yang semakin hari kian masif. Pada skala domestik, PPATK bersinergi dengan berbagai *stakeholders* dalam negeri yang terdiri atas Lembaga Pengawas dan Pengatur, Penegak Hukum, Kementerian/Lembaga, dan Pihak Pelapor. Dalam upaya mengoptimalkan koordinasi pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM, PPATK selaku sekretariat Komite TPPU aktif menjalin kerja sama dengan seluruh Kementerian/Lembaga anggota Komite TPPU. Pada skala internasional, PPATK telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam lingkup bilateral, regional, hingga multilateral.

In fulfilling its duties and functions, PPATK engages stakeholders both domestically and internationally. This extensive involvement is aimed solely at effectively addressing the increasingly widespread practices of money laundering and terrorism financing. Domestically, PPATK synergizes with various stakeholders, including Supervisory and Regulatory Institutions, Law Enforcement Agencies, Government Ministries/Agencies, and Reporting Parties. In an effort to optimize the coordination of prevention and eradication of ML, TF, and PF, PPATK, as the secretariat of the National Coordinating Committee, actively collaborates with all Ministries and Government Agencies that are members of the Committee. Internationally, PPATK has conducted numerous activities within bilateral, regional, and multilateral frameworks.



## AGAR TALI KERJA SAMA SEMAKIN KUAT

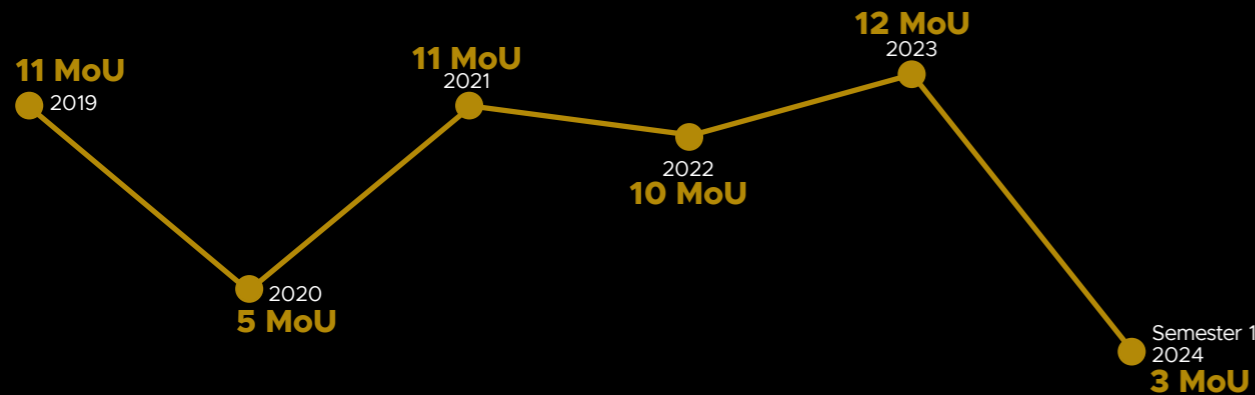
### FOR STRONGER COLLABORATION

UPAYA pemberantasan praktik kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme, tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan usaha bersama dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari para pemangku kepentingan, pihak pelapor, kementerian/lembaga dan masyarakat. Agar ikhtiar tersebut efektif dan masif, PPATK menjalin beragam kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Adapun kerja sama dalam negeri, tugas dan kewenangannya dilakukan oleh Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri PPATK. Dimana dalam Semester I Tahun 2024 ini, berbagai aktivitas kerjasama dalam negeri telah dilaksanakan untuk memperkuat sinergi antar instansi dalam berbagai sektor. Fokus utama adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme” yang berasal dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan teknologi finansial.

Efforts to eradicate money laundering and terrorism financing require a collaborative approach involving a wide array of stakeholders, including reporting parties, ministries, institutions, and the community. For these efforts to be effective and extensive, PPATK establishes various collaborations both domestically and internationally.

The Directorate of Domestic Strategy and Cooperation oversees these duties and authorities. In the first semester of 2024, numerous domestic cooperation activities were conducted to strengthen synergies among agencies across various sectors. The primary focus is on law enforcement and crime prevention, including combating human trafficking and money laundering.



Statistik MoU Periode 2019 sd Semester 1 2024

MoU Statistics for the Period 2020 to Semester 1 2024

## PROGRAM MENTORING BERBASIS RISIKO (PROMENSISKO) 2024

### RISK-BASED MENTORING PROGRAM (PROMENSISKO) 2024

Program Mentoring Berbasis Risiko (Promensisko) merupakan program yang dibentuk dengan maksud untuk memberikan pemahaman mengenai substansi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pada Tahun 2024, PPATK menyelenggarakan Promensisko dengan dua tema yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) pada Teknologi Finansial dan Penilaian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pendanaan Terorisme yang berasal dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tindak Pidana Penyelundupan Migran dan Penyelundupan Tenaga Kerja. Program ini sebagai tindak lanjut atas hasil penyusunan *Sectoral Risk Assesment* yang telah disusun pada tahun 2023, serta respon terhadap Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) Nomor 15 yang menekankan perlunya perhatian khusus terhadap ancaman yang timbul dari teknologi baru atau sedang berkembang.

Promensisko, dilaksanakan di Yogyakarta (14-16 Februari 2024), diikuti oleh sejumlah Lembaga Penegak Hukum, Regulator, Stakeholders, dan Pihak Pelapor dengan jumlah 985 peserta.

The Risk-Based Mentoring Program (Promensisko) was established to provide a comprehensive understanding of the risks associated with money laundering and terrorism financing. In 2024, PPATK organized Promensisko with two primary themes: Money Laundering Crime (ML) and Terrorism Financing Crime (TPPT) in Financial Technology, and the Assessment of Money Laundering Crime (ML) and Terrorism Financing Crime originating from Trafficking in Persons (TPPO), Migrant Smuggling, and Labor Smuggling. This program is a follow-up to the Sectoral Risk Assessment results prepared in 2023 and a response to the Financial Action Task Force (FATF) Recommendation Number 15, which emphasizes the need for special attention to threats arising from new or emerging technologies.

Promensisko, held in Yogyakarta from February 14-16, 2024, was attended by various Law Enforcement Agencies, Regulators, Stakeholders, and Reporting Parties, totaling 985 participants.



## KEGIATAN KOMITE TPPU

### AML/TF NATIONAL COORDINATION COMMITTEE ACTIVITIES

SELAMA periode Januari–Juni 2024, Komite TPPU telah melakukan pelaksanaan rapat sebanyak 4 kali pertemuan yang membahas penyusunan dan penetapan dokumen Rencana Aksi Strategi Nasional TPPU, TPPT, dan PPSPM tahun 2024 dan Penyusunan Strategi Nasional TPPU, TPPT, dan PPSPM Periode 2025-2029.

Beberapa pencapaian strategis Komite TPPU selama Semester I Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Peluncuran Laporan Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi

THE Anti-Money Laundering Committee convened four times in the first half of 2024 to discuss the preparation and establishment of the AML/CFT/CP National Strategy Action Plan for 2024 and to begin drafting the National Strategy for the 2025-2029 period.

Strategic Achievements of the ML/TF Committee:

1. Launch of the 2024 Action Plan Report on the National Strategy for the Prevention and Eradication of Money Laundering, Terrorism Financing, and Proliferation Financing of Weapons of Mass

Senjata Pemusnah Massal Tahun 2024 di Istana Negara bersama Bapak Presiden RI dan pihak pemangku kepentingan.

2. Pembahasan Awal Rencana Perumusan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2025-2029 bersama BAPPENAS dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Pelaksanaan pengembangan tahap II pada Sistem Pelaporan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (SIPENAS) dan rencana pembangunan pusat atau portal informasi APU-PPT Nasional melalui *Indonesia National Coordination and Cooperation Hub on ML/TF/PF*.

Destruction at the State Palace with the President of the Republic of Indonesia and stakeholders.

2. Initial Discussion on the Formulation of the 2025-2029 National Strategy for the Prevention and Eradication of Money Laundering, Terrorism Financing, and Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction with BAPPENAS and the Corruption Eradication Commission.
3. Implementation of the second phase of the development of the National Strategy Reporting System (SIPENAS) and the plan for the establishment of a national APU-PPT information center or portal through the Indonesia National Coordination and Cooperation Hub on ML/TF/PF.



## PENYUSUNAN PENILAIAN RISIKO SEKTORAL (SRA)

### DEVELOPMENT OF SECTORAL RISK ASSESSMENT (SRA)

PADA tahun 2024, PPAATK bersama seluruh pihak pemangku kepentingan telah melakukan pelaksanaan Penilaian Risiko Sektor TPPU dan TPPT pada Tindak Pidana Siber (SRA Siber) serta Penilaian *Shadow Economy* pada Area Berisiko Tinggi TPPU di Sektor Sumber Daya Alam. Hal ini sebagai respon terhadap perkembangan tindak pidana siber sebagai kejahatan terorganisasi transnasional yang semakin berkembang, pemetaan dan mitigasi *shadow economy*, dan optimalisasi penanganan TPPU.

In 2024, PPAATK, together with all stakeholders, carried out Sectoral Risk Assessments (SRA) for money laundering and terrorism financing in the areas of Cyber Crime and the Shadow Economy in high-risk areas within the Natural Resources Sector. This initiative responds to the growing threat of cyber crime as a transnational organized crime, as well as the need to map and mitigate the shadow economy and optimize the handling of money laundering cases.

## PELAKSANAAN IDENTIFIKASI NPO

### IMPLEMENTATION OF NPO IDENTIFICATION

BERDASARKAN hasil laporan MER FATF Indonesia Tahun 2023, diketahui bahwa Indonesia masih memiliki defisiensi utama pada kepatuhan teknis rekomendasi 8 dan *Immediate Outcome* (IO) 10 mengenai Organisasi Kemasyarakatan/*Non-Profit Organization* (NPO). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan secara signifikan terhadap NPO di Indonesia, diantaranya pelaksanaan identifikasi NPO di Indonesia sesuai defisini FATF, penilaian risiko individual NPO disalahgunakan sebagai sarana pendanaan terorisme, program pengawasan dan penjangkauan terhadap NPO untuk memitigasi NPO disalahgunakan sebagai sarana pendanaan terorisme.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan PPAATK dalam rangka penanganan NPO, sebagai berikut:

- Pelaksanaan program pendampingan dari kemitraan *Uni Eropa Global Facility on AML and CFT*;
- Kick-off meeting dengan pihak internal dan eksternal;
- Rapat Pembahasan Identifikasi Organisasi Kemasyarakatan atau Non-Profit Organization (NPO) Sesuai

Based on the findings of Indonesia's FATF Mutual Evaluation Report (MER) 2023, Indonesia still faces significant deficiencies in technical compliance with Recommendation 8 and Immediate Outcome (IO) 10 regarding Non-Profit Organizations (NPOs). Therefore, substantial improvements are required for Non-Profit Organizations (NPOs) in Indonesia. This includes identifying Indonesian NPOs according to the FATF definition, assessing the risk of individual NPOs being misused for terrorism financing, and implementing supervision and outreach programs to mitigate the risk of NPOs being exploited for such purposes.

To address these issues, PPAATK has undertaken several activities aimed at improving the handling of NPOs:

- Implementation of an assistance program in partnership with the European Union Global Facility on AML and CFT.
- Kick-off meetings with internal and external stakeholders.
- Discussion meetings on the identification of NPOs in

Definisi *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF);

- Pembentukan Tim Kolaboratif Identifikasi dan Penilaian Risiko Tindak Pidana Pendanaan Terorisme melalui Non-Profit Organization, sesuai Surat Keputusan Kepala PPAATK Nomor 376 Tahun 2024; dan
- Pengumpulan data dan informasi NPO dari seluruh pihak pemangku kepentingan terkait.

accordance with the Financial Action Task Force (FATF) definition.

- Establishment of a Collaborative Team for the Identification and Risk Assessment of Terrorism Financing through Non-Profit Organizations, in accordance with Decree of the Head of PPAATK Number 376 of 2024.
- Collection of data and information on NPOs from all relevant stakeholders.



## PENGELOLAAN KERJA SAMA DALAM NEGERI (MOU)

### DOMESTIC COOPERATION MANAGEMENT (MOU)

Dalam rangka peningkatan kerja sama dan sinergi untuk mencapai tujuan strategis PPATK, pada Januari – Juni 2024 PPATK telah melakukan beberapa kerja sama dengan kementerian/lembaga lain, sebagai berikut:

1. Perjanjian kerja sama antara PPATK dengan Kejaksaan Agung tentang Pelaksanaan Pertukaran Data dan/atau Informasi Terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Asal dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
2. Nota Kesepahaman antara PPATK dengan Asosiasi Real Estate Broker Indonesia tentang Kerja Sama Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
3. Nota Kesepahaman antara PPATK dengan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penguatan Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan
4. Perjanjian Kerja Sama antara PPATK dengan Direktorat Jenderal Imigrasi tentang Pertukaran Informasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
5. Nota Kesepahaman antara PPATK dengan Kementerian Dalam Negeri tentang Sinergi Tugas dan Fungsi Di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian.

To enhance cooperation and synergy in achieving PPATK's strategic goals, from January to June 2024, PPATK has established several collaborations with other ministries and institutions:

1. A cooperation agreement with the Attorney General's Office regarding the implementation of information exchange related to the prevention and combating of money laundering crimes, predicate offenses, and terrorism financing.
2. A Memorandum of Understanding with the Indonesian Real Estate Brokers Association on cooperation in the prevention and eradication of money laundering and terrorism financing crimes.
3. A Memorandum of Understanding with the Financial Services Authority to strengthen coordination in the implementation of duties, functions, and authorities.
4. A cooperation agreement with the Directorate General of Immigration on information exchange in the context of preventing and eradicating money laundering and terrorism financing crimes.
5. A Memorandum of Understanding with the Ministry of Home Affairs on the synergy of duties and functions in domestic governance and the prevention and eradication of money laundering crimes.



Penandatanganan MoU PPATK dan Asosiasi Real Estate Broker Indonesia  
MoU Signing between PPATK and Indonesian Real Estate Brokers Association



## PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PRODUK INTELIJEN PPATK

### MONITORING THE FOLLOW-UP OF PPATK INTELLIGENCE PRODUCTS

Selama periode Januari–Juni 2024 PPATK telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan tindak lanjut dari HA/HP/INF yaitu:

- Menyampaikan surat permohonan tindak lanjut (*feedback*) kepada seluruh instansi penerima Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan dan Informasi yang belum menyampaikan informasi tindak lanjut;
- Melaksanakan koordinasi bilateral terhadap instansi penerima produk intelijen PPATK;
- Pelaksanaan kegiatan Asistensi Penanganan Perkara;
- Menyusun SK Tim Kerja Pemantauan Tindak Lanjut atas Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan dan Informasi Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

From January to June 2024, PPATK has undertaken several activities to enhance the follow up on PPATK's intelligence products. These activities include:

- Requesting follow-up from recipients of PPATK intelligence products, including the type of actions taken;
- Engaging in bilateral coordination with recipient agencies of PPATK intelligence products;
- Conducting case handling assistance activities;
- Preparing the Decree of the Working Team on Follow-up Monitoring of Analysis Report, Examination Report, and Information on Alleged Money Laundering and Terrorism Financing Crimes.



## KOORDINASI DAN ASISTENSI

### COORDINATION AND ASSISTANCE

Selama periode Januari s.d. Juni 2024, PPATK telah menyelenggarakan kegiatan koordinasi sebanyak 73 pertemuan dalam rangka penanganan perkara, permintaan informasi transaksi keuangan dan pendalaman atas tindak lanjut laporan hasil analisis atau pemeriksaan PPATK. Selanjutnya, PPATK juga telah melaksanakan asistensi penanganan perkara sebanyak empat kegiatan yang dilaksanakan di berbagai wilayah, yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan Jawa Timur.

From January to June 2024, PPATK organized 73 coordination activities focused on case handling, financial transaction information requests, and enhancing follow-up on PPATK analysis or examination reports. Additionally, PPATK provided case handling assistance in four regions: North Sumatra, South Sulawesi, West Sumatra, and East Java.

### STATISTIK ASISTENSI PENANGANAN PERKARA

#### Statistics on Case Handling Assistance



## KOORDINASI DAN PELAKSANAAN UPAYA DISRUPSI PENCUCIAN UANG, PENDANAAN TERORISME, DAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

COORDINATION AND DISRUPTION OF MONEY LAUNDERING, TERRORISM FINANCING, AND PROLIFERATION FINANCING



Pelaksanaan Koordinasi dalam upaya disrupsi terkait TPPU, TPPT dan PPSM  
Implementation of Coordination in disruption efforts related to ML, TPPT and PPSM

Selama periode semester 1 tahun 2024, Satgas DTTOT telah memperoleh capaian strategis, antara lain:

- Pelaksanaan rapat Satgas DTTOT dengan pembahasan terkait penyusunan indikator individu dan entitas yang direkomendasikan masuk ke dalam DTTOT dan pengembangan aplikasi DTTOT; dan
- Perpanjangan pencantuman identitas individu/korporasi ke dalam DTTOT

Adapun capaian strategis Satgas PPSPM selama periode semester 1 tahun 2024, antara lain:

- pelaksanaan rapat Satgas PPSPM terkait implikasi atas perubahan ketentuan mengenai targeted financial sanctions atas Iran berdasarkan UNSCR 2231;
- amandemen dan penetapan Keputusan Kepala PPAK mengenai pembaruan Daftar PPSPM terkait dengan orang dan korporasi DPRK
- koordinasi penanganan pemblokiran aset secara serta merta atas milik orang atau korporasi yang terindikasi pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

During the first semester of 2024, the DTTOT Task Force achieved several strategic milestones:

- Held meetings to discuss the preparation of individual and entity indicators recommended for inclusion in the DTTOT and the development of the DTTOT application.
- Extended the inclusion of individual and corporate identities into the DTTOT.

Additionally, the PPSPM Task Force achieved the following during the same period:

- Conducted meetings to address the implications of changes regarding targeted financial sanctions on Iran based on UNSCR 2231.
- Amended and updated the Decree of the Head of PPAK concerning the PPSPM List related to DPRK persons and corporations.
- Coordinated immediate asset blocking of persons or corporations suspected of funding the proliferation of weapons of mass destruction.



## PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)

### PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP)

Selama periode semester 1 tahun 2024, tim tactical hub PPP telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti:

- a. Pelaksanaan rapat tim tactical hub PPP "project 2" terkait green financial crime sektor pertambangan

During the first semester of 2024, the PPP tactical hub team accomplished several key activities:

- a. Conducted a meeting for "Project 2" on green financial crime in the mining sector, focusing on the preparation

yang membahas penyusunan operational alert (OA); dan

- b. Pelaksanaan focus group discussion (FGD) yang membahas penyusunan operational alert (OA) "project 1" terkait investment fraud di sektor koperasi dan "project 2" terkait green financial crime di sektor pertambangan.

of operational alerts (OAs).

- b. Held focus group discussions (FGDs) to prepare operational alerts (OAs) for "Project 1" related to investment fraud in the cooperative sector and "Project 2" related to green financial crime in the mining sector.



Koordinasi Kemitraan pemerintah dan swasta  
(public private partnership)



## KOORDINASI IMPLEMENTASI DAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEPATUHAN INDONESIA ATAS STANDAR DAN KONVENSI INTERNASIONAL

COORDINATION OF IMPLEMENTATION AND ASSESSMENT OF INDONESIA'S COMPLIANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS AND CONVENTIONS

Pada periode semester 1 tahun 2024, PPATK telah melaksanakan satu kali focus group discussion (FGD) terkait penyusunan dokumen Follow Up Report (FUR) Indonesia untuk dilaporkan kepada FATF secretariat.

In the first semester of 2024, PPATK conducted a focus group discussion (FGD) focused on preparing Indonesia's Follow-Up Report (FUR) to be submitted to the FATF secretariat.



Koordinasi Implementasi dan pelaksanaan penilaian kepatuhan Indonesia atas standar dan konvensi internasional  
*Coordination of the implementation and assessment of Indonesia's compliance with international standards and conventions*



## BERANTAS LINTAS NEGARA

### COMBATING TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME

Kejahatan pencucian uang dan aktivitas teroris merupakan *transnational organized crime* (TOC). TOC merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan secara lintas negara dan terorganisir. Untuk memberantas kejahatan tersebut, perlu menggandeng semua pihak mancanegara. Oleh karenanya, kerja sama internasional memainkan peran krusial dalam penegakan TPPU. Kerja sama internasional menjadi praktik yang penting untuk dijalankan, baik dalam lingkup bilateral, regional, hingga multilateral. PPAJK, sebagai lembaga sentral dalam penegakan TPPU di Indonesia, memainkan peran penting dalam kerja sama internasional yang meliputi proses pertukaran informasi, koordinasi investigasi, penegakan hukum lintas negara, hingga upaya *asset recovery*.

Pertukaran informasi antar negara mempermudah pelacakan aliran dana ilegal yang melintasi batas-

MONEY laundering and terrorist activities constitute transnational organized crime (TOC), involving organized and cross-border criminal acts. Eradicating these crimes requires cooperation with international partners across various fronts. International cooperation is pivotal in combating money laundering (ML) and terrorism financing (TF), encompassing bilateral, regional, and multilateral initiatives. PPAJK, as Indonesia's central institution in ML enforcement, plays a critical role in international cooperation through information exchange, coordinated investigations, cross-border law enforcement, and asset recovery efforts.

Information exchange among countries facilitates tracking illicit fund flows across borders. Through international bodies like FATF, Egmont Group, and APG, countries share data, strategies, and trends in ML to better identify, prevent, and eradicate these activities.

batas negara. Melalui organisasi internasional seperti FATF, Egmont, dan APG, negara-negara dapat berbagi data, strategi, informasi, dan tren terkini TPPU guna mengidentifikasi, mencegah, dan memberantas segala bentuk aktivitas pencucian uang secara lebih efektif.

Dengan kerja sama internasional, koordinasi investigasi antar negara dapat diimplementasikan guna mengatasi kompleksitas kasus TPPU yang melibatkan jaringan internasional. Berkat kolaborasi yang terbangun, aparat penegak hukum dapat mengumpulkan bukti yang lebih kuat dan menyusun strategi dalam mengungkap kasus TPPU secara lebih efektif.

Peran kerja sama internasional semakin luas setelah Indonesia menjadi anggota FATF pada Oktober 2023. Sebagai anggota, Indonesia ikut mewarnai rezim APU-PPT PPSPM global melalui pemberian masukan dalam proses revidi rutin terhadap rekomendasi dan standar FATF. Sebagai anggota, Indonesia juga terlibat dalam proses penentuan *listing/delisting* daftar hitam/daftar abu-abu FATF dan proses pencalonan pimpinan FATF.

International cooperation also facilitates coordinated investigations across borders to tackle complex ML cases involving international networks. Collaboration enables law enforcement to gather robust evidence and strategize effectively in uncovering and prosecuting ML cases.

Indonesia's role in international cooperation significantly expanded after becoming a FATF member in October 2023. As a member, Indonesia contributes to the global AML-CFT-CP regime by providing input in FATF's regular review processes of recommendations and standards. Indonesia also participates in determining the listing/delisting of countries in the FATF blacklist/grey list and in nominating candidates for FATF leadership positions. This membership enhances Indonesia's ability to influence global efforts against ML, TF and PF while reinforcing its commitment to international standards and cooperation in combating transnational organized crime.



## PARTISIPASI KEGIATAN FORUM INTERNASIONAL

### PARTICIPATION IN INTERNATIONAL FORUM ACTIVITIES

Selama periode semester pertama tahun 2024, PPATK telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam lingkup bilateral, regional, hingga multilateral guna makin mengoptimalkan eksposur internasional PPATK. Aktivitas kerja sama internasional PPATK diawali dengan partisipasi aktif dalam kegiatan *Egmont Working Group Meeting* di Malta pada Februari 2024. Delegasi PPATK dalam forum tersebut berperan penting dalam mengusahakan keikutsertaan FIU Timor Leste dalam sidang *Head of Financial Intelligence Unit* (HoFIU) untuk pertama kalinya. Hal ini menjadi kulminasi upaya PPATK dalam membantu FIU Timor Leste bergabung sebagai anggota *The Egmont Group*.

Dalam konteks partisipasi PPATK dalam forum FATF, PPATK secara resmi menjadi host dalam kegiatan *Asia-Pacific Joint-Group ICRG Meeting*, yang merupakan salah satu forum strategis FATF di Bali, pada Mei 2024. Dalam *ICRG Meeting* tersebut, PPATK juga mengambil peran substantif dengan menjadi salah satu *ICRG Lead Reviewers*. Hal ini merupakan wujud nyata partisipasi aktif Indonesia dalam melakukan *review* atas proses yang dicapai oleh negara-negara yang berada di dalam daftar abu-abu FATF, khususnya negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.

Peran sentral PPATK dalam forum FATF juga terwujud dalam partisipasi aktif di kegiatan FATF Plenary di Paris, Perancis sebagai forum penentu kebijakan rezim APUPPT dunia. Pada forum ini, delegasi PPATK menjalankan sejumlah pertemuan bilateral dengan Presiden FATF, *co-chair Working Group on Risks Trends and Methods* (RTMG), *FATF Train*, delegasi Malaysia, dan delegasi Pakistan sebagai bentuk komitmen aktif Indonesia dalam berkontribusi di FATF. PPATK juga memberi dukungan penuh kepada calon Presiden FATF periode tahun 2024-2026 dari Meksiko, Elisa de Anda Madrazo. Adapun dalam FATF Plenary berikutnya

During the first half of 2024, PPATK engaged in a variety of bilateral, regional, and multilateral activities to enhance its international presence and cooperation. These activities began with active participation in the *Egmont Working Group Meeting* in Malta in February 2024. The PPATK delegation played a key role in facilitating the participation of the Financial Intelligence Unit (FIU) of Timor Leste in the Head of Financial Intelligence Unit (HoFIU) session for the first time, marking a significant milestone in PPATK's efforts to support FIU Timor Leste in joining the *Egmont Group*.

In the context of FATF involvement, PPATK hosted the *Asia-Pacific Joint-Group ICRG Meeting* in Bali in May 2024. PPATK took a substantive role as one of the *ICRG Lead Reviewers*, reflecting Indonesia's active participation in the review process of countries on the FATF gray list, particularly in the Asia-Pacific region.

PPATK's engagement in the FATF forum extended to active participation in the FATF Plenary activities in Paris, France. During this forum, the PPATK delegation conducted bilateral meetings with the FATF President, the co-chair of the *Working Group on Risks Trends and Methods* (RTMG), *FATF Train*, and delegations from Malaysia and Pakistan. These meetings demonstrated Indonesia's commitment to contributing to the FATF's objectives. PPATK also supported the candidacy of Elisa de Anda Madrazo from Mexico for the FATF President for the 2024-2026 period. At the subsequent FATF Plenary in Singapore in June 2024, the PPATK delegation, along with representatives from various Ministries and Institutions, participated in all working group and plenary meetings.

di Singapura pada Juni 2024, delegasi PPATK Bersama seluruh perwakilan Kementerian/Lembaga (K/L) turut berkontribusi dalam seluruh pertemuan *working group* dan *plenary* untuk merepresentasikan kepentingan nasional Indonesia di forum tersebut.

Dalam lingkup regional, PPATK berperan dalam menyampaikan perkembangan *project Multijurisdictional Anti-Fraud* di *FICG Annual Meeting* di Australia pada Mei 2024. Selain itu, delegasi PPATK juga menyampaikan proposal usulan *project* strategis dalam bentuk penyusunan indikator *red flag* transaksi keuangan yang terkait dengan kejahatan *child sexual exploitation*. Proposal ini diterima oleh *Co-Chair* FICG dan menjadi bagian dari *projects strategis* FICG untuk periode tahun 2024-2025. PPATK juga berkontribusi dalam menyampaikan tren, tipologi, dan riset terkini ke dalam *APG Typologies Report 2025*, di mana dokumen ini akan disahkan dalam *APG Typologies & Capacity Building Workshop* yang akan diselenggarakan pada November 2024 di Malaysia.

Secara bilateral, PPATK juga membangun kerja sama secara aktif seperti Kerjasama dengan FIU Singapura (STRO) untuk mengidentifikasi isu dan perkembangan kerja sama di bidang politik, hukum, dan keamanan; rapat koordinasi dengan FIU Thailand (AMLO) untuk penyusunan proyek kajian internasional terkait *fraud* dengan *modus investment fraud* dan *pig butchering*; koordinasi rutin dengan FIU Australia (AUSTRAC); pertemuan bilateral dengan FIU China (CAMLMAC); rapat koordinasi dengan FBI terkait kasus kejahatan siber dan perdagangan obat ilegal; dan pemberian bantuan teknis kepada FIU Laos dan FIU Timor Leste.

On the regional front, PPATK contributed to the *Multijurisdictional Anti-Fraud* project at the *FICG Annual Meeting* in Australia in May 2024. The delegation also proposed a strategic project to develop red flag indicators for financial transactions related to child sexual exploitation, which was accepted by the *FICG Co-Chair* and incorporated into *FICG's* strategic projects for the 2024-2025 period. Additionally, PPATK contributed to the *APG Typologies Report 2025*, which will be ratified at the *APG Typologies & Capacity Building Workshop* in November 2024 in Malaysia.

Bilateral cooperation efforts included collaboration with FIU Singapore (STRO) to address issues and developments in politics, law, and security; coordination with FIU Thailand (AMLO) for an international study project on fraud using investment fraud and pig butchering modes; regular coordination with FIU Australia (AUSTRAC); bilateral meetings with China's FIU (CAMLMAC); coordination meetings with the FBI on cybercrime and illegal drug trafficking; and providing technical assistance to FIU Laos and FIU Timor Leste.

**Peran sentral PPATK dalam forum FATF juga terwujud dalam partisipasi aktif di kegiatan FATF Plenary di Paris, Perancis.** PPATK menjalankan sejumlah pertemuan bilateral dengan Presiden FATF, *co-chair Working Group on Risks Trends and Methods* (RTMG), *FATF Train*, delegasi Malaysia, dan delegasi Pakistan sebagai bentuk komitmen aktif Indonesia dalam berkontribusi di FATF.

**PPATK's engagement in the FATF forum extended to active participation in the FATF Plenary activities in Paris, France.** The PPATK delegation conducted bilateral meetings with the FATF President, the co-chair of the *Working Group on Risks Trends and Methods* (RTMG), *FATF Train*, and delegations from Malaysia and Pakistan. These meetings demonstrated Indonesia's commitment to contributing to the FATF's objectives.





# URGENSI PERTUKARAN DATA ANTAR FIU

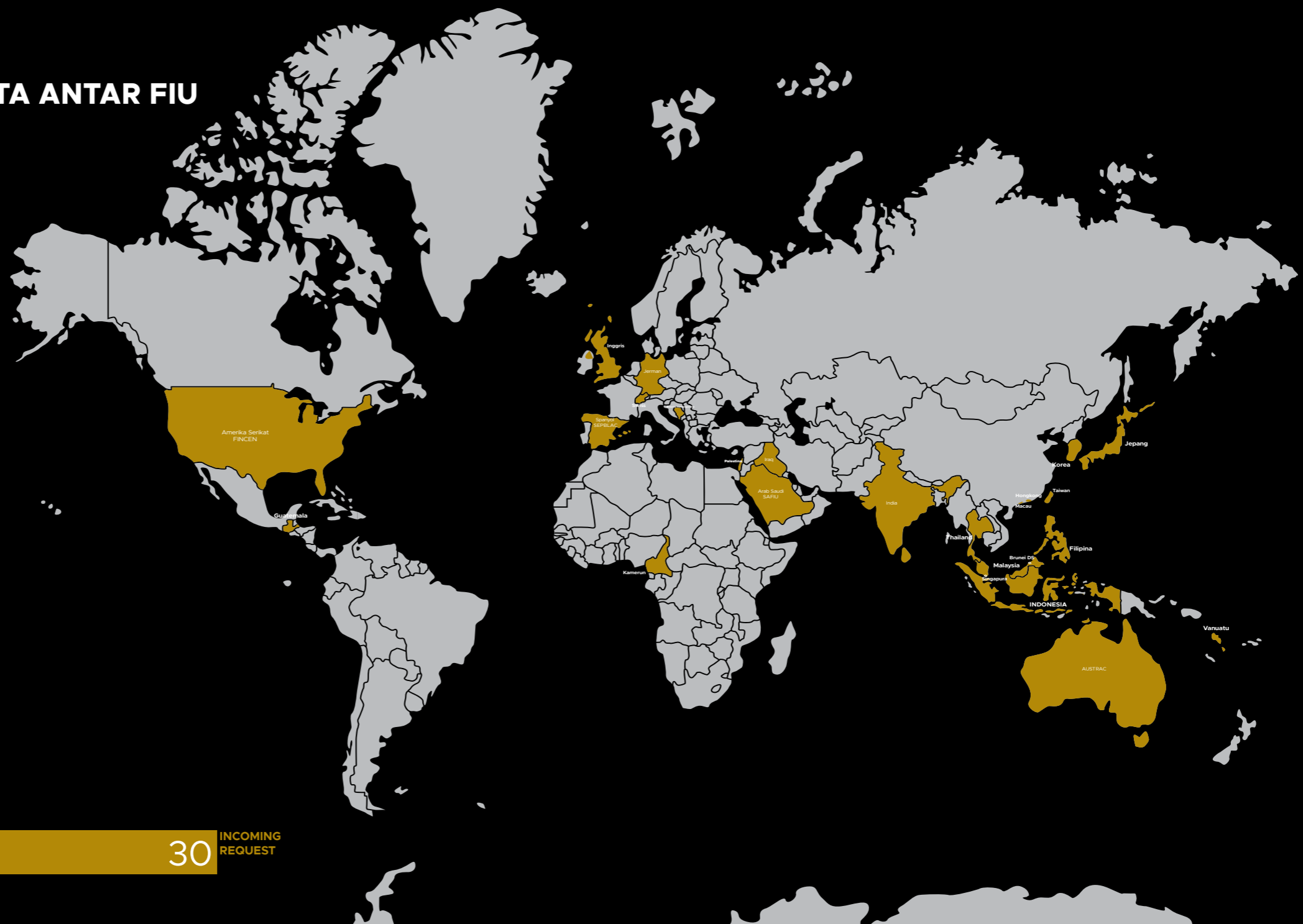
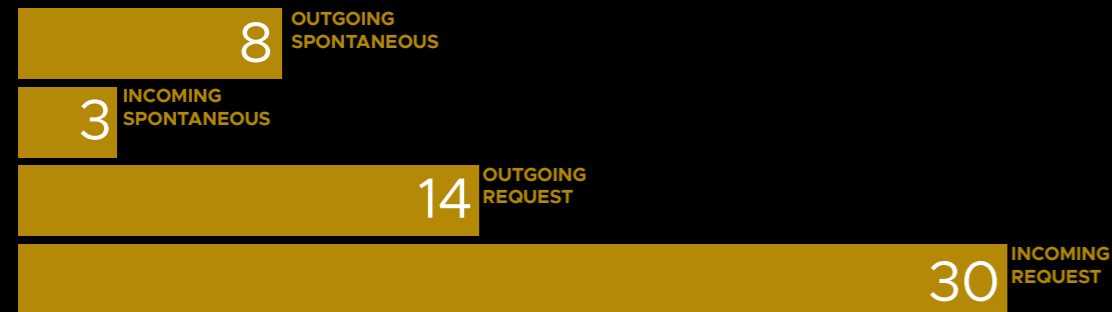
## URGENCY OF DATA EXCHANGE BETWEEN FIUS

Pertukaran data antar *Financial Intelligence Units* (FIU) sangat penting untuk mencegah dan memberantas kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kerja sama ini mempercepat deteksi transaksi mencurigakan, meningkatkan akurasi analisis risiko, dan memfasilitasi penegakan hukum lintas negara. Dengan berbagi informasi yang diperoleh, FIU atau dalam hal ini PPATK dapat lebih efektif melacak aliran dana ilegal, mengidentifikasi pelaku, dan mendukung stabilitas keuangan global yang terbebas dari ancaman TPPU/TPPT/PPSPM.

The exchange of data between Financial Intelligence Units (FIUs) is crucial in the prevention and eradication of financial crimes, including money laundering and terrorism financing. This collaboration accelerates the detection of suspicious transactions, enhances the accuracy of risk analysis, and facilitates cross-border law enforcement. By sharing information, FIUs, such as PPATK, can more effectively track the flow of illicit funds, identify perpetrators, and support global financial stability free from AML-CFT-PF threats.

### Statistik Pertukaran Data Antar FIU

Statistics on Data Exchange Between FIUs





# HUKUM DAN REGULASI

LAW AND REGULATION

## AGAR KEBIJAKAN BERPAYUNG HUKUM "POLICIES WITH LEGAL BASIS"

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh PPATK dirumuskan, dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Direktorat Hukum dan Regulasi. Hal ini bertujuan agar PPATK dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberantas dan mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) secara *on track*, dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Each policy issued by PPATK is meticulously formulated, coordinated, and implemented under the purview of the Directorate of Law and Regulation. This meticulous process ensures that PPATK fulfills its duties and functions in combating and preventing Money Laundering and Financing of Terrorism with strict adherence to legal accountability.



## PENGUATAN REGULASI TPPU

### STRENGTHENING AML REGULATIONS

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) memerlukan penguatan hukum dan regulasi yang efektif. TPPU adalah kejahatan serius yang melibatkan penyamaran asal-usul uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal, seperti perdagangan narkoba, korupsi, dan penipuan. Untuk mengatasi hal ini, penguatan hukum dan regulasi menjadi sangat penting.

Penguatan hukum mencakup pengetatan undang-undang yang mengatur tentang TPPU, termasuk penerapan sanksi yang lebih berat bagi pelaku, serta penyamaan persepsi di antara penegak hukum dalam penanganan perkara TPPU. Regulasi yang ketat dan jelas memberikan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus TPPU. Selain itu, penguatan hukum juga mencakup peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan penyediaan sumber daya yang memadai. Dengan adanya penyamaan persepsi di antara penegak hukum melalui kegiatan penguatan penegakan hukum TPPU dan peningkatan kapasitas, diharapkan dapat tercipta *integrated criminal justice system*.

Regulasi yang efektif harus mencakup kebijakan anti-pencucian uang yang komprehensif. Ini termasuk kewajiban bagi lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi mencurigakan, mekanisme pemantauan yang ketat, serta kerjasama internasional dalam pertukaran informasi dan penanganan kasus lintas batas.

Dengan adanya penguatan hukum dan regulasi yang tepat, penegakan hukum terhadap TPPU dapat dilakukan secara lebih efektif. Hal ini tidak hanya untuk menghukum pelaku TPPU, tetapi juga melindungi integritas sistem keuangan dan ekonomi negara. Penguatan ini harus menjadi prioritas dalam upaya melawan kejahatan keuangan yang semakin kompleks dan terorganisir.

Law enforcement against money laundering necessitates the reinforcement of effective laws and regulations. Money laundering, a serious crime, involves concealing the origins of money obtained from illegal activities, such as drug trafficking, corruption, and fraud. Addressing this issue requires a robust legal framework.

Strengthening laws involves tightening existing legislation governing money laundering, which includes implementing harsher sanctions for perpetrators and ensuring uniformity in the handling of money laundering cases among law enforcers. Clear and stringent regulations provide a robust legal foundation for law enforcement officials. Additionally, enhancing the legal framework includes increasing the capacity of law enforcement officers through training and providing adequate resources. By fostering a unified approach among law enforcers through activities aimed at strengthening money laundering law enforcement and enhancing capacity, an integrated criminal justice system can be established.

Effective regulation must encompass a comprehensive anti-money laundering policy. This includes obligations for financial institutions to report suspicious transactions, stringent monitoring mechanisms, and international cooperation for information exchange and cross-border case management.

Strengthening appropriate laws and regulations enables more effective enforcement against money laundering. This approach not only aims to penalize offenders but also protects the integrity of the country's financial and economic systems. Such fortification should be a priority in combating increasingly complex and organized financial crimes, ensuring a robust defense against threats to national and global economic stability.

## JUMLAH PRODUK HUKUM PPAK 2020-2024

### NUMBER OF PPAK LEGAL PRODUCTS 2020-2024

#### Peraturan / Regulation

2020 : 23

2021 : 21

2022 : 18

2022 : 18

2023 : 10

#### Surat Edaran / Circular Letter

2020 : -

2021 : 15

2022 : 7

2022 : 11

2023 : -



## PERAN SAKSI AHLI THE ROLE OF EXPERT WITNESS IN LAW ENFORCEMENT

Salah satu tantangan dalam penanganan perkara pencucian uang saat ini adalah kompleksitas dan tipologi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dalam menyembunyikan hasil kejahatan yang semakin canggih. Pemanfaatan celah hukum, penggunaan *cryptocurrency*, kejahatan yang bersifat *cross border*, serta penyalahgunaan kemudahan berusaha yang difasilitasi Pemerintah dengan mendirikan *shell company* menjadi cara-cara yang lazim dilakukan oleh pelaku kejahatan saat ini.

Momen krusial dalam proses pengungkapan suatu kejahatan adalah pada tahap pembuktian. Pembuktian pada *Criminal justice system* Indonesia mensyaratkan keyakinan hakim yang didukung dua alat bukti yang sah dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana. Dengan demikian, alat bukti memiliki kedudukan yang fundamental dalam proses pembuktian. Salah satu dukungan PPATK dalam mendukung proses pengungkapan perkara dan pembuktian adalah melalui pemberian keterangan ahli.

Hadirnya keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang diakui KUHAP berperan menerangkan dan memperjelas suatu perkara. PPATK melalui pemberian keterangan ahli memberikan dukungan sejak penyidikan hingga tahapan pembuktian di sidang pengadilan. Dalam kurun waktu Januari 2023 – Juni 2024 sendiri, PPATK telah memberikan dukungan sebanyak 250 pemberian keterangan ahli TPPU dan 5 kasus untuk Pendanaan Terorisme. Pemberian keterangan ahli diharapkan dapat menjadi suatu alat bukti sah yang mampu meningkatkan optimalisasi penanganan perkara pencucian uang dan pendanaan terorisme.

One of the significant challenges in handling money laundering cases today is the increasing complexity and sophistication of methods used by criminals to conceal the proceeds of crime. Exploiting legal loopholes, utilizing *cryptocurrency*, engaging in cross-border crimes, and abusing the ease of establishing shell companies are common tactics employed by modern-day criminals.

The evidentiary stage is crucial in the process of uncovering a crime. In the Indonesian criminal justice system, a judge's conviction must be supported by two valid pieces of evidence to declare a person guilty of a criminal act. Therefore, evidence holds a fundamental position in the proof process. PPATK (Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center) supports the case disclosure and evidence process through the provision of expert testimony.

The presence of Expert testimony as one of the evidence recognized by KUHAP plays a role in explaining and clarifying a case. through the presence of Expert witnesses, PPATK provides support from the Investigation to the trial stage in court. In the period of January 2023 - June 2024 alone, PPATK has provided support for 250 TPPU Expert testimonies and 5 cases for Terrorism Funding. The provision of expert testimony is expected to be a legal evidence that can increase the optimization of the handling of money laundering and terrorism financing cases.



### JUMLAH KETERANGAN AHLI DARI PPATK BERDASARKAN INSTANSI PEMOHON 2019 - 2024

#### NUMBER OF REQUESTS FOR EXPERT TESTIMONY BY AGENCY 2019-2024



# UNTUK REGULASI LEBIH BAIK FOR BETTER REGULATION

## A. Penelitian Hukum

Direktorat Hukum dan Regulasi aktif melakukan penelitian hukum untuk penyusunan kajian hukum. Sepanjang semester I tahun 2024, ada 6 proposal kajian hukum yang diusulkan. Adapun proposal kajian hukum dimaksud bertema: tindak pidana pencucian uang di bidang fiskal, pemulihan aset tindak pidana pencucian uang yang menggunakan sarana aset kripto, penanganan tindak pidana terorisme dengan sarana aset kripto, perampasan aset tindak pidana pencucian uang yang terdakwa meninggal dunia, implikasi disahkannya UU P2SK dalam pelaksanaan penanganan TPPU, dan tinjauan yuridis terhadap POJK tentang kegiatan usaha bank terkait *trust*. Hal ini dilakukan untuk memperkuat regulasi dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Selain itu, Direktorat Hukum dan Regulasi PPATK telah melaksanakan penelitian ke-9 (sembilan) kota yaitu Semarang, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Denpasar, Makassar, Palangkaraya, Balikpapan, dan Samarinda. Narasumber dalam kegiatan penelitian tersebut terdiri dari aparat penegak hukum dan akademisi. Narasumber aparat penegak hukum berasal dari Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di beberapa kota. Dengan adanya kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan kajian hukum diharapkan dapat memperkaya khazanah dan perspektif PPATK dalam penyusunan kajian hukum terutama mengenai hambatan dan kendala dari aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

## A. Research for the Preparation Legal Study

In the first semester of 2024, PPATK proposed six legal study topics in the field of preventing and eradicating money laundering and terrorism financing crimes. The proposals focus on: Money laundering crimes in the fiscal sector, Recovery of assets for money laundering crimes using crypto assets, Handling of criminal acts of terrorism using crypto assets, Confiscation of assets for money laundering crimes where the defendant dies, Implications of the passing of the Law P2SK in the implementation of handling money laundering cases, Judicial review of POJK regarding bank business activities related to trusts

To support the preparation of these legal studies, the PPATK Legal and Regulatory Directorate conducted research in nine cities: Semarang, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Denpasar, Makassar, Palangkaraya, Balikpapan, and Samarinda from March to May 2024. The resource persons for this research included law enforcement officials and academics. The law enforcement officials represented various institutions such as the High Court, High Prosecutor's Office, Regional Police, Directorate General of Taxes, and Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance in several cities.

These research activities aim to enrich PPATK's perspective in preparing legal studies, especially regarding the obstacles and constraints faced by law enforcement officials in handling cases of money laundering and terrorism financing crimes. combat financial crimes and terrorism financing.



### B. Dukungan dalam Penyusunan MLA

Direktorat Hukum dan Regulasi PPAK juga aktif terlibat dalam dukungan kegiatan perundingan forum bilateral terkait perjanjian *Mutual Legal Assistance (MLA)*. Pada tanggal 10-15 Juni telah dilaksanakan kegiatan perundingan tahap ketiga Perjanjian MLA dan perundingan tahap pertama Ekstradisi Indonesia-Polandia di *Ministry of Justice Polandia*, di Warsawa.

Dalam kegiatan perundingan tersebut terdapat adanya keterlibatan PPAK dalam penyusunan pasal terkait dengan isu permintaan informasi dan definisi *Proceed of Crime* sebagaimana dimuat dalam *Article 14* dan *Article 22* Perjanjian MLA Indonesia-Polandia.

Dalam perundingan tersebut disetujui untuk dapat dilakukannya pertukaran informasi mengenai rekening di bank dan lembaga keuangan lain untuk tujuan MLA berdasarkan hukum nasional masing-masing negara yang kemudian dirumuskan dalam *Article 14 paragraph (5)*, dan perluasan definisi "*proceeds of crime*" sesuai dengan Rekomendasi 4 FATF yang kemudian dirumuskan dalam *Article 22 paragraph (3)* Perjanjian Indonesia-Polandia.

Rancangan Akhir Perjanjian MLA Indonesia-Polandia diparaf oleh Ketua Delegasi Indonesia yaitu Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Kementerian Hukum & HAM) dan Sekretaris Negara Kementerian Kehakiman Republik Polandia.

### B. Support in Preparing MLA

From June 10-15, 2024, PPAK was involved in the third phase of negotiations for the Mutual Legal Assistance Agreement (MLA) and the first phase of negotiations for Indonesia-Poland Extradition at the Polish Ministry of Justice in Warsaw.

PPAK contributed to the preparation of articles related to information requests and the definition of "proceeds of crime" in the Indonesia-Poland MLA Agreement. The negotiations resulted in:

1. Agreement to exchange information regarding accounts at banks and other financial institutions for MLA purposes based on each country's national laws, formulated in *Article 14 paragraph (5)*.
2. Expansion of the definition of "proceeds of crime" in accordance with FATF Recommendation 4, formulated in *Article 22 paragraph (3)* of the Indonesia-Poland Agreement.

The final draft of the Indonesia-Poland MLA Agreement was initialed by the Chair of the Indonesian Delegation, the Director General of General Legal Administration (Ministry of Law & Human Rights), and the State Secretary of the Ministry of Justice of the Republic of Poland.

These activities demonstrate PPAK's commitment to enhancing legal frameworks and international cooperation to effectively combat money laundering and terrorism financing.





# TEKNOLOGI INFORMASI

INFORMATION TECHNOLOGY

## PERAN TEKNOLOGI, TEMUKAN INDIKASI "TRACKING CRIMES THROUGH TECH"

Tak bisa dipungkiri, teknologi informasi memiliki peran penting dalam penelusuran indikasi pencucian uang. PPATK mengoptimalkan perkembangan teknologi untuk memungkinkan analisis data yang cepat, diseminasi informasi yang aman, dan pemantauan transaksi yang mencurigakan secara *real-time*, yang pada akhirnya memperkuat upaya pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Undeniably, information technology plays a crucial role in detecting indications of money laundering. PPATK leverages technological advancements to facilitate rapid data analysis, secure information dissemination, and real-time monitoring of suspicious transactions. This optimization of technology significantly strengthens efforts to prevent money laundering and terrorism financing.



## MENGIDENTIFIKASI INDIKASI MELALUI TEKNOLOGI IDENTIFYING CRIMES THROUGH TECHNOLOGY

Dalam era digital yang semakin cepat dan canggih, teknologi informasi (TI) memegang peran penting dalam penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). TI berfokus pada penciptaan dan peningkatan yang berkelanjutan dari berbagai sistem informasi yang mendukung operasional dan tugas-tugas penting organisasi. Proses ini melibatkan perancangan arsitektur teknologi yang *robust* atau kokoh, pengembangan fitur-fitur baru, serta pemeliharaan rutin untuk memastikan bahwa sistem-sistem tersebut beroperasi secara efisien dan aman.

Implementasi infrastruktur TI yang canggih, memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber yang dapat memberikan hasil gambaran yang lebih luas. Gambaran tersebut tentang aktivitas finansial yang mencurigakan. Hal ini diperkuat oleh manajemen *database* yang memadai dalam penyimpanan dan akses informasi yang cepat.

Keamanan informasi juga merupakan komponen kritis. Penerapan keamanan yang ketat sesuai dengan standar nasional dan internasional dapat mendukung dalam menjaga integritas dan kerahasiaan data PPAATK. Dengan adanya kepatuhan terhadap regulasi keamanan informasi seperti SNI ISO/IEC 27001, PPAATK mampu meminimalisir risiko kebocoran data.

Peran TI dalam penegakan TPPU tidak dapat diabaikan. Dengan dukungan infrastruktur TI yang canggih dan keamanan informasi yang ketat, PPAATK

dapat mengidentifikasi dan mencegah aktivitas pencucian uang dengan lebih efektif. Pengintegrasian data dari berbagai sumber serta pemeliharaan sistem yang andal memungkinkan proses penegakan hukum lebih efisien dan akurat dalam upaya pencegahan dan penindakan kejahatan finansial.

Dalam rangka meningkatkan tata kelola teknologi informasi (TI) dan pengelolaan risiko keamanan informasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui Unit Kerja Pusat Teknologi Informasi telah meraih Sertifikasi SNI ISO/IEC 27001:2022. Pencapaian ini mencerminkan komitmen PPAATK dalam menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mengadopsi penuh *Standar International Organization for Standardization* (ISO).

SNI ISO/IEC 27001:2022 merupakan standar yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan informasi. Standar ini dirancang untuk memastikan seleksi kontrol keamanan yang memadai dan proporsional untuk melindungi informasi dari risiko keamanan yang meliputi kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*). Dengan memperoleh sertifikat ini, menunjukkan kapabilitas PPAATK dalam pengelolaan perlindungan data dan informasi yang dimiliki dan dikuasainya dari ancaman keamanan informasi.

In an increasingly fast-paced and sophisticated digital age, information technology (IT) plays a crucial role in money laundering enforcement. IT focuses on creating and continuously improving information systems that support an organization's operations and critical tasks. This process involves designing robust technology architecture, developing new features, and performing regular maintenance to ensure that systems operate efficiently and securely.

The implementation of a sophisticated IT infrastructure enables the integration of data from various sources, providing a broader picture of suspicious financial activity. This is reinforced by adequate database management for storage and quick access to information.

Information security is also a critical component. The implementation of stringent security measures in accordance with national and international standards supports maintaining the integrity and confidentiality of PPAATK data. By complying with information security regulations such as SNI ISO/IEC 27001, PPAATK can minimize the risk of data leakage.

The role of IT in money laundering enforcement cannot be ignored. With the support of sophisticated IT

infrastructure and strict information security, PPAATK can identify and prevent money laundering activities more effectively. Integrating data from various sources and maintaining a reliable system enables a more efficient and accurate law enforcement process in the prevention and prosecution of financial crimes.

To improve IT governance and information security risk management, PPAATK, through the Information Technology Center Work Unit, has achieved SNI ISO/IEC 27001:2022 Certification. This achievement reflects PPAATK's commitment to implementing an Information Security Management System in accordance with the Indonesian National Standard (SNI), which fully adopts the International Organization for Standardization (ISO) Standard.

SNI ISO/IEC 27001:2022 is a standard that specifies requirements for information security management systems. It is designed to ensure the selection of adequate and proportionate security controls to protect information from security risks, including confidentiality, integrity, and availability. Obtaining this certificate demonstrates PPAATK's capability in managing data and protecting information from security threats.



## HASIL SPBE SPBE RESULT

PPATK terus menunjukkan komitmen dalam mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebuah sistem yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada publik. Sebagai upaya untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE, assessor SPBE adalah assesor nasional (Kemenpan-RB) rutin melakukan pemantauan dan evaluasi tahunan. Khusus pada tahun 2020 evaluasi tidak dilakukan karena telah dinilai pada 2019. Secara hasil evaluasi dari tahun ke tahun SPBE PPATK terus menunjukkan perkembangan nilai yang signifikan. Meskipun sempat mengalami penurunan nilai pada tahun 2021 dan 2022, PPATK berhasil mencapai angka tertinggi dalam penerapan SPBE pada tahun 2023 dengan skor 4,24.

The Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) continues to demonstrate its commitment to implementing the Electronic-Based Government System (SPBE), which utilizes information and communication technology to provide public services. To measure the progress of SPBE implementation, national assessor (Kemenpan-RB) routinely conducts annual monitoring and evaluation. Although the evaluation was not conducted in 2020 due to a focus on the monitoring process, the evaluation results from subsequent years show significant development. Despite a decline in scores in 2021 and 2022, PPATK achieved its highest score in SPBE implementation in 2023, with a score of 4.24.



## HASIL TKTI IT GOVERNANCE RATING



PPATK mencapai nilai maturitas tertinggi sejak tahun 2019 yaitu 4,02 dalam Tata Kelola TI, melampaui target kinerja 2023 sebesar 3,33 dengan pencapaian kinerja 120,72%. Hal ini menggambarkan bahwa proses TI selalu dilaksanakan, terdokumentasi, dikomunikasikan, dan dikelola dengan baik serta pencapaiannya dapat diukur.

PPATK has attained its highest maturity score in IT Governance (TKTI) since 2019, reaching 4.02. This surpasses the 2023 performance target of 3.33, with a performance achievement of 120.72%. This accomplishment demonstrates that IT processes at PPATK are consistently implemented, documented, communicated, and effectively managed, allowing for measurable achievements.





# MANAJEMEN INTERNAL

INTERNAL MANAGEMENT

## MANAJEMEN INTERNAL KUAT, ORGANISASI HEBAT "EFFECTIVE INTERNAL MANAGEMENT, EXCEPTIONAL ORGANIZATION"

PPATK terus melakukan berbagai upaya pembenahan di internalnya demi memperkuat organisasi. Mulai dari pengembangan kompetensi pegawai, perbaikan Organisasi Tata Laksana, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, Memperketat Pengawasan Internal hingga Pengelolaan Barang Pendukung Kinerja Pegawai. Hal ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga dalam mengemban amanah rakyat. Disamping itu, PPATK juga memaksimalkan fungsi pencegahan dalam upaya perlawanan TPPU dan TPPT. Dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta menjaga kepercayaan rakyat dengan penerimaan aduan dan mengatasi sentimen pemberitaan.

PPATK continues to implement various internal improvement efforts to strengthen the organization. These initiatives include developing employee competencies, enhancing organizational governance, evaluating performance accountability, strengthening internal supervision, and optimizing asset management to support employee performance. These efforts reflect the institution's commitment to transparency and accountability in fulfilling its mandate to the people. Additionally, PPATK maximizes prevention efforts in combating money laundering and terrorism financing through public education and socialization, as well as maintaining public trust by managing complaints and monitoring news sentiment.



## MENGUATKAN PPATK DARI DALAM: PERAN PENTING MANAJEMEN INTERNAL STRENGTHENING PPATK FROM WITHIN: THE ROLE OF INTERNAL MANAGEMENT

Operasional yang efektif dari PPATK memperoleh dukungan kuat dari kekuatan fungsi manajemen internalnya, terutama dalam bidang sumber daya manusia, keuangan, umum, hubungan masyarakat, pusat pelatihan, inspektorat, dan kemitraan.

Fungsi manajemen sumber daya manusia sangat penting dalam merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan personel terampil yang mahir dalam menganalisis transaksi keuangan yang kompleks dan mendeteksi aktivitas terlarang. Fungsi keuangan memastikan bahwa PPATK beroperasi sesuai dengan batasan anggaran dan mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk mendukung kebutuhan *core business* dan pendukungnya.

Biro umum menangani dukungan administratif dan memastikan kelancaran operasional sehari-hari. Hubungan masyarakat memainkan peran penting dalam mendorong transparansi dan membangun kepercayaan publik melalui strategi komunikasi yang efektif yang menyoroti upaya dan keberhasilan PPATK dalam memerangi kejahatan keuangan. Pusat pelatihan memainkan peran untuk pengembangan profesional yang berkelanjutan, membekali staf dan *stakeholder* dengan pengetahuan dan keterampilan terbaru untuk mengatasi ancaman yang muncul dan beradaptasi dengan peraturan baru. Inspektorat mengawasi audit internal dan pemeriksaan kepatuhan, memastikan bahwa PPATK mematuhi standar nasional dan internasional dan beroperasi dengan integritas tertinggi.

Inisiatif kemitraan juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong kerja sama di antara para pemangku kepentingan. Dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi, PPATK dapat membina lingkungan kerja sama yang kondusif untuk deteksi dini dan pencegahan kejahatan keuangan. Sebagai kesimpulan, fungsi manajemen internal sangat penting untuk mengkoordinasikan operasi organisasi dengan efisien dan efektif melalui pengelolaan sumber daya, proses, dan arah strategis.

PPATK's effective operations are strongly supported by its robust internal management functions, particularly in the areas of human resources, finance, general administration, public relations, training, inspectorate, and partnerships.

The human resources management function is crucial in recruiting, developing, and retaining skilled personnel adept at analyzing complex financial transactions and detecting illicit activities. The finance function ensures that PPATK operates within budgetary constraints and allocates resources efficiently to support its core activities and support needs.

The general bureau handles administrative support, ensuring smooth day-to-day operations. Public relations plays a vital role in promoting transparency and building public trust through effective communication strategies that highlight PPATK's efforts and successes in combating financial crime.

The training center focuses on continuous professional development, equipping staff and stakeholders with the latest knowledge and skills to address emerging threats and adapt to new regulations. The Inspectorate oversees internal audits and compliance checks, ensuring that PPATK adheres to national and international standards and operates with the highest integrity.

Partnership initiatives are also critical in raising awareness and encouraging cooperation among stakeholders. By conducting socialization and education activities, PPATK fosters a cooperative environment conducive to the early detection and prevention of financial crime.

In conclusion, internal management is essential for coordinating an organization's operations efficiently and effectively through the management of resources, processes, and strategic direction.

## PENGEMBANGAN PEGAWAI EMPLOYEE DEVELOPMENT

Keberhasilan Indonesia menjadi anggota penuh ke-40 Financial Action Task Force (FATF) berdampak positif bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Keanggotaan FATF ini mengharuskan penguatan kapasitas sumber daya manusia PPATK yang diproyeksikan menjadi *assessor* dan *reviewer* pada kegiatan FATF sebagai bagian dari salah satu program prioritas nasional tahun 2025.

Peran Fungsi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana sangat strategis dalam memfasilitasi peningkatan kompetensi seluruh pegawai PPATK agar sejalan dengan regulasi dan rekomendasi FATF. Selama tahun 2024, PPATK telah melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan teknis dan fungsional khususnya pelatihan FATF seperti *Standard Training Course*, *ICRG Reviewer Training*, *Joint Assessor Training* dan Pelatihan Bahasa Perancis Dasar. PPATK terus berkomitmen penuh mendukung pengembangan kompetensi pegawai terkait pemahaman APUPPT dan memperluas cakupan kerjasama dengan penyedia beasiswa, universitas dan lembaga/organisasi lainnya sebagai bentuk dukungan keanggotaan Indonesia di FATF.

PPATK juga telah bekerjasama dengan Badan Kependidikan Nasional (BKN) dalam melaksanakan pemetaan kompetensi pegawai melalui metode Computer Assisted Competency Test (CACT) sebagai dasar implementasi manajemen talenta dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di masa mendatang.

Indonesia's success in becoming the 40th full member of the Financial Action Task Force (FATF) has positively impacted the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in its efforts to prevent and eradicate money laundering. This FATF membership necessitates strengthening the capacity of PPATK's human resources, who are projected to become assessors and reviewers in FATF activities, as part of one of the national priority programs in 2025.

The role of the Human Resources, Organization, and Governance Function is strategic in facilitating the enhancement of the competence of all PPATK employees to align with FATF regulations and recommendations. In 2024, PPATK has conducted various technical and functional training activities, particularly FATF-related training such as the Standard Training Course, ICRG Reviewer Training, Joint Assessor Training, and Basic French Language Training. PPATK remains fully committed to supporting the development of employee competencies related to understanding APUPPT and expanding the scope of cooperation with scholarship providers, universities, and other institutions/organizations as a form of support for Indonesia's FATF membership.

PPATK has also collaborated with the National Civil Service Agency (BKN) to carry out employee competency mapping through the Computer Assisted Competency Test (CACT) method. This serves as a basis for implementing talent management to prepare competent human resources ready to face future challenges.



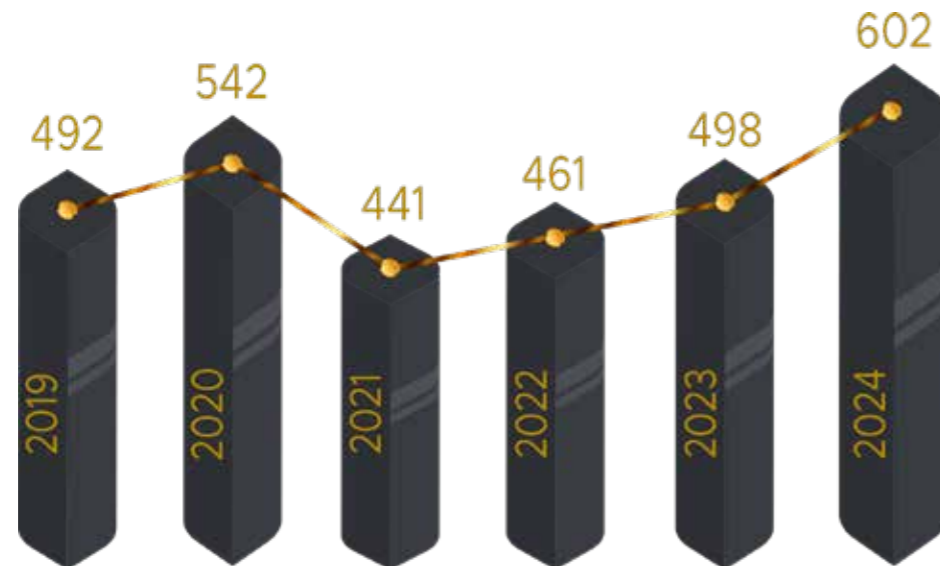
## KOMPOSISI PEGAWAI PPATK PPATK EMPLOYEE COMPOSITION

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tugas dan fungsinya, PPATK berusaha mengoptimalkan peningkatan kapasitas serta kompetensi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana

Dalam rangka mewujudkan arah tersebut, langkah strategis PPATK adalah sebagai berikut:  
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas  
2. Mewujudkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang Berkualitas.

In an effort to realize its vision, mission, duties, and functions, PPATK strives to optimize the capacity and competence of its human resources, organizational structure, and governance. To achieve this direction, PPATK's strategic steps are as follows:  
1. Realizing Quality Human Resources  
2. Establishing Quality Institutional and Management Practices

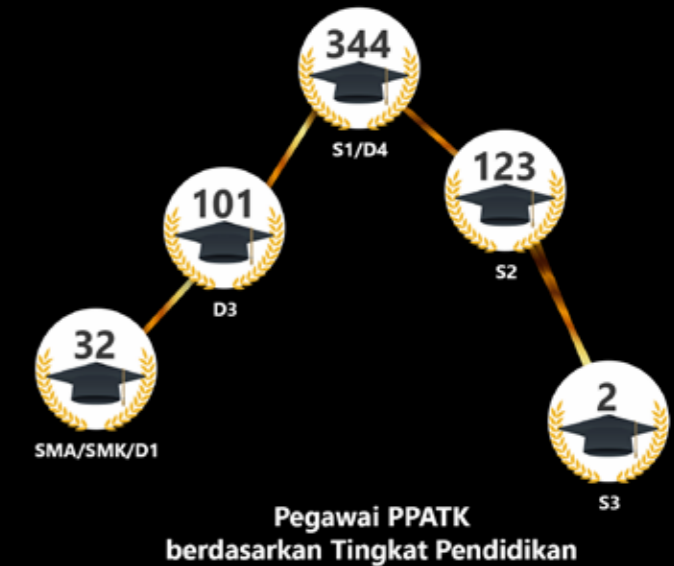
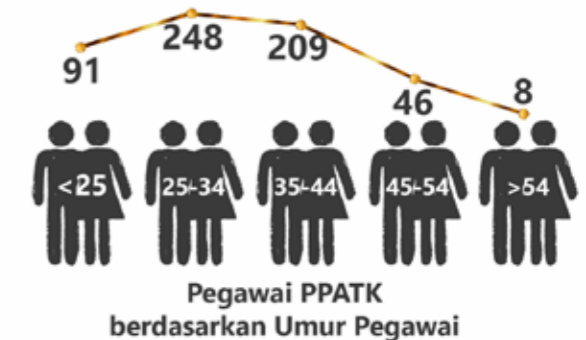
These strategic initiatives are aimed at enhancing PPATK's ability to effectively combat financial crimes and uphold its mandate.



Catatan : Terjadi penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan perpindahan pembebanan anggaran belanja pegawai kontrak dari Belanja 51 Ke Belanja 52

# i602

## Jumlah Pegawai PPATK 2024



## PERTAJAM PROGRAM REFORMASI BIROKRASI STRENGTHENING THE BUREAUCRATIC REFORM PROGRAM

Strategi dalam Road Map Reformasi Birokrasi (RB) 2020-2024 ditetapkan setelah melalui penajaman kolaboratif dengan melibatkan Kementerian/Lembaga pengampu kebijakan, dengan memperhatikan prinsip logis, prioritas, kolaboratif, dan antisipatif. Tujuan dari penajaman ini adalah untuk mempercepat dampak RB dan mewujudkan birokrasi digital.

Pada tahun 2023, PPAK menerima penilaian RB sebesar 85,56 (A-). Untuk meningkatkan pelaksanaan RB pada tahun 2024, PPAK menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari K/L Meso dan menetapkannya dalam dokumen rencana aksi RB dengan nama V1510N. Dokumen ini mencakup 15 sasaran RB General yang dijabarkan menjadi 88 rencana aksi, serta 10 sasaran RB Tematik yang terdiri dari 31 rencana aksi sesuai dengan 5 kluster arahan Presiden R.I. Pelaksanaan RB General mengikuti program yang ditetapkan dalam Road Map RB Nasional, sementara RB Tematik disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Lembaga. Pada tahun 2024, PPAK mengimplementasikan RB Tematik sebagai berikut:

1. Pengentasan Kemiskinan: PPAK mendorong percepatan penyelesaian RUU Perampasan Aset dan peningkatan MoU dengan tim nasional penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan keanggotaan Indonesia sebagai Anggota Tetap FATF: untuk meningkatkan reputasi Indonesia dan ASEAN serta menumbuhkan iklim investasi yang kondusif.
3. Digitalisasi administrasi pemerintahan terkait stunting melalui Optimalisasi Penggunaan Aplikasi GoAML
4. Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa PPAK.
5. Pengendalian inflasi: pelaksanaan fit and proper pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang berperan dalam pengendalian inflasi.

PPATK's efforts to strengthen its Bureaucratic Reform (RB) program, outlined through its 2020-2024 Road Map Strategy, have shown significant progress and commitment. The strategy, developed collaboratively with policy-making ministries/agencies, focuses on logical, priority-driven, collaborative, and anticipatory principles to enhance the impact of RB and foster digital bureaucracy.

In 2023, PPAK achieved an impressive score of 85.56 (A-) in its RB efforts. Building on this success, PPAK has diligently followed up on recommendations by integrating them into an actionable plan named "V1510N" for 2024. This document encompasses 15 General Bureaucratic Reform targets and 88 corresponding action plans, alongside 10 Thematic Bureaucratic Reform targets with 31 tailored action plans, aligning with the directives of the President of the Republic of Indonesia. The implementation strategy distinguishes between General RB, aligned with the National Road Map, and Thematic RB, customized to the unique characteristics of PPAK. In 2024, PPAK's Thematic RB initiatives include:

1. Poverty Alleviation: Accelerating the Asset Forfeiture Bill's completion and enhancing collaboration with the national poverty alleviation team.
2. International Reputation: Increasing Indonesia's influence as a Permanent Member of FATF to bolster regional reputation and attract investment.
3. Digital Governance: Optimizing the GoAML application to enhance government administration in combating stunting.
4. Promoting Domestic Products: Implementing the Program to Increase the Use of Domestic Products (P3DN) in PPAK's procurement processes.
5. Inflation Control: Ensuring fit and proper appointments in key leadership positions critical to inflation management.

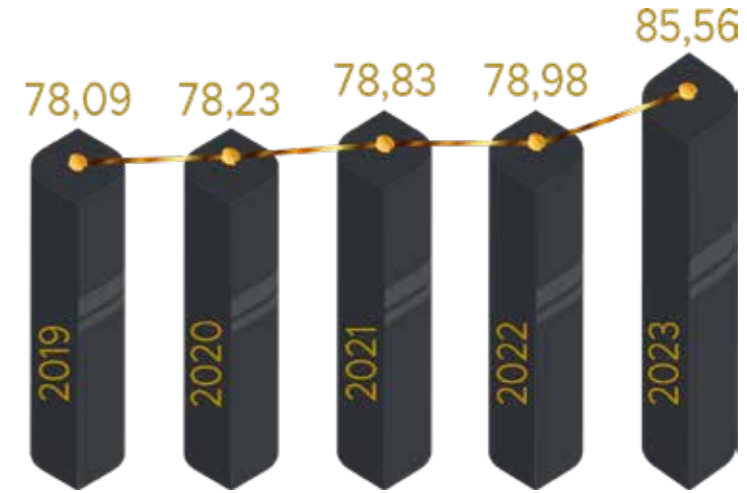
24	Rencana aksi RB General Pada Triwulan I 2024 <small>General RB action plan</small>
9	Rencana aksi RB Tematik Pada Triwulan I 2024 <small>Thematic RB action plan</small>

<b>95,83%</b> 23 Rencana aksi RB General telah selesai 23 Action plan RB General is complete	<b>4,17%</b> 1 Rencana aksi RB General dalam proses 1 Action plan RB General on process
<b>77,78%</b> 7 Rencana aksi RB Tematik telah selesai 7 Action plan RB Thematic is complete	<b>22,22%</b> 2 Rencana aksi RB Tematik dalam proses 2 Action plan RB Thematic on process

### NILAI REFORMASI BIROKRASI PPAK 2019-2023 PPATK BUREAUCRATIC REFORM SCORE 2019-2023

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Dalam kurung waktu 5 tahun terakhir hasil penilaian RB terhadap PPAK terus meningkat, dan diharapkan dapat dijadikan bahan dukungan untuk efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan RB di PPAK

Bureaucratic Reform (RB) is a cornerstone of the government's efforts to achieve good governance and enact fundamental reforms within the system of government administration, particularly focusing on institutional structures, management practices, and human resources of the state apparatus. Over the past five years, PPAK's Bureaucratic Reform assessment results have shown ongoing improvement. These achievements are anticipated to provide essential support in enhancing the effectiveness and efficiency of RB implementation at PPAK.



## HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PPAK 2019-2023

PPATK PERFORMANCE ACCOUNTABILITY EVALUATION RESULTS 2019-2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah PPAK, merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawaban sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, serta melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja PPAK dari tahun 2019-2023 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis.

PPATK's Government Agency Performance Report provides a comprehensive description of accountable performance achievements and serves as a tool for measuring the execution of its primary tasks, functions, and mandates as stipulated by applicable regulations.

Overall, PPAK's performance achievements from 2019 to 2023 have consistently met the targets set in the established performance plan. This success is attributed to the participation of all involved parties and reflects the effective functioning of the work system, supported by a dynamic work atmosphere.



Catatan : Hasil Evaluasi Menpan TA.2019 - 2023/Menpan Evaluation Result 2019-2023

Penjelasan : Sesuai Inpres no 7 tahun 1999 Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun.

In accordance with Presidential Instruction Number 7 of 1999, performance accountability is the embodiment of the obligation of a government to be accountable for the success/failure of implementing the organization's mission in achieving the goals and targets that have been set through periodic accountability tools. Government Performance Accountability System (SAKIP), LAKIP is the final product of SAKIP which describes the performance achieved by a government agency for the implementation of programs and activities funded by the APBN/APBD. The preparation of LAKIP is based on a budget cycle that runs for 1 year.

## STATISTIK ANGGARAN DAN PENYERAPAN 2019-2023

HISTORICAL BUDGET AND REALIZATION 2019-2023

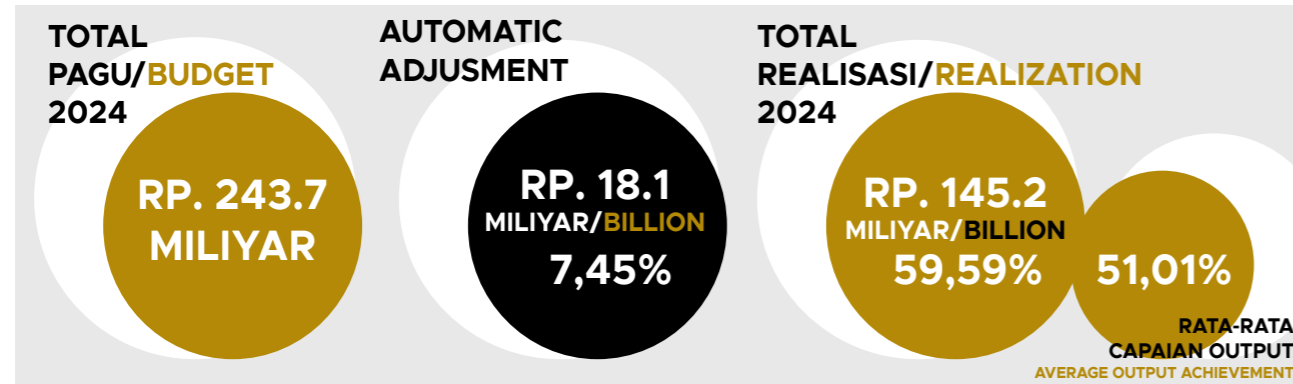
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

The Budget Realization Report (LRA) presents information on the realization of revenues, expenditures, transfers, surpluses/deficits, financing, and budget financing differences. Each of these accounts is then compared with its respective budget for a specific period.

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	Catatan
2019	211.467.726.000	195.685.169.459	92,54%	
2020	243.960.199.000	208.269.277.734	85,37%	Penurunan terjadi disebabkan pemotogan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk penanganan covid 19
2021	181.783.991.000	178.583.512.284	98,24%	
2022	215.618.760.000	213.502.849.440	99,02%	
2023	295.106.419.000	295.324.440.555	100,07%	Realisasi belanja pegawai melebihi pagu anggaran

Catatan : Hasil Evaluasi Menpan TA.2019 - 2023

## ANGGARAN DAN PENYERAPAN BUDGET AND REALIZATION



**DIPA PPATK** Tahun 2024 yang terbagi dalam 2 Program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen sebesar

**Rp181.891.891.000,00;**

2. Program Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT sebesar **Rp61.877.735.000,00.**

**The 2024 budget for PPATK divided into two programs:**

1. Management Support Program: **Rp181,891,891,000**

2. Money Laundering and Terrorism Financing Prevention and Eradication Program:

**Rp61,877,735,000**

JENIS BELANJA TYPES OF EXPENDITURE	ANGGARAN BUDGET	REALISASI (Neto) REALIZATION	PERSENTASE (%) PERCENTAGE
Belanja Pegawai Personnel Expenditure	RP. 140.368.909.000	RP. 100.659.577.242	71,71%
Belanja Barang Operational Expenditure	Rp. 98.576.197.000	RP. 44.256.307.246	44,90%
Belanja Modal Capital Expenditure	RP. 4.824.520.000	RP. 357.364.800	7,41%
<b>Total</b>	<b>RP. 243.769.626.000</b>	<b>RP. 145.273.249.288</b>	<b>51,01%</b>

## AGAR KERJA SELALU ON THE TRACK TO ENSURE THE WORK STAYS ON TRACK

Inspektorat PPATK sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berkomitmen untuk selalu meningkatkan peran dan layanan yang diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkungan PPATK, serta selalu adaptif terhadap perkembangan teknologi khususnya pada era tahun politik. Hal ini sejalan dengan tema besar yang diusung Inspektorat dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat Tahun 2024, yaitu "Mewujudkan Integritas dan Efektivitas Peran PPATK Pada Tahun Politik Melalui Excellent Supervision Services Berbasis Teknologi Informasi". Pada kegiatan tersebut, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, bersama dengan Plh. Inspektur, Nelson Manalu, turut menetapkan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Tahun 2024 dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat di tahun 2024.

Dalam implementasi pelaksanaan pengawasan, Inspektorat bertransformasi menuju pengawasan berbasis teknologi informasi, dengan dimanfaatkannya Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dalam pengawasan assurance, dan pemanfaatan sistem e-Consult dalam pengawasan konsultasi. Pemanfaatan teknologi informasi pendukung lainnya seperti layanan pengaduan Whistleblowing System dan Social Media Monitoring pun turut membantu Inspektorat dalam menghadirkan pengawasan yang menyeluruh, khususnya dalam rangka menegakkan integritas dan memitigasi adanya penyimpangan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara di lingkungan PPATK pada tahun politik.

Selain itu, pada periode semester I tahun 2024 ini, Inspektorat telah turut mengawal Pembangunan Zona Integritas, pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi, review implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, pendampingan pelaksanaan Survei Penilaian Integritas KPK, serta turut mengawasi sistem keuangan nasional melalui review Laporan Keuangan, review Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa, review Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan, hingga Pendampingan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan PPATK.

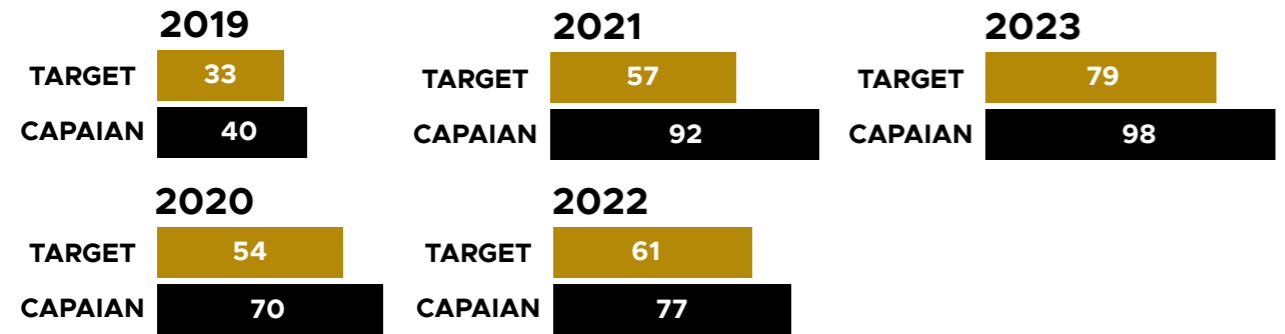
The Inspectorate of PPATK, as a Government Internal Supervisory Apparatus, remains steadfast in its commitment to enhancing its role and services to all PPATK stakeholders. Embracing technological advancements, particularly during the political year, aligns with the overarching theme of the 2024 Inspectorate Supervision Coordination Meeting: "Realizing the Integrity and Effectiveness of PPATK's Role in the Political Year Through Excellent Supervision Services Based on Information Technology." During this event, Head of PPATK Ivan Yustiavandana and Acting Inspector Nelson Manalu established the 2024 Inspectorate Supervision Policy and the 2024 Annual Supervision Work Program, which will guide the Inspectorate's supervisory activities throughout the year.

The Inspectorate is transforming towards technology-based supervision by utilizing the Information System for Supervisory Management and the e-Consult system for supervisory consultations. Additional technological tools such as the Whistleblowing System and Social Media Monitoring enhance the Inspectorate's capacity for comprehensive oversight, particularly in upholding PPATK employee integrity during the political year.

Additionally, in the first semester of 2024, the Inspectorate has actively supervised the Integrity Zone Development, the implementation of the Bureaucratic Reform action plan, and the Electronic-Based Government System. It has also assisted with the KPK Integrity Assessment Survey, reviewed Financial Statements, monitored Budget Absorption and Procurement of Goods and Services, and supported the Audit Board's audit of PPATK Financial Statements.



### CAPAIAN REALISASI PENGAWASAN INTERNAL 2019-2023 INTERNAL CONTROL ACHIEVEMENT STATISTICS 2019-2023



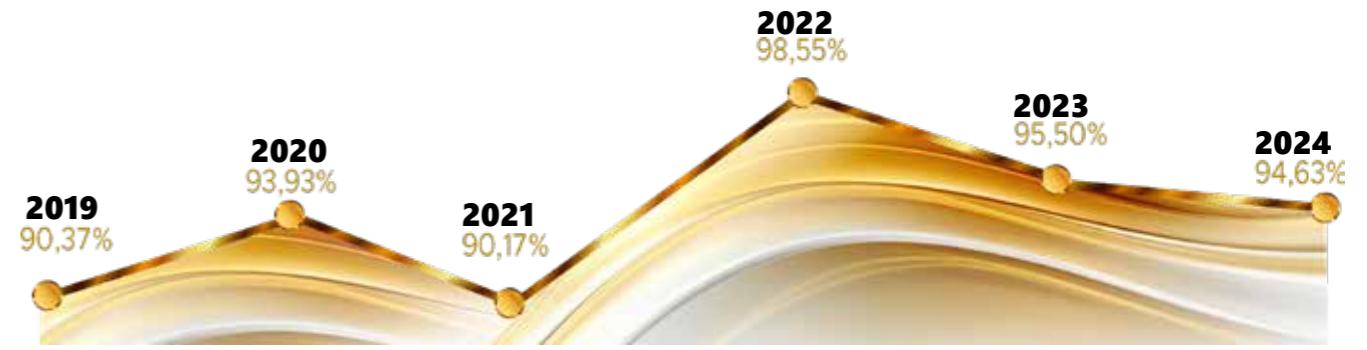
### SKOR KAPABILITAS APIP TAHUN 2019 - 2023 GOVERNMENT INTERNAL AUDIT CAPABILITY SCORE 2019-2023



### NILAI RATA-RATA AUDIT KEARSIPAN EKSTERNAL 2019-2023 AVERAGE VALUE OF EXTERNAL ARCHIVES AUDIT 2019-2023

Akreditasi Kearsipan merupakan program kerja kerja Pusat Akreditasi Kearsipan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai upaya pemerintah dalam menjamin mutu penyelenggara kearsipan, PPAK salah satu dari beberapa kementerian yang telah berhasil mendapatkan nilai yang **Sangat Memuaskan** dalam 5 tahun terakhir 2019-2023

Archives Accreditation is a program administered by the Archives Accreditation Center at the National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI), aimed at ensuring the quality of archive management organizations. PPAK is among the government institutions that achieved a **"Very Satisfactory"** score category in the last five years (2019-2023).



### HISTORI NILAI BMN PPAK 2019-2023 HISTORY OF BMN PPAK VALUES 2019-2023

Penatausahaan aset pada PPAK dilaksanakan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Berikut nilai perolehan BMN pada 5 tahun terakhir 2019 s/d 2023

Asset administration at PPAK is conducted through the Agency Level Financial Application System (SAKTI). The total value of State-Owned Assets managed by PPAK from 2019 to 2023 is as follows:



## BIJAK KELOLA BARANG MILIK NEGARA PROPER MANAGEMENT OF STATE-OWNED ASSETS

Sepanjang semester I tahun 2024, PPATK telah melakukan pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Dari proses ini, telah tercatat kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp25.442.696. Pemindahtanganan ini ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan PPATK Nomor 248 Tahun 2024 sebagai dasar penghapusan barang milik negara dari daftar aset, dan proses tersebut direkam dalam aplikasi SIMANv2.

Selain itu, PPATK telah mengajukan permohonan pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan nilai di atas Rp100 juta sesuai surat permohonan Kuasa Pengguna Barang PPATK Nomor B/31/PL.02.09/V/2024 tanggal 31 Mei 2024. Saat ini, proses penilaian sedang dilakukan oleh KPKNL Jakarta IV untuk menetapkan nilai limit barang yang kemudian dilanjutkan dengan proses lelang.

Throughout the first semester of 2024, PPATK has diligently executed the transfer and elimination of State Property in accordance with the Minister of Finance Regulation. This process resulted in a Non-Tax State Revenue contribution of Rp25,442,696. The alienation of state property was formalized with the issuance of PPATK Decree Number 248 of 2024, which served as the basis for removing these assets from the asset list. This entire procedure was meticulously recorded in the SIMANv2 application.

Additionally, PPATK has submitted an application for the alienation of State Property valued above Rp100 million, as per the application letter of the PPATK Property User Authorization Number B/31/PL.02.09/V/2024 dated May 31, 2024. The appraisal process is currently underway by KPKNL Jakarta IV to determine the limit value of these goods, which will then proceed to the auction phase.

## PENATAUSAHAAN ASET ASSET ADMINISTRATION

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penatausahaan aset pada lembaga pemerintah meliputi pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara. Pada tahun ini, nilai dan proporsi jenis BMN di kantor pusat PPATK telah dicatat dengan baik, nilai tersebut berdasarkan nilai buku BMN, sebagaimana grafik berikut ini:

In line with Government Regulation Number 28 of 2020, which amends Government Regulation Number 27 of 2014 concerning the Management of State/Regional Property, asset administration within government institutions includes the recording, inventorying, and reporting of state property. This year, the value and proportion of various types of BMN (State Property) at PPATK headquarters have been accurately recorded, as illustrated in the following graph:



PPATK saat ini sedang melaksanakan inventarisasi BMN, dengan progres hingga 5,15% atau 356 unit dari total inventaris. Inventarisasi tahun 2024 difokuskan pada Barang Milik Negara dengan Kartu Identitas Barang (KIB) yang meliputi 71 Barang milik negara yang terdiri dari 1 tanah, 1 bangunan, 37 kendaraan, dan 32 alat besar.

PPATK is currently conducting an inventory of BMN, with progress reaching 5.15%, equivalent to 356 units of total inventory. The 2024 inventory is focused on State Property listed on the Goods Identity Card, which includes 71 items: 1 parcel of land, 1 building, 37 vehicles, and 32 pieces of large equipment.



# REFLEKSI AKHIR TAHUN PPATK 2023

## PPATK YEAR-END REFLECTION 2023

PPATK sukses menggelar refleksi akhir tahun pada Rabu (10/1) di Lobby Gedung PPATK. Acara ini dihadiri oleh 23 media undangan dan bertujuan mendiseminasikan capaian dan kinerja PPATK sepanjang tahun 2023 serta proyeksi kerja di tahun 2024.

PPATK, sebagai pusat pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM), terus berupaya menjaga transparansi dan akuntabilitas. Salah satu pencapaian besar PPATK pada tahun 2023 adalah keanggotaan Indonesia di *Financial Action Task Force* (FATF) yang resmi sejak 25 Oktober 2023. Hal ini merupakan hasil perjuangan panjang sejak Indonesia ditetapkan sebagai *observer* FATF pada 29 Juni 2018 melalui proses *Mutual Evaluation* (ME).

Selain itu, PPATK telah menginisiasi pembentukan *Collaborative Analysis Team* (CAT) sebagai wujud kolaborasi informasi antara sektor publik dan swasta. Melalui *Public-Private Partnership* (PPP) ini, PPATK bersama Pihak Pelapor (PP), Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), serta Aparat Penegak Hukum (APH) mengawasi transaksi keuangan ilegal, terutama yang terkait dengan kegiatan Pemilu 2024. Refleksi akhir tahun ini juga memaparkan berbagai kegiatan analisis dan pemeriksaan, capaian prestasi lembaga, serta proyeksi kerja yang akan dilakukan PPATK di tahun 2024.

PPATK successfully held a year-end reflection on Wednesday, January 10th, 2024, in the PPATK Building Lobby. The event, attended by 23 media representatives, aimed to share PPATK's achievements and performance throughout 2023 as well as work projections for 2024.

PPATK, as the center for preventing and eradicating Money Laundering, Terrorism Financing, and Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, continues to strive to maintain transparency and accountability. One of PPATK's major achievements in 2023 is Indonesia's official membership in the Financial Action Task Force (FATF) since October 25, 2023. This membership marks the culmination of efforts since Indonesia was appointed as a FATF Observer on June 29, 2018, through the Mutual Evaluation process.

Additionally, PPATK has initiated the formation of a Collaborative Analysis Team (CAT) to enhance information collaboration between the public and private sectors. Through this Public-Private Partnership (PPP), PPATK, together with Reporting Parties, Supervisory and Regulatory Institutions, and Law Enforcement Agencies, monitors illegal financial transactions related to the 2024 election activities. This year-end reflection also detailed various analysis and audit activities, institutional achievements, and the work projections for PPATK in 2024.



Refleksi Akhir Tahun 2023  
End of Year Reflection 2023





# STATISTIK EKSPOSUR BERITA PPATK

## PPATK NEWS EXPOSURE STATISTICS

**9200**

PEMBERITAAN/NEWS

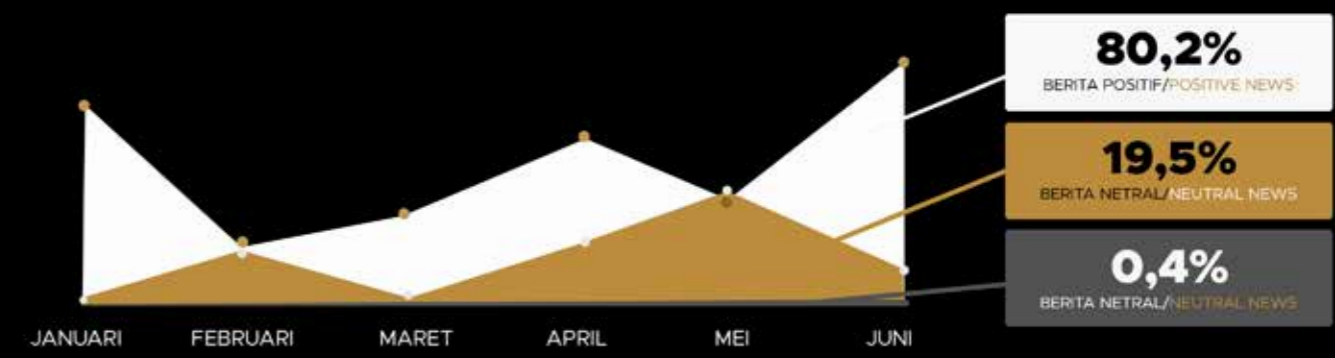
### JAGA SENTIMEN PUBLIK PRESERVE PUBLIC SENTIMENT

**Kinerja optimal** Humas (Hubungan Masyarakat) PPATK berikan kontribusi terhadap eksposur institusi selama periode 1 Januari–25 Juni 2024. Total pemberitaan mengenai PPATK mencapai 9.200 ekspos, dengan dominasi di media *online* sebanyak 8.670 berita, media cetak 398 berita, dan 132 pemberitaan di media TV. Media *online* paling aktif mengulas isu PPATK antara lain pikiran-rakyat.com, tribunnews.com, dan kompas.com, sementara Kompas dan Media Indonesia mendominasi pemberitaan di media cetak. Secara keseluruhan, sentimen positif mendominasi dengan 80,2% dari total narasi pemberitaan terkait PPATK. Sentimen netral tercatat 19,5%, dan hanya 0,4% yang bernada negatif. Berita paling banyak membahas isu maraknya judi online, diikuti oleh refleksi kerja PPATK 2023.

Selain itu, Humas PPATK juga berhasil meningkatkan jangkauan edukasi publik melalui media sosial. Kanal YouTube PPATK mengalami peningkatan 465 *subscriber*, sementara rata-rata jangkauan di *Facebook*, *Instagram*, *Twitter (X)*, *YouTube*, dan *TikTok* mencapai 166.845,66 tayangan. Tingginya eksposur media massa dengan nada positif ini memberikan semangat lebih bagi PPATK dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diberikan. Peningkatan jumlah pengikut di media sosial juga memotivasi PPATK untuk terus mempersembahkan yang terbaik bagi masyarakat.

**The effective performance** of PPATK's Public Relations department significantly enhanced the institution's visibility during the first semester of 2024. The total media coverage about PPATK reached 9,200 exposures, with online media leading at 8,670 stories, followed by print media with 398 stories and TV media with 132 stories. Online platforms such as pikiran-rakyat.com, tribunnews.com, and kompas.com were the most active in covering PPATK-related issues, while print media coverage was mainly led by Kompas and Media Indonesia. Sentiment analysis showed that news about PPATK was largely positive, making up 80.2% of the coverage. Neutral sentiment was at 19.5%, and negative sentiment was only 0.4%. The most discussed topics included the rise of online gambling and reflections on PPATK's work in 2023.

PPATK's Public Relations also successfully expanded public education through social media. The PPATK YouTube channel gained 465 subscribers, and the average reach across Facebook, Instagram, Twitter (X), YouTube, and TikTok reached 166,845 views. This substantial media exposure, with a mainly positive narrative, provides encouragement for PPATK as it continues its duties. The growth in social media followers also motivates PPATK to consistently deliver quality information to the public.



INDONESIA  
OFFICIAL 40TH MEMBER  
SINCE OCTOBER 2023



## CEGAH PENCUCIAN UANG MELALUI LITERASI PREVENTING MONEY LAUNDERING THROUGH LITERACY

PPATK percaya, kekuatan literasi sebagai salah satu senjata yang ampuh untuk mencegah terjadinya praktik *money laundering* atau pencucian uang. Dengan literasi, seseorang memiliki pengetahuan, informasi dan pedoman sehingga dapat bertindak dengan rasional. Lebih jauh, seseorang yang berliterasi dapat berkontribusi dalam masyarakat dengan cara yang positif. Yakni berbagi pengetahuan yang dimiliki, menebarkan nilai-nilai kebaikan dan kejujuran. Upaya penguatan literasi yang dilakukan PPATK adalah dengan perbaikan ruang perpustakaan, membangun manajemen pengetahuan dan pembuatan Jurnal AML/CFT.

PPATK believes that literacy is a powerful weapon in the fight against money laundering. Literacy provides individuals with the knowledge, information, and guidelines necessary to act rationally. A literate person can contribute positively to society by sharing their knowledge and promoting values of integrity and honesty. PPATK's efforts to enhance literacy include improving the library space, building knowledge management systems, and creating an AML/CFT Journal.



Kunjungan Perpustakaan PPATK  
PPATK Library Visit



## WAJAH BARU PERPUSTAKAAN THE NEW FACE OF PPATK LIBRARY

Setelah dilakukan renovasi selama dua tahun, perpustakaan PPATK kini memiliki wajah baru. Nuansa interiornya, bergaya *co-working space* yang modern, dengan layanan berbasis teknologi terkini. Seperti penyediaan informasi dan literatur digital melalui aplikasi ChatGPT 4.0, kompas digital, tempo digital, serta PPATK Digipus.

Kepala PPATK Ivan Yuustivandana menyematkan nama seorang pahlawan nasional yaitu "Teungku Chik Tanoh Abee" untuk nama perpustakaan PPATK. Teungku Chik Tanoh Abee merupakan pahlawan dari Aceh yang pernah berjuang melawan Belanda mengoleksi manuskrip kuno dan kitab-kitab ulama terdahulu. Penyematan nama ini diharapkan menjadi teladan bagi fungsi Perpustakaan PPATK untuk dapat berkontribusi dalam menjaga manuskrip-manuskrip karya-karya PPATK dan rezim agar diwariskan kepada generasi bangsa Indonesia di masa yang akan datang.

Perpustakaan PPATK saat ini terdapat 4.298 judul buku, 72 konten digital, dan 7.981 eksemplar dengan fokus pada topik yang terkait APUPPT. Selain itu, Perpustakaan PPATK menyediakan bacaan fiksi dan non-fiksi seperti novel, pengembangan diri, biografi, dan keagamaan.

After two years of renovation, the PPATK library now features a modern *co-working space* design, equipped with the latest technology-based services such as digital information and literature access through applications like ChatGPT 4.0, Digital Compass, Digital Tempo, and PPATK Digipus.

PPATK Head Ivan Yustiavandana honored the library with the name "Teungku Chik Tanoh Abee," after a national hero from Aceh who fought against the Dutch and collected ancient manuscripts and scholarly works. This name symbolizes the library's mission to preserve and pass on PPATK's works and knowledge to future generations.

Currently, the PPATK Library houses 4,298 book titles, 72 digital contents, and 7,981 copies, with a focus on topics related to Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML-CFT). The library also offers a variety of fiction and non-fiction readings, including novels, self-development books, biographies, and religious literature.



Kunjungan Perpustakaan PPAK  
PPATK Library Visit



**STATISTIK PERPUSTAKAAN SEMESTER 1 TAHUN 2024:**  
LIBRARY STATISTICS SEMESTER 1 2024:

**KOLEKSI MONOGRAFI PERPUSTAKAAN**  
LIBRARY MONOGRAPH COLLECTION

**4487** JUDUL/TITLE

**8251** EKSEMPLAR/COPY

**KOLEKSI DIGITAL PERPUSTAKAAN**  
LIBRARY DIGITAL COLLECTION

**10091** JUDUL/TITLE

**STATISTIK KUNJUNGAN PERPUSTAKAAN**  
LIBRARY VISIT STATISTICS

**868** PENGUNJUNG/VISITOR

**SIRKULASI PEMINJAMAN KOLEKSI**  
COLLECTION LOAN CIRCULATION

**652** PEMINJAMAN/LOAN

**SIRKULASI KOLEKSI DIGITAL**  
COLLECTION DIGITAL CIRCULATION

**233** JUDUL/TITLE

**AGAR PENGETAHUAN TAK LEKANG OLEH WAKTU**  
**KEEPING KNOWLEDGE TIMELESS**

**Pengetahuan** ibarat air. Jika tidak dialirkan atau dibagikan, manfaat yang terkandung tidak akan sampai. Air dan pengetahuan adalah sumber kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Jika tidak ada pengetahuan, maka manusia seperti mati, tidak ada kehidupan. Setiap pegawai adalah aset pengetahuan bagi lembaganya. PPAK menyadari para pegawainya memiliki beragam pengetahuan yang menjadi aset berharga dalam sebuah organisasi. Agar aset pengetahuan tersebut terus bermanfaat, maka harus dijaga dan dilestarikan. Salah satunya, adalah dengan membangun Knowledge Management System (KMS) atau Manajemen Pengetahuan (MP). Langkah awal yang dilakukan yaitu dengan membuat regulasi dalam pengelolaan manajemen pengetahuan di PPAK. Diterbitkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 119a Tahun 2024 Tentang Pengelola Manajemen Pengetahuan. Dimana dalam keputusan tersebut ditetapkan Tim Pengelola manajemen pengetahuan dengan tugas merencanakan dan mengelola manajemen pengetahuan yang terdiri dari proses pengumpulan, pengelolaan, pengorganisasian dan bagi pakai pengetahuan. Tim Pengelola ini sebagai perwakilan dari tiap-tiap unit kerja di lingkungan PPAK, untuk mengkoordinir manajemen pengetahuan pegawai.

**Knowledge** is like water: its benefits are realized only when shared. PPAK acknowledges that its employees possess a wealth of knowledge, which is a valuable asset to the organization. To ensure this knowledge remains useful, it must be maintained and preserved through a Knowledge Management System (KMS).

The first step was the issuance of the Decree of the Head of the Financial Transaction Reports and Analysis Center Number 119a of 2024 concerning Knowledge Management Managers. This decree established a Knowledge Management Team tasked with planning and managing the collection, organization, and dissemination of knowledge. Each work unit in PPAK is represented on this team to coordinate the management of employee knowledge.





## WADAH PENELITI BAHAS MONEY LAUNDERING RESEARCHER PLATFORM TO DISCUSS MONEY LAUNDERING

Isu money laundering atau pencucian uang sudah menjadi diskursus intelektual dan banyak dibahas secara ilmiah. Mengingat semakin banyaknya praktik pencucian uang dengan berbagai modus yang canggih, pelakunya pun merupakan orang-orang yang berpendidikan tinggi, menarik para peneliti untuk membahas sebuah gagasan. Gagasan ini dituangkan ke dalam sebuah karya ilmiah yang diharapkan dapat berkontribusi dalam perlawanan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT).

PPATK memfasilitasi gagasan para peneliti terkait APUPPT ini dalam bentuk Jurnal Anti Money Laundering dan Countering the Financial Terrorism (AML/CFT). Jurnal AML/CFT ini sekaligus sebagai sarana diseminasi hasil-hasil penelitian terkait APUPPT. Jurnal APUPPT ini tentu akan sangat berguna bagi para pemangku kepentingan untuk dijadikan sebagai rujukan dalam pelaksanaan program APUPPT. Baik dalam penyusunan kebijakan, regulasi, maupun implementasinya.

The issue of money laundering has become a significant topic of intellectual discourse and scientific investigation. Given the sophisticated methods and highly educated perpetrators involved, researchers are increasingly drawn to explore and discuss ideas related to this crime.

PPATK facilitates these discussions through the Anti Money Laundering and Countering the Financial Terrorism (AML/CFT) Journal. This journal serves as a platform for disseminating research results and ideas related to AML-CFT, contributing to the fight against money laundering and terrorism financing. It provides valuable insights for stakeholders and serves as a reference for policy formulation, regulation, and implementation in the AML-CFT programs.

By strengthening literacy and promoting the dissemination of knowledge, PPATK aims to enhance the effectiveness of its efforts to combat money laundering and support the integrity of Indonesia's financial system.

## EDUKASI ANTI PENCIUCIAN UANG ANTI-MONEY LAUNDERING EDUCATION

Pada semester pertama tahun 2024, PPATK aktif menggelar berbagai kegiatan edukasi publik yang menjangkau beragam lapisan masyarakat. Salah satu program unggulannya adalah "PPATK Mengajar," yang menyasar siswa-siswi sekolah menengah atas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tak hanya fokus pada kalangan pelajar, PPATK juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan edukasinya. PPATK juga mengadakan audiensi dan diskusi dengan organisasi non-pemerintah (NGO), pemerintah daerah, serta lembaga internasional seperti pemerintah Timor Leste.

Guna menyebarkan informasi lebih luas, PPATK berkolaborasi dengan sejumlah media ternama, termasuk kunjungan media pun turut digelar di Bali awal tahun lalu. Selain itu, melalui program daring "Jadi Tahu" yang ditayangkan di kanal liputan6.com, PPATK juga berhasil menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Program-program edukasi ini merupakan komitmen PPATK untuk terus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu krusial terkait pencucian uang dan upaya pencegahannya. Upaya ini tentu sejalan dengan pemenuhan intermediate outcome dari FATF, menunjukkan dedikasi PPATK terhadap pencegahan kejahatan keuangan. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat lebih waspada dan berperan aktif dalam mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia.

In the first semester of 2024, the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) actively engaged in various public education initiatives, reaching multiple segments of society. A standout program was "PPATK Mengajar," which targeted high school students to raise their awareness about the importance of preventing and eradicating money laundering and terrorism financing. PPATK extended its educational efforts beyond students, collaborating with a diverse array of stakeholders, including non-governmental organizations (NGOs), local governments, and international entities like the government of Timor Leste. This broad approach ensured that their educational reach was expansive and impactful.

To disseminate information more effectively, PPATK partnered with several prominent media outlets. A notable event was a media visit held in Bali earlier this year, enhancing the visibility of their efforts. Additionally, the online program "Jadi Tahu," aired on the liputan6.com channel, allowed PPATK to reach a wider and more varied audience. These educational programs underscore PPATK's commitment to improving public understanding of critical issues related to money laundering and its prevention. This aligns with the intermediate outcomes of the Financial Action Task Force (FATF), demonstrating PPATK's dedication to combating financial crime. Through these efforts, the public is expected to become more vigilant and play a proactive role in preventing money laundering and terrorism financing in Indonesia.



**STATISTIK KEGIATAN EDUKASI PUBLIK**  
**NUMBER OF PUBLIC EDUCATION ACTIVITIES**



**KOLABORASI PENTAHHELIX**

**PENTAHHELIX COLLABORATION**

Pemberantasan pencucian uang di Indonesia semakin menguat berkat kolaborasi lintas sektor yang dilakukan oleh PPATK. Melalui pendekatan *pentahelix collaboration*, PPATK berhasil menggandeng berbagai *stakeholder* kunci untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap praktik TPPU karena pada dasarnya PPATK tidak bisa menjalankan kegiatan edukasi sendiri tanpa melibatkan berbagai pihak.

Selama semester pertama tahun 2024, upaya kolaborasi yang diprioritaskan PPATK menghasilkan kerjasama aktif dengan berbagai pihak. Instansi pemerintah tercatat menjadi mitra terbanyak dengan 12 lembaga, selanjutnya diikuti institusi pendidikan yang turut berperan penting dengan 9 lembaga. Strategi kolaborasi lintas sektor ini tidak hanya memfokuskan pada sekolah dan instansi pemerintah, tetapi juga melibatkan media, pelaku usaha, NGO, dan masyarakat umum.

Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci keberhasilan dalam mengedukasi masyarakat tentang risiko pencucian uang. Melalui pendekatan ini, informasi terkini tentang bahaya TPPU dapat tersebar lebih luas, menciptakan kesadaran kolektif dan tanggapan proaktif dalam melawan kejahatan finansial.

The fight against money laundering in Indonesia has been significantly strengthened through the efforts of PPATK and its *pentahelix collaboration* approach. This strategy has enabled PPATK to join forces with key stakeholders across various sectors to enhance public understanding of money laundering (ML) practices. Recognizing that educational activities cannot be effectively conducted in isolation, PPATK has engaged multiple parties to maximize outreach and impact.

In the first semester of 2024, PPATK prioritized collaboration, resulting in active partnerships with a wide range of entities. Government agencies emerged as the most frequent collaborators, with 12 institutions participating. Educational institutions also played a critical role, with 9 schools and universities contributing to the effort. This broad collaboration extended beyond schools and government agencies to include the media, businesses, NGOs, and the general public.

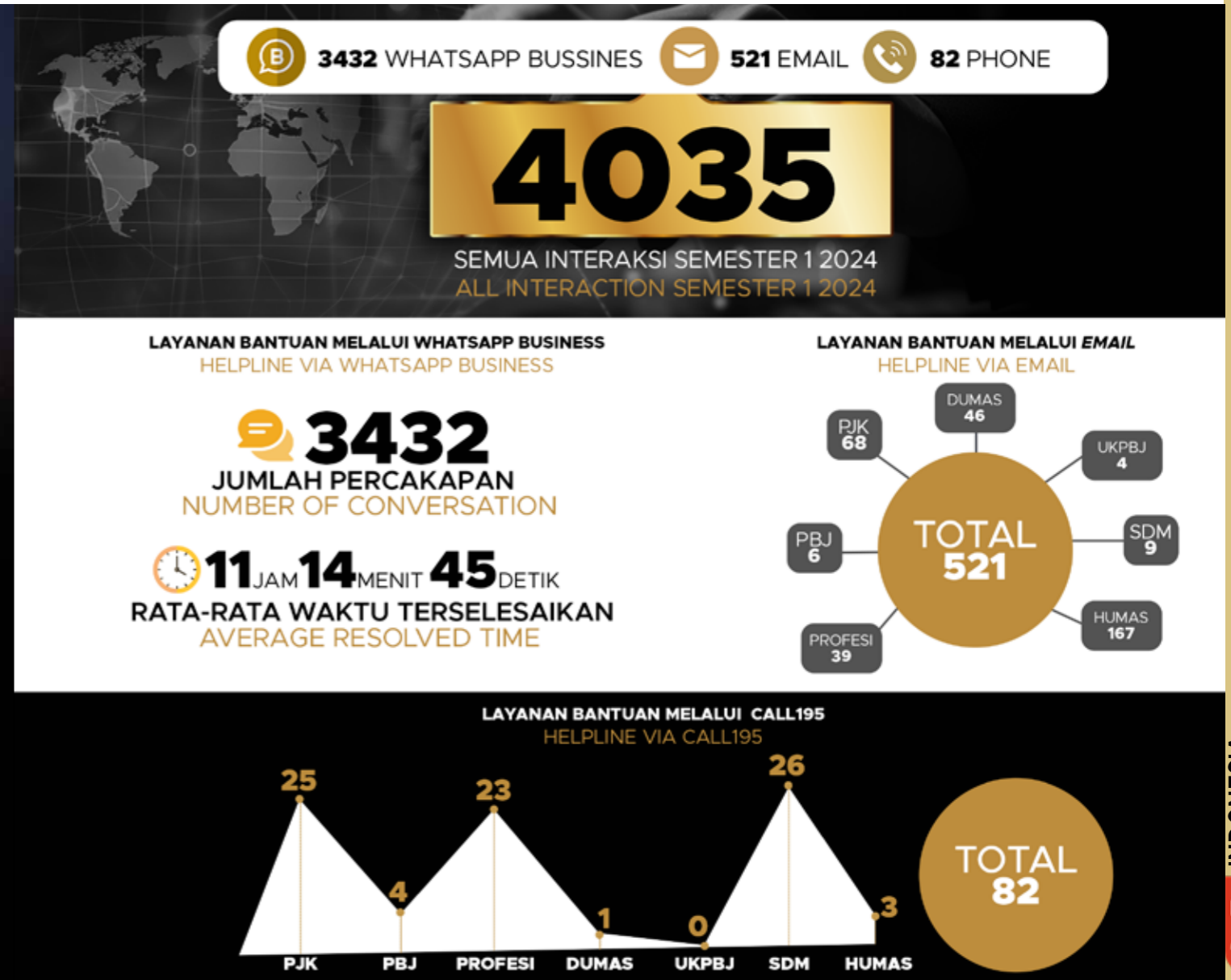
This cross-sector collaboration has been crucial in educating the public about the risks and consequences of money laundering. By leveraging the strengths and reach of various sectors, PPATK has been able to disseminate up-to-date information more widely, fostering collective awareness and a proactive stance against financial crime. The success of this approach lies in its ability to create a united front, ensuring that the dangers of money laundering are understood and addressed by all segments of society.



**STATISTIK KOLABORASI EDUKASI PUBLIK**  
 STATISTICS OF THE NUMBER COLLABORATION PUBLIC EDUCATION



**STATISTIK LAYANAN BANTUAN**  
 HELPLINE STATISTICS



**STATISTIK PENGADUAN MASYARAKAT**  
HELPLINE STATISTICS

**105**

STATISTIK PEGADUAN MASYARAKAT (SEMESTER 1 TAHUN 2024)  
PUBLIC COMPLAINTS STATISTICS (SEMESTER 1 YEAR 2024)

APLIKASI/ APPLICATION



**8**

TATAP MUKA/IN-PERSON VISIT



**78**

EMAIL



**15**

SURAT/LETTER



**4**

**JENIS LAPORAN**  
TYPE OF REPORT

INDIVIDU/INDIVIDUAL



**37**

LEMBAGA/ORGANIZATION



**68**

**SEJARAH PUSDIKLAT**

IFII HISTORY

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Pusdiklat APUPPT) dibangun pada tahun 2016 yang disimbolkan dengan peletakan batu pertama pada tanggal 4 April 2016. Setelah pembangunan selama 1 tahun 7 bulan, Pusdiklat APU PPT diresmikan pada tanggal 30 November 2017 oleh Menko Polhukam, Dr. H. Wiranto, S.H., S.I.P., M.M.

Pusdiklat APU PPT merupakan mitra kerja (*business partner*) dalam pencapaian visi dan misi PPAATK. Peranyag dilakukan Pusdiklat APUPPT diantaranya melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Pusdiklat APU PPT memiliki tugas dalam meningkatkan kapabilitas SDM rezim APU PPT, baik pihak pelapor, aparat penegak hukum, lembaga pengawas dan pengatur, profesi, SDM internal PPAATK serta pemangku kepentingan lainnya.

The Indonesia Financial Intelligence Institute (IFII) was established in 2016, with the groundbreaking ceremony held on April 4, 2016. After 1 year and 7 months of construction, the AML/CFT Training Center was officially inaugurated on November 30, 2017, by the Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs, Dr. Wiranto.

IFII is a crucial partner in achieving PPAATK's vision and mission. Its role encompasses education and training in the fields of preventing and eradicating money laundering and terrorism financing. IFII is tasked with enhancing the capabilities of human resources within the AML/CFT regime, including reporting parties, law enforcement officials, supervisory and regulatory agencies, professionals, PPAATK personnel, and other stakeholders.

Gedung Pusdiklat APUPPT  
IFII Building



## MEMBANGUN KEAHLIAN, MELAWAN KEJAHATAN BUILDING EXPERTISE, COMBATING CRIME

Setiap harinya PPATK menemukan berbagai tantangan pemberantasan pencucian uang yang kian meningkat. Oleh karena itu, PPATK terus membangun keahlian para pegawainya dengan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas kompetensi dan pelatihan melalui Unit Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT. Pusdiklat APUPPT juga memegang peranan penting dalam penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia melalui peningkatan kompetensi dan pemahaman pemangku kepentingan rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT). Pada periode semester 1 tahun 2024, Pusdiklat APUPPT telah menyelenggarakan 24 *batch* pelatihan yang diikuti oleh Aparat Penegak Hukum, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Pihak Pelapor, dan pegawai PPATK.

No	Metode	Jumlah Penyelenggaraan	Peserta
1	Tatap Muka/ <i>Offline</i>	14	483
2	<i>Blended Learning</i>	6	198
3	<i>E-learning</i>	4	224
<b>Total</b>		<b>24</b>	<b>905</b>

Sejak diterimanya Indonesia sebagai anggota penuh FATF pada Oktober 2023, Pusdiklat APU PPT mengadakan pelatihan pra *assessor* untuk mendukung persiapan perwakilan Indonesia mengikuti FATF Assessor Training. Pelatihan ini diselenggarakan melalui tiga metode: Tatap Muka, *Blended Learning*, dan *E-learning*. Metode *blended learning* menggabungkan belajar mandiri dan tatap maya, sementara *e-learning* memungkinkan akses pelatihan lebih luas tanpa batasan geografis.

Pusdiklat APUPPT juga mengadakan pelatihan bagi Pihak Pelapor yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan ke PPATK. Bagi pegawai PPATK, pelatihan berfungsi untuk meningkatkan kemampuan analisis untuk menghasilkan laporan yang akurat dan berkualitas yang akan disampaikan kepada aparat penegak hukum. Adapun Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum berfokus pada peningkatan keterampilan investigasi keuangan, pemahaman kriminalisasi TPPU, dan penanganan kasus TPPU.

Every day, PPATK encounters increasing challenges in combating money laundering. Therefore, PPATK continually enhances the expertise of its employees through various competency improvement activities and training provided by the Indonesia Financial Intelligence Institute (IFII). IFII also plays a crucial role in enforcing anti-money laundering laws in Indonesia by enhancing the competence and understanding of stakeholders in the Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AML/CFT) regime. During the first semester of 2024, IFII organized 24 training sessions attended by law enforcement officials, supervisory and regulatory institutions, reporting parties, and PPATK employees.

Following Indonesia's acceptance as a full member of the Financial Action Task Force (FATF) in October 2023, the AML/CFT Training Center has conducted pre-assessor training to prepare Indonesian representatives for FATF Assessor Training. These training sessions were delivered through three methods: face-to-face, e-learning, and blended learning.

IFII also conducts training for reporting parties to improve the quality of their reports to PPATK. For PPATK employees, the training aims to enhance the skills of analysts in producing accurate and high-quality reports for law enforcement officials. The training for law enforcement officials focuses on improving financial investigation skills, understanding the criminalization of money laundering, and effectively handling money laundering cases.

## STATISTIK PELATIHAN SEJAK 2019-2023 TRAINING STATISTICS IN 2019-2023

Dalam rangka mendorong keberhasilan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia, Pusdiklat APUPPT pada periode 2019-2023 telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan kepada para *stakeholder* untuk meningkatkan kompetensi terkait dengan literasi pencucian uang.

To enhance the success of Money Laundering Prevention and Eradication in Indonesia, the PPATK Training Center conducted training activities for stakeholders from 2019 to 2023 aimed at enhancing competencies related to money laundering literacy.





# PENGHARGAAN

AWARDS

## TAK BERPUAS DIRI, DENGAN SEJUMLAH PRESTASI "Achievements Driving Excellence"

Banyaknya prestasi yang diterima PPATK, tidak menjadikan lembaga ini cepat berpuas diri. Pencapaian Justru berperan sebagai 'pecut' semangat kerja pegawai agar bekerja lebih baik dan bernas lagi. Sejumlah penghargaan yang diterima pada semester pertama, menjadi awal semangat kami agar lebih banyak berkontribusi untuk negeri.

The numerous achievements attained by PPATK do not lead to complacency within the institution. Instead, these accomplishments serve as a catalyst, invigorating work enthusiasm and encouraging employees to perform better and with greater dedication. The awards received in the first semester act as a springboard, inspiring us to contribute even more to the country.



**TINGKATKAN TATA KELOLA TI, PPATK RAIH SERTIFIKASI SNI ISO/IEC 27001:2022 STATISTICS IMPROVING IT GOVERNANCE: PPATK ACHIEVES SNI ISO/IEC 27001:2022 CERTIFICATION**

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui Unit Kerja Pusat Teknologi Informasi telah meraih Sertifikasi SNI ISO/IEC 27001:2022, sebuah pencapaian penting dalam tata kelola teknologi informasi (TI) dan pengelolaan risiko keamanan informasi. Sertifikasi ini menunjukkan komitmen PPATK dalam menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang sesuai dengan standar internasional dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

SNI ISO/IEC 27001:2022 merupakan standar yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan informasi serta dirancang untuk memastikan seleksi kontrol keamanan yang memadai dan proporsional. Standar ini melindungi informasi dari risiko keamanan yang meliputi kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*). Melalui sertifikat ini, PPATK menunjukkan kemampuannya dalam mengelola dan melindungi data dari ancaman keamanan informasi.

Sebagai upaya meningkatkan dan mempertahankan standar keamanan informasi, PPATK juga telah melaksanakan berbagai kegiatan. Hal ini diantaranya termasuk pengembangan dan penerapan kebijakan dan standar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), manajemen risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengelolaan aset TIK, dan penilaian indeks tata kelola TIK. Selain itu, PPATK juga menilai indeks SPBE, indeks *Cyber Security Maturity* (CSM), dan indeks Keamanan Informasi (KAMI), serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia TIK, komunikasi dan kolaborasi, kepatuhan dan audit TIK, dan kesadaran keamanan informasi.

The Information Technology Center at PPATK has attained the SNI ISO/IEC 27001:2022 Certification, marking a significant milestone in the realm of IT governance and information security risk management. This certification underscores PPATK's dedication to implementing an Information Security Management System (ISMS) that aligns with both international standards and Indonesian National Standards (SNI).

The SNI ISO/IEC 27001:2022 standard outlines the requirements for an effective information security management system, ensuring the selection of adequate and proportionate security controls. This standard aims to protect information against various security risks, encompassing confidentiality, integrity, and availability. By achieving this certification, PPATK has demonstrated its capability to manage and safeguard data against potential information security threats.

To uphold and enhance information security standards, PPATK has undertaken several initiatives. These include the development and implementation of Information and Communication Technology (ICT) policies and standards, risk management for the Electronic-Based Government System (SPBE), ICT asset management, and assessments of the ICT governance index. Additionally, PPATK evaluates the SPBE index, Cyber Security Maturity (CSM) index, and Information Security index. Efforts are also directed toward enhancing the capacity and competence of ICT human resources, improving communication and collaboration, ensuring ICT compliance and audit, and raising information security awareness.

**PPATK RAIH PENGHARGAAN SEBAGAI LEMBAGA TERBAIK KEDUA DALAM INDEKS SPBE 2024  
PPATK EARNS RECOGNITION AS RUNNER-UP IN 2024 SPBE INDEX**

Prestasi gemilang kembali diraih oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga terbaik kedua dalam Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024. PPATK meraih nilai 4,24 dengan predikat memuaskan untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Lembaga Non Struktural (LNS), dan instansi lainnya. Prestasi ini menunjukkan komitmen PPATK dalam menciptakan sistem pemerintahan digital yang mudah, murah, dan nyaman serta menjangkau masyarakat luas.

Penghargaan ini diserahkan dalam acara *Digital Government Award* yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Adapun anugerah bergengsi ini diserahkan pada *SPBE Summit 2024* yang berlangsung di Jakarta pada Senin, 27 April 2024. Dengan raihan ini, PPATK semakin memantapkan langkahnya menuju digitalisasi pemerintahan yang lebih baik, memberikan pelayanan yang optimal dan efisien kepada seluruh masyarakat.

PPATK recently achieved significant recognition as the second best institution in the 2024 Electronic-Based Government System (SPBE) Index. Scoring 4.24 (satisfactory) in the category of Non-Ministry Government Institutions (LPNK), Non-Structural Institutions (LNS), and other agencies, PPATK has demonstrated a strong commitment to advancing digital government transformation.

The award was presented at the Digital Government Award event hosted by the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform during the SPBE Summit 2024 in Jakarta on April 27, 2024.

This achievement highlights PPATK's efforts in enhancing government digitalization and improving service delivery for the community.



SPBE Summit 2024  
SPBE Summit 2024



## PPATK TERIMA PENGHARGAAN DI HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL 2024

### PPATK RECEIVES AWARD ON INTERNATIONAL ANTI-NARCOTICS DAY 2024

Pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2024, PPATK meraih penghargaan bergengsi. Acara yang berlangsung pada 26 Juni di SKA Co Ex Convention & Exhibition Center ini, menjadi momen penting dalam upaya nasional melawan narkotika.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Marthinus Hukom, kepada Sekretaris Utama PPATK, Alberd T.B. Sianipar. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi PPATK dalam mendukung Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

Dalam pidatonya, Marthinus Hukom menekankan pentingnya kewaspadaan dini terhadap ancaman narkoba. Ia juga mengajak seluruh pihak dan lapisan masyarakat untuk bersama menjaga komitmen dalam melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Peringatan HANI 2024 ini tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga momen untuk memperkuat kesadaran dan komitmen bangsa dalam menghadapi ancaman narkotika yang terus berkembang. Dengan semangat kebersamaan dan cinta pada Indonesia, diharapkan semua orang bisa menjadi aktor gerakan perlawanan terhadap narkoba.

At the commemoration of International Anti-Narcotics Day (HANI) 2024, PPATK was honored with a prestigious award. The event, held on June 26 at the SKA Co Ex Convention & Exhibition Center, marked a significant moment in the national efforts against narcotics.

The award was presented by the Head of the National Narcotics Agency (BNN), Marthinus Hukom, to PPATK's Principal Secretary, Alberd T.B. Sianipar. This recognition is a testament to PPATK's substantial contribution to the Prevention and Eradication of Abuse and Illicit Trafficking of Narcotics and Narcotic Precursors (P4GN).

In his speech, Marthinus Hukom highlighted the importance of early vigilance against drug threats and called on all sectors of society to maintain a steadfast commitment to combating drug abuse and trafficking.

The commemoration of HANI 2024 served not only as an awarding event but also as a crucial moment to bolster national awareness and commitment to addressing the escalating threat of narcotics. With a spirit of unity and a love for Indonesia, it is hoped that everyone will play a part in the movement against drugs.



PPATK TERIMA PENGHARGAAN DI HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL 2024  
PPATK RECEIVES AWARD ON INTERNATIONAL ANTI-NARCOTICS DAY 2024



## PPATK RAIH PENGHARGAAN KEARSIPAN, BUKTI KOMITMEN TERHADAP TRANSPARANSI PUBLIK

PPATK RECEIVES ARCHIVAL AWARD, PROOF OF COMMITMENT TO PUBLIC TRANSPARENCY

Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan di Samarinda, 29 Mei 2024, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kembali menorehkan prestasi. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menganugerahkan penghargaan sebagai Instansi Pemerintah Terbaik II kepada PPATK untuk kategori Lembaga Tinggi Negara/ Lembaga Nonstruktural (LNS)/Lembaga Penyiaran Publik (LPP) tahun 2023 dan 2024 dengan perolehan nilai 94,63 dengan kategori "Sangat Memuaskan".

Penghargaan ini merupakan pengakuan atas komitmen PPATK yang selalu mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan dalam pengelolaan arsipnya yang sangat memuaskan. Dengan sistem pengarsipan yang mumpuni, PPATK mampu menjaga catatan penting sejarah pelaksanaan tugas dan fungsinya kerjanya sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan. Pengelolaan arsip yang rapi dan terstruktur tidak hanya mempertahankan integritas data, tetapi juga memudahkan akses publik terhadap informasi yang dibutuhkan.

Langkah ini menjadi awal dari upaya PPATK menuju pengelolaan *Big Data* yang berkualitas. Dengan penghargaan ini pula, PPATK berharap dapat terus memberikan pelayanan terbaik dan tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas publik. Pengakuan ini juga mempertegas posisi PPATK sebagai lembaga yang tidak hanya fokus pada tugas utamanya, tetapi juga memperhatikan aspek pengelolaan data dan arsip sebagai bagian integral dari pelayanannya kepada masyarakat.

National Archives Coordination Meeting in Samarinda on May 29, 2024, the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) achieved another milestone. The National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI) honored PPATK as the Second Best Government Agency in the category of State Higher Institutions/Nonstructural Institutions (LNS)/Public Broadcasting Institutions (LPP) for the years 2023 and 2024 with category "Excelent".

This award is an acknowledgment of PPATK's commitment to always complying with statutory regulations in the field of archives in managing its archives which is very satisfactory. With a capable archiving system, PPATK is able to maintain important historical records of the implementation of its duties and functions while preparing itself to face future challenges. Neat and structured archive management not only maintains data integrity, but also facilitates public access to the information needed.

This achievement marks the beginning of PPATK's journey towards quality Big Data management. With this recognition, PPATK aims to continue delivering exceptional service and leading the way in maintaining transparency and public accountability. The award underscores PPATK's commitment to not only its primary tasks but also to the critical aspects of data and archive management as an integral part of its service to the community.



PPATK RAIH PENGHARGAAN KEARSIPAN, BUKTI KOMITMEN TERHADAP TRANSPARANSI PUBLIK  
PPATK RECEIVES ARCHIVAL AWARD, PROOF OF COMMITMENT TO PUBLIC TRANSPARENCY



# GLOSARIUM

## GLOSSARY

<b>AKIP</b>	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <i>Government Performance Accountability System</i>
<b>AML</b>	Anti Money Laundering <i>Anti Money Laundering</i>
<b>AML CTF</b>	Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing <i>Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing</i>
<b>ANRI</b>	Arsip Nasional Republik Indonesia <i>National Archives of The Republic Indonesia</i>
<b>Apgakum</b>	Aparat Penegak Hukum <i>Law Enforcement Officers/Agencies</i>
<b>APH</b>	Aparat Penegak Hukum <i>Law Enforcement Officers/Agencies</i>
<b>APU-PPT</b>	Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme <i>Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing</i>
<b>ASEAN</b>	Association of Southeast Asian Nations <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
<b>ASN</b>	Aparatur Sipil Negara <i>Civil Servant</i>
<b>BAWASLU</b>	Badan Pengawas Pemilihan Umum <i>General Election Supervisory Agency</i>
<b>BI</b>	Bank Indonesia <i>Central Bank of Indonesia</i>
<b>BMN</b>	Barang Milik Negara <i>State-owned Asset</i>
<b>BNN RI</b>	Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia <i>National Anti Narcotics Agency</i>
<b>BNPT</b>	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme <i>National Anti Terrorism Board</i>
<b>BPK</b>	Badan Pemeriksa Keuangan <i>Indonesian Audit Board</i>

<b>BPR</b>	Bank Perkreditan Rakyat <i>Rural Bank</i>
<b>CAT</b>	Collaborative Analysis Team <i>Collaborative Analysis Team</i>
<b>CBCC</b>	Cross Border Cash Carrier <i>Cross Border Cash Carrier</i>
<b>CIFG</b>	Counter ISIS Finance Group <i>Counter ISIS Finance Group</i>
<b>CSM</b>	Cyber Security Maturity <i>Cyber Security Maturity</i>
<b>DJP</b>	Direktorat Jenderal Pajak <i>Directorate General of Taxes</i>
<b>DTTOT</b>	Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris <i>List of Suspected Terrorist Group and Organization</i>
<b>DUMAS</b>	Pengaduan Masyarakat <i>Public Complaints</i>
<b>FATF</b>	Financial Action Task Force <i>Financial Action Task Force</i>
<b>FGD</b>	Focus Group Discussion <i>Focus Group Discussion</i>
<b>FIGG</b>	Financial Intelligence Consultative Group <i>Financial Intelligence Consultative Group</i>
<b>FinCEN</b>	Financial Crimes Enforcement <i>Financial Crimes Enforcement</i>
<b>FIR on ML/TF</b>	Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing <i>Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing</i>
<b>FIU</b>	Financial Intelligence Unit <i>Financial Intelligence Unit</i>
<b>GFC</b>	Green Financial Crime <i>Green Financial Crime</i>
<b>HA</b>	Hasil Analisis <i>Analysis Result</i>

<b>HANI</b>	Hari Anti Narkotika Internasional <i>International No Drugs Day</i>
<b>Humas</b>	Hubungan Masyarakat <i>Public Relations</i>
<b>HP</b>	Hasil Pemeriksaan <i>Examination Report</i>
<b>ICRG</b>	International Cooperation Review Group <i>International Cooperation Review Group</i>
<b>IE</b>	Indeks Efektivitas <i>Effectiveness Index</i>
<b>IFTI</b>	International Funds Transfer Instruction <i>International Funds Transfer Instruction</i>
<b>IKK</b>	Indikator Kinerja Kegiatan <i>Activity Performance Indicator</i>
<b>IKU</b>	Indikator Kinerja Utama <i>Key Performance Indikator</i>
<b>INF</b>	Informasi <i>Information</i>
<b>IO</b>	Immediate Outcome <i>Immediate Outcome</i>
<b>ISIS</b>	Islamic State of Iraq and Syria <i>Islamic State of Iraq and Syria</i>
<b>ISO</b>	International Organization for Standardization <i>International Organization for Standardization</i>
<b>ITKP</b>	Indeks Tata Kelola Pengadaan <i>Procurement Governance Index</i>
<b>K/L/D</b>	Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah <i>Ministries/Institutions/Regional Work Units</i>
<b>KAMI</b>	Keamanan Informasi <i>Information Security</i>
<b>KPA</b>	Kuasa Pengguna Anggaran <i>Proxy of Budget User</i>
<b>KPK</b>	Komisi Pemberantasan Korupsi <i>Indonesia's Corruption Eradication Commission</i>
<b>KPU</b>	Komisi Pemilihan Umum <i>General Election Commissions</i>
<b>KSP</b>	Koperasi Simpan Pinjam <i>Savings and Loan Association</i>
<b>KTT</b>	Konferensi Tingkat Tinggi <i>International Summit</i>

<b>KUPVA</b>	Kelompok Usaha Penukaran Valuta Asing <i>Foreign Exchange Business Group</i>
<b>LO</b>	Laporan Operasional <i>Operational Report</i>
<b>LO</b>	Penghubung atau pendamping antara peserta dengan pihak penyelenggara <i>Liaison Officer</i>
<b>LP3K</b>	Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan <i>Archives Education and Training Organizing Institutions</i>
<b>LPJK</b>	Lembaga Penyelenggara Jasa Kearsipan <i>Institutions Archive Services Organizer</i>
<b>LPP</b>	Lembaga Pengawas Pengatur <i>Regulatory Supervisory Agencies</i>
<b>LPSDK</b>	Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye <i>Campaign Fund Contribution Report</i>
<b>Menkop dan UKM</b>	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah <i>Ministry of Cooperatives and SMEs of The Republic of Indonesia.</i>
<b>MER</b>	Mutual Evaluation Report <i>Mutual Evaluation Report</i>
<b>MoU</b>	Memorandum of Understanding <i>Memorandum of Understanding</i>
<b>MTN</b>	Medium Term Notes <i>Medium Term Notes</i>
<b>MYR</b>	Malaysian Ringgit <i>Malaysian Ringgit</i>
<b>NII</b>	Negara Islam Indonesia <i>Indonesian Islamic State</i>
<b>Nilai Inti</b>	"Prinsip-prinsip atau keyakinan dasar yang dipegang teguh seorang individu atau organisasi dalam menjalankan aktivitasnya" <i>"Core Value : basic principles or beliefs that an individual or organization adheres to in carrying out its activities"</i>
<b>NKRI</b>	Negara Kesatuan Republik Indonesia <i>Unitary State of the Republic of Indonesia</i>



<b>Nominee</b>	"Seseorang atau perusahaan yang namanya digunakan untuk pembelian suatu benda seperti saham, tanah dan bangunan, dan lainnya tetapi sebenarnya bukan pemilik asli dari benda tersebut" <i>A person or company whose name is used to purchase an object such as shares, land and buildings, etc. but who is not actually the original owner of the object</i>	<b>Pendanaan Terorisme</b>	"Segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris." <i>"Terrorism Funding is any action in the context of providing, collecting, giving or lending funds, either directly or indirectly, with the intention of being used and/ or known to be used to carry out terrorist activities, terrorist organizations or terrorists."</i>	<b>Profesi</b>	Bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan atau kejuruan tertentu <i>A paid occupation, especially one that involves prolonged training and a formal qualification</i>	<b>SAKIP</b>	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah <i>Government Agency Performance Accountability System</i>
<b>NRA</b>	National Risk Assessment <i>National Risk Assessment</i>	<b>Pilkada</b>	Pemilihan Kepala Daerah <i>Regional Head Elections</i>	<b>PTD</b>	Penyelenggara Transfer Dana <i>Remittance Companies</i>	<b>SAKTI</b>	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi <i>Agency Level Financial Application System</i>
<b>NSPK</b>	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria <i>Standard Procedure Norms and Criteria</i>	<b>PJK</b>	Penyedia Jasa Keuangan <i>Financial Service Providers</i>	<b>PTO</b>	Petunjuk Teknis Operasional <i>Operational Instructions</i>	<b>SAP</b>	Standar Akuntansi Pemerintahan <i>Government Accounting Standards</i>
<b>OPAC</b>	Online Public Access Catalogue <i>Online Public Access Catalogue</i>	<b>PJP LR</b>	Penyelenggara Jasa Pembayaran Layanan Remitansi <i>Remittance Service Payment Service Provider</i>	<b>Pusdiklat</b>	Pusat Pendidikan dan Latihan <i>Educational and Training Center</i>	<b>SDI</b>	Satu Data Indonesia <i>One Indonesian Data</i>
<b>P3DN</b>	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri <i>Increased Use of Domestic Products</i>	<b>PKPT</b>	Program Kerja Pengawasan Tahunan <i>Annual Supervision Work Program</i>	<b>PVA</b>	Pedagang Valuta Asing <i>Authorized Money Changer</i>	<b>SDM</b>	Sumber Daya Manusia <i>Human Resources Development</i>
<b>PANRB</b>	Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi <i>Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform</i>	<b>PKS</b>	Perjanjian Kerja Sama <i>Cooperation Agreement</i>	<b>Rakornas</b>	Rapat Koordinasi Nasional <i>National Coordination Meeting</i>	<b>SGD</b>	Singapore Dollar <i>Singapore Dollar</i>
<b>PBJ</b>	Penyedia Barang dan Jasa <i>Provider of Goods and Services</i>	<b>PMI</b>	Pekerja Migran Indonesia <i>Indonesian Migrant Workers</i>	<b>RAN PE AWARD</b>	"Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme" <i>National Action Plan for Preventing Violent Extremism that Leads to Terrorism</i>	<b>SIMAN</b>	Sistem Manajemen Aset Negara <i>State Asset Management System</i>
<b>PBJP</b>	Penyedia Barang dan/atau Jasa dan Profesi <i>Designated non-financial Businesses and Professions</i>	<b>PMK</b>	Peraturan Menteri Keuangan <i>Regulation of Minister of Finance</i>	<b>RB</b>	Reformasi Birokrasi <i>Bureaucratic Reform</i>	<b>SISPEKA</b>	Sistem Informasi Penanganan Kejahatan Ekonomi <i>Statistical Data for Handling Economic Crimes</i>
<b>PDG</b>	Policy Development Group <i>Policy Development Group</i>	<b>PMPJ</b>	Prinsip Mengenali Pengguna Jasa <i>Principles of Recognizing Service Users</i>	<b>RBA</b>	Risk Based Approach <i>Risk Based Approach</i>	<b>SKP</b>	Sasaran Kinerja Pegawai <i>Key Performance Indikator</i>
<b>Pemblokiran</b>	"Tindakan mencegah pentransferan, perubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu" <i>Bloking</i>	<b>PNBP</b>	Penerimaan Negara Bukan Pajak <i>Non-tax Revenue</i>	<b>RENSTRA</b>	Rencana Strategis <i>Strategic Plan</i>	<b>SKP</b>	Sasaran Kinerja Pegawai <i>Key Performance Indikator</i>
<b>Pemilu</b>	Pemilihan Umum <i>Election</i>	<b>POLRI</b>	Kepolisian Negara Republik Indonesia <i>Indonesian National Police</i>	<b>RKBN</b>	Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara <i>State Property Requirement Plan</i>	<b>SNI ISO/IEC</b>	"Standar Nasional Indonesia The International Organization for Standardization/ International Electrotechnical Commission" <i>"Indonesian National Standard The International Organization for Standardization/ International Electrotechnical Commission"</i>
<b>Pencucian Uang</b>	"Suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/ dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal" <i>"An attempt to hide or disguise the origin of money/ funds or assets resulting from criminal acts through various financial transactions so that the money or assets appear as if they come from activities valid/ legal"</i>	<b>PPATK Digipus</b>	Perpustakaan Digital PPATK <i>PPATK Digital Library</i>	<b>RKDK</b>	Penggunaan Rekening Dana Kampanye <i>Use of Unreported Campaign Fund Accounts</i>	<b>SOP</b>	Standar Operasional Prosedur <i>Standard Operational Procedure</i>
		<b>PPK</b>	Pejabat Pembuat Komitmen <i>Commitment Making Official</i>	<b>RPD</b>	Rencana Penarikan Dana <i>Fund Withdrawal Plan</i>	<b>SPAK</b>	Survei Persepsi Anti Korupsi <i>Anti Corruption Perception Survey</i>
		<b>PPNS</b>	Penyidik Pegawai Negeri Sipil <i>Civil Servants Investigator</i>	<b>RPJMN</b>	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional <i>National Medium Term Development Plan</i>	<b>SPBE</b>	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik <i>Electronic Based Government System</i>
		<b>PPP</b>	Public Private Partnership <i>Public Private Partnership</i>	<b>RPJP</b>	Rencana Pembangunan Jangka Panjang <i>National Long Term Development Plan</i>	<b>SPI</b>	Survei Penilaian Integritas <i>Integrity Assesment Survey</i>
		<b>PPSPM</b>	Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal <i>Proliferation of Weapons of Mass Destruction</i>	<b>RTMG</b>	Risk, Trends and Methods Group <i>Risk, Trends and Methods Group</i>	<b>SPIP</b>	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah <i>Government Internal Control System</i>
				<b>RUP</b>	Rencana Umum Pengadaan <i>General Procurement Plan</i>	<b>SPKP</b>	Survei Persepsi Kualitas Pelayanan <i>Service Quality Perception Survey</i>
				<b>RUU</b>	Rancangan Undang - Undang <i>Draft Bill</i>	<b>SPSE</b>	Sistem Pengadaan Secara Elektronik <i>Electronic Procurement System</i>
						<b>SRA</b>	Sectoral Risk Assessment <i>Sectoral Risk Assessment</i>



<b>SWI</b>	Satgas Waspada Investasi <i>Investment Alert Task Force</i>
<b>TA</b>	Tahun Anggaran <i>Fiscal Year</i>
<b>THB</b>	Thai Baht <i>Thai Baht</i>
<b>TI</b>	Teknologi Informasi <i>Information Technology</i>
<b>TKM</b>	Transaksi Keuangan Mencurigakan <i>Suspicious Financial Transactions</i>
<b>TP</b>	Tindak Pidana <i>Criminal Offense</i>
<b>TPA</b>	Tindak Pidana Asal <i>Predicate Crimes</i>
<b>TPPT</b>	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme <i>Terrorism Financing Crimes</i>
<b>TPPU</b>	Tindak Pidana Pencucian Uang <i>Money Laundering</i>
<b>UKPBJ</b>	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa <i>Goods/Services Procurement Work Unit</i>

<b>Underlying</b>	Kegiatan yang mendasari sebuah transaksi <i>Activities that underlie a transaction</i>
<b>UPR</b>	Unit Pemilik Risiko <i>Risk Unit Owner</i>
<b>USD</b>	United States Dollar <i>United States Dollar</i>
<b>WBBM</b>	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani <i>Clean and Serving Bureaucratic Area</i>
<b>WBK</b>	Wilayah Bebas Korupsi <i>Corruption Free Area</i>
<b>WNA</b>	Warga Negara Asing <i>Foreign Citizen</i>
<b>WTP</b>	Wajar Tanpa Pengecualian <i>Unqualified Opinion</i>
<b>ZI</b>	Zona Integritas <i>Integrity Zones</i>
<b>Fintech</b>	Teknologi Finansial <i>Financial Technology</i>

**Hak Cipta © 2024 oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan**

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penulis atau penerbit.





# Milestone

Laporan Semester | *Mid-year Report*  
**2024**

**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

*Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center*

**[www.ppatk.go.id](http://www.ppatk.go.id)**